

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam sejarah perkembangan masyarakat Indonesia, kota-kota tua (yang mempunyai akar sejarah) banyak ditemukan di daerah-daerah pedalaman, muara sungai-sungai besar dan daerah pesisir pantai di kepulauan Jawa, seperti Tuban, Surabaya, Pasuruan, Banten ataupun Cirebon. Dari banyak kota-kota tersebut, kebanyakan mempunyai karakteristik yaitu terletak berdekatan dengan pusat-pusat pemerintahan kekuasaan tradisional. Banyak kasus yang menampakkan fungsi letak tersebut sebagai bentuk pemaksimalan aspek-aspek keamanan sebab kota-kota itu mempunyai fungsi untuk mendistribusikan berbagai macam barang dan jasa, di samping juga kota-kota itu harus menjadi pusat-pusat administrasi bagi otoritas tradisional untuk mengatur wilayah yang ada disekitarnya.

Kota-kota itu sendiri tidaklah muncul dan berkembang secara spontan dari kemauan masyarakat yang ada didalamnya. Namun lokasi, desain dan ukuran kota-kota itu bergantung pada pola pengembangan yang dimiliki oleh pemegang otoritas tradisional tersebut. Untuk beberapa kasus kota-kota di Jawa, pola pembentukannya mengkombinasikan berbagai dimensi, baik politik, ekonomi ataupun budaya. Hal itu tampak dalam relasi antar variabel dalam keberadaan kota-kota tua itu, mulai dari keraton sebagai sentral kekuasaan yang diimbangi dengan keberadaan masjid (tempat beribadah agama Islam) sebagai

lambang pemaknaan religiusitas, alun-alun hingga keberadaan pasar sebagai faktor untuk memobilisasi kehidupan ekonomi masyarakatnya. Sehingga suasana yang terbentukpun otomatis penuh dengan nuansa tradisional dan kental akan kekhasan Jawa.

Namun, pasca kedatangan kolonialisme, konstruksi kota-kota di beberapa wilayah mengalami pergeseran terutama terkait dengan berbagai kebijakan kaum kolonial untuk melakukan dekonstruksi terhadap kebudayaan masyarakat tradisional. Salah satu kebijakan itu adalah, membangun kota-kota di kepulauan Jawa layaknya kota-kota yang ada di kerajaan Belanda. Konsekuensi yang paling dominan dan ada adalah terjadinya pemindahan karakter dan budaya borjuasi Belanda ke Indonesia (dengan berbagai upayanya) dan berimplikasi pada terbangunnya konstruksi baru, dimana yang berkembang kemudian adalah kota Timur yang khas, sebagai bentuk dari proses akulturasi yang sangat instruktif.

Sistem monopoli Hindia Belanda, membuat keberadaan sifat borjuasi Belanda yang bebas, menjadi tidak mungkin. Sehingga bentuk-bentuk administrasi sekalipun lebih bersifat autokratik ketimbang demokratis. Para pegawai kompeni tetap memakai statusnya sebagai pedagang namun cara hidup mereka tidak kurang dari cara hidup bangsawan. Bahkan cara hidup orang-orang kelas bawahpun mengalami proses adaptasi dengan pola perkembangan kota yang semakin modern (*mestizoe*). Dan untuk berbagai bangunan fisik yang ada, kota-kota itu mulai mengalami perombakan dengan masuknya elemen-elemen Eropa bersamaan dengan elemen tradisional (Jawa). Disinilah letak upaya kaum kolonial untuk tetap mempertahankan prestise kolonialisme mereka dalam suatu masyarakat yang didominasi oleh sistem yang feodal. Kolonialisme tidak hanya

terefleksi dalam segregasi yang sangat besar dalam tempat tinggal yang ditempati oleh berbagai kelompok penduduk perkotaan, tetapi juga dalam perjuangan mereka untuk memperoleh lingkup kehidupan antara lain terungkap dalam aspek eksternal kota-kota itu (W.F. Wertheim, 1998 : 133-143). Sehingga pasca kekuasaan kolonialisme, kecenderungan untuk melanjutkan pembangunan kota-kota di Indonesia lebih didominasi oleh latar belakang historis seperti yang telah dikemukakan di awal tadi, dimana tradisi keIndonesiaan tetap ada, entah bisa dalam bentuk berupa sisa-sisa peninggalan kekuasaan tradisi kemudian pengaruh kolonialisme (Eropa) yang telah meletakkan konsep kota-kota modern dan ditambah dengan beberapa tradisi kaum pendatang yang kemudian mampu untuk tetap eksis bahkan seringkali mereka menjadi pelaku utama dalam roda perekonomian (B.N. Marbun, 1995 : 85)

Agak berbeda dengan kota-kota di Indonesia, arah gerak kota-kota di Eropa sendiri di kategorikan oleh M. Santos, menjadi empat periode dalam sejarah yaitu periode sebelum perdagangan dunia (sebelum abad ke-16), periode perdagangan (yang dimulai abad ke-16), masa revolusi industri dan pergeseran kapital (sejak 1850) dan periode sekarang atau pasca PD II. Dari situ kita ingin membuat sebuah tipologi sederhana tentang arah gerak perkembangan kota-kota tua yang dimulai dari terbentuknya kota-kota tua itu pada masa-masa awal kekuasaan tradisionalisme di bumi nusantara terbangun, yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai perubahan yang akan dialaminya sebagai dampak dari kedatangan kolonialisme. Dampak ekspansi dari kaum kolonial adalah merubah berbagai bentuk tradisionalisme ke arah modernisasi seperti halnya kota-kota di Eropa pasca revolusi industri dan membukakan pintu bagi para pendatang dari Asia untuk kemudian menjadi partner

dagang mereka. Setelah masa-masa kemerdekaan kota-kota di Indonesia mulai memasuki masa rekonstruksi baru sesuai dengan semangat kemerdekaan namun tidak sepenuhnya berniat untuk mengubah peninggalan sejarah sebelumnya.

Kota Surakarta sendiri adalah salah satu dari berbagai potret kota-kota tua di Indonesia, yang mengalami proses perubahan terus menerus sehingga terkonstruksi berbagai konsep baru tentang kota Surakarta. Perubahan yang dialami kota Surakarta, meliputi perubahan fisik sebagaimana kota-kota yang mengalami prosesi seperti kota-kota dibagian nusantara yang lain dan perubahan karakter budaya yang juga tidak dapat dihindari, yang mana kota Surakarta sebagai salah satu wakil kebudayaan Jawa telah mengalami kegagalan dalam mengembangkan dirinya. Banyak fakta sejarah yang menunjukkan kota Surakarta telah kalah dalam dalam menundukkan realitas dunia, karena berbagai kelemahan yang kemudian mampu mengikis kekuatan yang telah mapan sejak tahun 1613 dibawah pimpinan Sultan Agung. Salah satu kelemahan tersebut adalah lemahnya infra struktur politik yang dimiliki oleh budaya Jawa (dalam hal ini diwakili oleh Surakarta). Konflik politik internal antar priyayi yang akut ditambah pukulan telak dengan ekspansi kaum penjajah menyebabkan hilangnya kemampuan sistem budaya Jawa (dan Islam) yang sebelumnya berkembang di Surakarta untuk mengintegrasikan dirinya dalam berbagai perubahan yang ada. Kemudian kondisi ini diikuti segera dengan disfungsi subsistem pendukungnya, yang kemudian mengarah pada lahirnya berbagai kekacauan pada sistem tersebut.

Berulang kali kerusakan dialami oleh kota Surakarta tanpa ada kemampuan untuk melakukan perlindungan terhadap karakter kebudayaan yang telah dimiliki sebelumnya atau dengan kata lain telah terjadi proses involusi kultural yang luar biasa

di kota Surakarta ini. Kegagalan tersebut menjadikan budaya Jawa yang ada, seperti tidak mau mati namun juga untuk tegak dan menegaskan berbagai bingkai kebudayaannya terhadap berbagai bentuk pembusukan kebudayaan juga tidak mampu. Yang terjadi hanyalah berbagai bentuk toleransi kebudayaan dengan mengambil bentuknya masing-masing, entah sofistikasi kebudayaan lewat berbagai proses simbolisme ikon-ikon budaya Jawa, kepasrahan terhadap radikalisme yang kerap melanda hingga diam seribu bahasa terhadap ekspansi modernisasi sejak tahun 70-an yang menjadikan budaya Jawa menjadi sekedar masa peralihan saja untuk kemudian membangun karakter budaya yang menekankan individualitas, rasionalitas ataupun pragmatisme sebagai postulat dari modernisasi untuk memecah berbagai kearifan lokal yang ada sebelumnya. Dan Kauman adalah bingkai kecil dari potret buram wajah kota Surakarta, yang kental relasi kebudayaannya dengan masa silam yang pernah eksis (karena Kauman dibangun dalam kerangka kejayaan budaya Jawa yang telah mengelaborasi Islam-Hindu ke dalam karakternya yang spesifik) dan sekarang sedang berhadapan dengan berbagai agenda modernitas untuk kemudian mengubahnya menjadi satu karakter kebudayaan yang baru.

Berbagai agenda dari pemerintah kota Surakarta (sebagai representasi dari kekuatan negara) seperti halnya pembangunan kawasan sekitar keraton untuk dijadikan aset wisata, pengembangan unit-unit ekonomi lewat berbagai perangkat modern seperti bank, toko-toko modern, pasar-pasar modern hingga perubahan status Kauman -yang dulunya dimiliki oleh keraton kemudian dilegalkan menjadi aset negara- yang status tanahnya boleh dimiliki oleh individu-individu. Konsekuensi dari pengembangan Balaikota dan keraton menjadi kawasan perdagangan, pada akhirnya memberi dampak pada Kauman

secara langsung. Daerah Kauman-pun pada akhirnya ikut mendinamisir dirinya seiring dengan dinamika daerah-daerah di kawasannya, karena Kauman adalah salah satu bagian dari pengembangan wilayah kota Surakarta secara keseluruhan. Perubahan yang terjadi kemudian meliputi dimensi fisik maupun non fisik entah dalam kerangka sistem nilai, aktivitas ekonomi hingga orientasi perilaku yang dulunya disandarkan pada religi, sekarang akan dilihat proses dan sejauh mana perubahan itu telah terjadi di dalam masyarakat Kauman.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Penelitian ini menyandarkan pada suatu kerangka berpikir yang masih bersifat hipotetik dimana Kauman sebagai suatu masyarakat yang pada awal proses pembentukannya secara sengaja dikonstruksi untuk menjadi bagian dari suatu sistem budaya yang ada yaitu tradisionalisme dan Islam di Surakarta (Mataram), telah mengalami pergeseran. Pergeseran-pergeseran itu merupakan akibat tidak langsung dari arah perubahan masyarakat yaitu dengan mulai terkikisnya kekuatan tradisionalisme untuk kemudian dihadapkan pada satu pilihan tunggal yaitu modernitas.

Kauman sebagai representasi tidak langsung dari kekuatan tradisionalis yang telah melakukan koalisi dengan agama mampu menjadi satu bagan yang menggambarkan proses transisi tersebut. Skala waktu yang berjalan telah mengubah Kauman dari kota tua yang tradisional dan religius menjadi bagian dari sistem yang baru yaitu modernisasi, tentunya dengan berbagai indikator yang ada.

Dari situ kajian tentang perubahan sosial di masyarakat Kauman ini ingin melihat proses perubahan tersebut. Dimana masa-masa transisi Kauman untuk melakukan berbagai adapta-

si terhadap perubahan-perubahan tersebut, mampu menjelaskan kepada kita tentang arti perubahan, arah perubahan dan mekanisme perubahan. Oleh karena itu kajian terhadap perubahan sosial ini, peneliti merumuskannya dalam pertanyaan :

1. Meliputi apa saja, Kauman telah mengalami perubahan (dengan karakteristiknya yang lama)?
2. Bagaimana pola perubahan yang terjadi di Kauman?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab dari perubahan yang ada di Kauman?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Usaha untuk melakukan studi perubahan sosial pada penelitian ini, diharapkan mampu menghasilkan :

1. Suatu gambaran tentang sebuah sistem sosial budaya yang mengalami bentuk-bentuk kemundurannya untuk kemudian digantikan dengan sistem budaya yang lain.
2. Suatu penjelasan tentang proses dan pola perubahan dalam suatu masyarakat dengan berbagai implikasi yang menyertai perubahan tersebut.
3. Suatu penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan perubahan itu terjadi.
4. Sebuah relevansi antara teori-teori yang menjelaskan perubahan sosial dengan karakter masyarakat yang mempunyai bingkai kebudayaan yang khas.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa :

1. Secara teoritik, mampu memberi pemahaman akan studi perubahan sosial terutama untuk masyarakat dengan karakter yang khas

2. Pembuktian secara teoritik dan metodologis berbagai teori perubahan yang dibangun di atas konstruk masyarakat yang berbeda dengan masyarakat Jawa.
3. Secara langsung penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk melihat masyarakat dalam karakter sesungguhnya dimana perubahan adalah hal yang mutlak namun seiring kebijakan yang ada dan yang akan ada, agar tetap memperhatikan berbagai aspek yang ada dalam masyarakat.

#### **E. KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka dalam studi perubahan sosial sebenarnya berangkat dari sebuah asumsi dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dinamis. Dimanis dalam artian yang luas, dimana manusia mempunyai piranti untuk mendinamisir dirinya, yang juga dibekali kemampuan untuk beradaptasi atau kemampuan untuk merubah segala sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Dari realitas tersebut, berbagai perspektif telah muncul dalam tradisi pemikiran sosiologi. Dengan menempatkan perubahan sebagai sesuatu yang selalu melekat didalam manusia sebagai salah satu aspek dalam kehidupan sosialnya, dengan kata lain perubahan adalah normal dan berkelanjutan. Apapun level analisis yang akan kita gunakan baik pada tingkat individual ataupun pada tingkat kolektivitas. Dalam bahasa lain, sekalipun masyarakat selalu mengusahakan sebuah stabilitas dalam sistem sosialnya (entah dalam nilai, kepercayaan ataupun konsensus) namun jelas bahwa masyarakat tetap mempunyai karakter untuk berubah dan perubahan itu sendiri merupakan aspek yang kontinuitif. Hal itu selalu akan terjadi sebab akan selalu ada variabel yang mendorong perubahan tersebut.

Beberapa hal dalam kajian tentang perubahan masih menjadi diskursus dikemukakan oleh Robert H Lauer, ada pada beberapa ruang teoritis diskursus perubahan yaitu mengenai arti perubahan itu sendiri, arah perubahan, mekanisme perubahan dan beberapa asumsi dasar tentang karakter dasar sifat dari manusia. Namun, tidak tertinggal, Laurer juga menampakkan beberapa kecendrungan yang paling akhir dari kajian tentang perubahan sosial.

Mengenai diskursus arti dari perubahan sosial, ada garis merah yang mendasari dan menjadi kesamaan dari berbagai teori tersebut dimana konsepsi perubahan sosial lebih mengacu pada perubahan yang dialami oleh masyarakat diberbagai tingkat, mulai dari individu hingga tingkat kolektivitas, dari nilai-nilai sosial hingga moralitas tertinggi yaitu agama. Para pemikir dari aliran *funksional-struktural* yang memberikan penekanan pada perubahan yang ada pada ruang-ruang struktur masyarakat karena menurut mereka struktur itu sendiri cenderung stabil dan setiap perubahan pada ruang ini berarti telah terjadi proses yang luar biasa dengan penyebab yang sama-sama mempunyai kekuatan besar untuk melakukan perubahan. Sehingga perubahan yang terjadi akan tergambarkan dalam perubahan yang dialami oleh nilai-nilai dasar yang sebelumnya mampu menyatukan masyarakat tersebut. Berbeda dengan teoritis struktural, aliran *developmentalis* malah mengartikan perubahan sebagai arah pergerakan masyarakat menurut suatu garis perkembangan tertentu. Dimana terjadinya perubahan sebagai akibat dari perubahan sifat kehidupan masyarakat itu sendiri. Disini perbedaan ruang-ruang perubahan pada masyarakat, juga menjadi kajian tersendiri, dimana Spencer melihat perubahan masyarakat ada pada proses evolusinya, Durkheim melihat pada bentuk-bentuk solidaritas, Comte pada pola pikir masyarakat atau

Marx yang deterministik melihat pada perubahan alat-alat produksi dan kepemilikannya. Tetapi yang jelas berbagai perubahan itu terjadi merunut suatu pola tertentu, tidak serampangan tanpa pola. Namun berbeda lagi ketika kita juga melibatkan para teoritis yang melihat perubahan masyarakat pada aspek *psikologi-sosial* yang melihat berbagai jenis perubahan khusus yang diakibatkan oleh proses modernisasi sebagai implikasi dari agenda pembangunan ekonomi pada negara maju hingga yang masih berkembang. Mereka memusatkan perhatiannya pada peranan individu dalam masyarakat yang sedang memodernisasi diri. Dan yang tidak dapat kita tinggalkan adalah pendefinisian perubahan oleh pemikir klasik yang menggunakan perspektif *historis* (siklus) mereka, dalam melihat perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai perubahan pada bentuk peradaban masyarakat itu sendiri.

Persoalan tentang arah perubahan juga terjadi fragmentasi, dimana orang-orang historian menegaskan bahwa -dalam pengertian mereka- perubahan mempunyai arah yang jelas, yang dimulai dari lahirnya peradaban kemudian berkembang dan hancur dengan sendirinya. Berbeda dengan perspektif tersebut, orang Parsons-nian sebagai wakil dari aliran fungsionalisme hanya mengajukan proposal pada masyarakat yang sedang berkembang untuk meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakatnya dalam melalui berbagai proses perubahan tanpa membuat penjelasan tentang arah perubahan itu sendiri. Sedang modernisasi hanya mengarahkan masyarakat pada proses pengadopsian karakter masyarakat Barat dengan berbagai bentuk sisi kehidupannya, disini orang-orang yang menggunakan analisis psikologi sosial melihat kemandekan suatu masyarakat menyebabkan proses pengadopsian tersebut. Tidak ada suatu penggambaran tentang tingkat-tingkat masyarakat seperti halnya

yang dilakukan oleh orang-orang developmentalis, ketika mereka membuat penjelasan tentang awal dan akhir dari perubahan masyarakat.

Perdebatan tentang mekanisme perubahan juga menjadi bagian yang penting dan tidak dapat kita abaikan ketika menginginkan penjelasan dan relevansi berbagai teori tersebut. Karena penggambaran terhadap proses perubahan dengan berbagai alatnya akan mampu menempatkan kita pada pilihan-pilihan yang tegas antara pemikiran historis yang menempatkan berbagai variabel sebagai proses perubahan seperti tantangan dan tanggapan individu, sistem sosio-kultural yang berubah sebagai akibat dari perubahan berbagai aktivitas individu-individu di dalamnya (yang hampir sama dengan pemikiran developmentalisme) atau mekanisme yang ditawarkan oleh pemikir psikologi sosial yang mengemukakan berbagai keadaan internal individu yang didorong oleh fakta internal seperti kegelisahan, kebutuhan untuk berprestasi hingga berbagai stimulan yang diberikan oleh proses perkembangan institusi perekonomian dengan teoritis fungsionalis (terutama Parsons) yang memang tidak memberi ketegasan tentang mekanisme perubahan sosial yang terjadi namun mengemukakan berbagai penyebab internal dan eksternal perubahan sosial.

Namun semua perdebatan itu, tetap mempunyai benang merah antara satu dengan lainnya, dimana mereka menggunakan asumsi dasar yang sama. Bahwa prosesi perubahan itu mempunyai sifat melebar selama perubahan itu mempunyai penolakan yang minim sehingga perubahan akan selalu memperbesar makna perubahan itu sendiri takkala mampu memberi manfaat. Disamping asumsi lain yaitu perubahan tingkat kebutuhan manusia yang mampu menjadikan perubahan bersifat normal. Dari kondisi seperti itu, para teoritis melihat bahwa

arah perubahan dapat ditentukan, sejauh masih ada kerangka nilai yang tetap membingkai perubahan tersebut. Kerangka nilai itu akan melakukan kontrol terhadap perubahan dan apabila terjadi perubahan yang mampu merubah kerangka nilai (yang lama) maka otomatis hasil dari perubahan tersebut adalah kerangka nilai yang baru, yang juga akan kembali menjadi bingkai dari perubahan yang ada dan begitu seterusnya perubahan terkonstruksi dengan sendirinya. Semua itu tetap bisa berproses sebab manusia memang mempunyai sifat dasar sebagai makhluk sosial yang mempunyai kemampuan dan kecenderungan untuk hidup bermasyarakat.

Mengenai beberapa kecenderungan terakhir tentang kajian perubahan sosial, Laurer memberikan beberapa alternatif untuk mengkaji tema yang sama namun mempunyai pendekatan yang berbeda dengan berbagai pendekatan yang telah digunakan oleh beberapa teori sebelumnya yaitu pendekatan dengan menggunakan teori Konflik dari Ralf Dahrendrof, teori evolusi dengan tokohnya Gerhard Lenski atau teori Sistem Umum yang di gagas oleh Amitai Etzioni dalam eksemplarnya *The Active Society* (*Ibid*, 1985 : 154-188).

## **1. Perubahan Sosial**

### **a. Deskripsi Perubahan**

Astrid Susanto memberi deskripsi tentang perubahan masyarakat pada abad 20-an lebih dikarenakan oleh kemajuan teknologi, yang mana kemajuan itu merupakan kemajuan juga dalam dimensi ilmu pengetahuan manusia. Penegasannya bahwa kemajuan teknologi tidak saja hasil dari modifikasi dari suatu ilmu pengetahuan namun lebih jauh dari itu telah mampu mengubah manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Dimana salah satu perubahan itu adalah per-

ubahan pada tataran norma dan berbagai proses pembentukan norma-norma baru, yang merupakan inti dari usaha manusia dalam mempertahankan statusnya sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok dengan manusia yang lain. Prosesi perubahan ini mau tidak mau menjadi proses disintegrasi dalam banyak bidang, sehingga akan selalu ada usaha untuk mengembalikan tatanan yang telah berubah sebelumnya menjadi sebuah tatanan baru, yang lebih relevan dengan berbagai kebutuhan masyarakat yang terbaru juga. Namun ada kalanya tidak semua perubahan (yang sifatnya multi kompleks) akan berakhir dalam kondisi seperti apa yang diurai di atas. Sebab kemampuan manusia untuk tetap menerima berbagai bentuk perubahan yang menimpanya, juga berbeda. Bisa saja setelah perubahan terkonstruksi nilai-nilai baru namun tidak menutup kemungkinan akan ada individu-individu yang tenggelam dalam arus perubahan tanpa mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan tersebut (1999 : 157-162).

b. Definisi Perubahan

Perubahan itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses yang mengakibatkan keadaan sekarang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan perubahan itu sendiri bisa berupa kemunduran dan bisa juga berupa kemajuan. Sedangkan masyarakat (salah satunya) didefinisikan sebagai wadah dimana individu-individu di dalamnya saling berhubungan dengan hukum dan budaya tertentu untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Sehingga perubahan dalam kerangka masyarakat secara umum menyangkut perubahan pada

elemen-elemen yang terdapat di dalam masyarakat, baik itu pada sistem nilai, struktur ataupun sistem perilakunya (Abdul Syani, 1995 : 83). Atau dalam bahasa lain, proses perubahan masyarakat pada dasarnya merupakan perubahan pola perilaku kehidupan dari seluruh norma-norma sosial yang lama menjadi pola perilaku dan seluruh norma sosial yang baru secara seimbang, berkemajuan dan berkesinambungan. Konsekuensinya kemudian adalah pola-pola kehidupan masyarakat lama yang dianggap sudah usang diganti dengan pola-pola kehidupan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang paling kontemporer.

Hampir sama dengan pendapat tersebut, dalam *Dictionary of Sociology* membuat definisi perubahan sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial, bentuk-bentuk sosial serta setiap modifikasi pola antara hubungan yang mapan dan mempunyai standart perilaku. Sedangkan Robert H Laurer, lebih memberi penjelasan terhadap fragmen perubahan sosial pada berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individual hingga kolektivitas individu. Berbagai tingkat perubahan yang mewakili kawasan analisis dan satuan analisis yang mewakili setiap tingkat perubahan. Sehingga perubahan sosial akan dapat dipahami pada dimensi yang berbeda karena perubahan sosial hanya dapat dipelajari pada satu tingkat tertentu atau lebih dengan menggunakan berbagai kawasan studi dan berbagai satuan analisis. Oleh Laurer, digambarkan tingkat analisis perubahan sosial pada masyarakat akan mewakili kawasan studi pada sistem stratifikasi, struktur, demografi dan wakil unit

studinya pada pendapatan, kekuasaan, peranan hingga tingkat patologi. Dan pada individu sebagai tingkat analisis, mempunyai kawasan studi pada sikap dan wakil unit studinya pada keyakinan mengenai berbagai persoalan (Robert H Laurer, *Op. Cit.* : 3-8).

Sedangkan Hendropuspito (1989 : 255-257), merumuskan definisi perubahan sosial dalam rumusan, yang pertama, sebagai perbedaan keadaan yang berarti dalam unsur masyarakat dibanding dengan keadaan sebelumnya. Dan rumusan yang kedua, sebagai proses perkembangan unsur sosio-budaya masyarakat dari waktu ke waktu yang membawa perbedaan yang berarti dalam struktur dan fungsi masyarakat. Kedua definisi itu, dibangun di atas beberapa data riset yang memaparkan akan adanya perubahan yang berbeda pada tiap unsur budaya, titik tolak tujuan dan kontinum waktu yang diambil dari titik memulai sampai titik tujuan.

Dan setiap perubahan sosial yang ditempatkan sebagai realitas sosial mau tidak mau akan menyentuh tiga aspek unsur dasar yaitu manusia, waktu dan tempat. Dengan kata lain, setiap perubahan yang berarti akan digerakkan oleh manusia, dalam unit waktu tertentu dan lingkungan tertentu, maka konsekuensinya adalah setiap kajian perubahan tidak bisa mengabaikan semua aspek itu.

c. Proses Perubahan

Kemudian bagaimana proses perubahan tersebut berjalan dalam masyarakat? Padahal masyarakat dan perubahan adalah dua hal yang berbeda namun sering kali berada pada satu kebersamaan. Alvin L Berthan

menyatakan bahwa awal dari proses perubahan adalah proses diffusi karena hal ini akan terkait dengan penyebar luasan gagasan, ide-ide dan keyakinan maupun hasil-hasil budaya yang berupa fisik. Di sinilah letak perubahan berproses, dimana diffusi dimaknai sebagai suatu proses yang menyebarluaskan ciri khas suatu kebudayaan. Entah itu hasil dari suatu perubahan ataupun menjadi awal dari perubahan. Dan proses penyebar luasan berbagai perubahan itu dipengaruhi oleh banyak hal. Rogers dan Shoemacher menyatakan beberapa hal penting yang terkait dengan proses tersebut, antara lain :

- ☞ Inovasi yaitu suatu ide baru, tidak pandang apakah itu merupakan hasil ciptaan yang dihasilkan belum lama atau yang dihasilkan sebelum itu.
- ☞ Komunikasi yaitu interaksi yang berlangsung sewaktu orang yang satu mengkomunikasikan dan melontarkan suatu ide baru kepada yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- ☞ Sistem sosial dimana individu-individu bertindak dalam kaitannya dengan inovasi tertentu.
- ☞ Unsur waktu : berkaitan kemampuan orang untuk menerima inovasi baru dengan mudah, memiliki ciri-ciri berlainan dengan orang-orang yang membutuhkan waktu yang lama untuk menerima inovasi tersebut (>>>).

Dari beberapa gambaran di atas, kita ambil kesimpulan sederhana bahwa perubahan didalam masyarakat tidak selalu berjalan dengan lancar, oleh karena hambatan-hambatan tertentu. Ataupun kekuatan-

kekuatan yang tetap bersumber dari dalam masyarakat. Namun setiap perubahan, juga akan terkait dengan penerimaan masyarakat terhadap ide perubahan itu sendiri. Dimana individu-individu mengalami proses penerimaan yang berupa tahap-tahap tertentu yaitu penyadaran, dimana seseorang mengetahui adanya inovasi dan memperoleh beberapa pemahaman tentang bagaimana inovasi itu berfungsi. Lalu, persuasi yaitu tahap dimana seseorang berkenan atau tidak dengan inovasi tersebut, yang kemudian diikuti oleh keputusan dari seseorang yang terlibat dalam kegiatan yang membawanya pada pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi hingga pada akhirnya individu harus mengkonfirmasi dengan berbagai rasionalisasi keputusannya tersebut.

d. Faktor-faktor Penyebab Perubahan

Namun proses penerimaan tersebut, tidak bisa dilepaskan begitu saja dari berbagai variabel yang ada dalam masyarakat. Karena akan ada berbagai kondisi yang terdapat di dalam masyarakat dan memberi respon yang berbeda-beda terhadap ide perubahan itu. Ada bagian masyarakat yang menentang setiap ide perubahan, menentang tipe-tipe perubahan tertentu saja atau sudah puas dengan keadaan yang ada sambil beranggapan bahwa sumber perubahan tersebut tak tepat hingga masyarakat yang melihat tidak adanya sumber daya dalam masyarakat untuk melakukan perubahan yang diinginkan (Soleman b Taneko, 1990 : 147).

Berbagai kondisi tersebut disebabkan oleh adanya kekuatan yang bersaing di dalam masyarakat dan

sudah mapan kondisinya, kekompleks-an perubahan itu sendiri sehingga perubahan akan sulit dimaknai oleh masyarakat secara luas. Dan bisa juga berupa faktor-faktor seperti rasa takut terhadap akan terjadinya kegoyahan pada integritas kebudayaan yang ada, terutama individu-individu yang ada di dalam masyarakat. Yang sudah mempunyai investasi sosial yang tinggi, entah berupa status, penghargaan atau nilai-nilai yang meletakkannya pada posisi terhormat. Sehingga prasangka yang buruk terhadap hal-hal yang baru menjadi relevan karena berbagai bentuk kepentingan tersebut.

Kemudian, penting juga ditambahkan bahwa setiap perubahan dalam masyarakat tentu mempunyai penyebab. Dimana penyebab tersebut menjadi daya gerak dari proses perubahan dalam suatu masyarakat yang datang dari dua sumber (dari dalam dan dari luar), demikian disampaikan oleh Raymond Firth. Yang menjadi stimulus dari dalam adalah daya gerak yang berwujud gagasan, ide-ide atau keyakinan-keyakinan dan hasil-hasil budaya yang berupa fisik. Dan Alvin L. Berthman berpendapat bahwa awal dari perubahan itu adalah komunikasi, maka proses dengan mana informasi disampaikan dari individu satu kepada individu yang lain. Maka yang dikomunikasikan itu tidak lain adalah gagasan, ide-ide, keyakinan maupun hasil budaya yang berupa fisik. Sedangkan stimulan yang datang dari luar, lebih dikarenakan pada perubahan didalam lingkungan pergaulan itu sendiri dan untuk sebagian lagi terletak juga dalam kekuatan melakukan ekspansi terhadap peradaban lain.

Sedangkan Margono Slamet, dalam konsepnya tentang macam kekuatan yang mempengaruhi perubahan, menyatakan terdapat tiga macam kekuatan yang mempengaruhi perubahan, antara lain adalah kekuatan pendorong (*motivational forces*), kekuatan mana yang terdapat dalam masyarakat dan bersifat mendorong orang-orang untuk berubah. Hal ini dinilai sebagai kondisi atau keadaan yang penting sekali, oleh karena itu tanpa adanya kekuatan tersebut orang akan mempunyai keengganan untuk berubah. Kekuatan itu berasal dari segala aspek situasi yang merangsang kemauan untuk melakukan perubahan dan kekuatan tersebut bersumber dari :

- ☞ Ketidak puasan terhadap situasi yang ada, karena itu ada keinginan untuk mendapatkan situasi yang lain.
- ☞ Adanya pengetahuan tentang perbedaan antara yang ada dan yang seharusnya bisa ada.
- ☞ Adanya tekanan dari luar seperti kompetisi atau keharusan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar.
- ☞ Kebutuhan dari dalam masyarakat untuk mencapai efisiensi dan peningkatan, misalnya produktivitas (Soleman b Taneko, *Ibid* : 135-138).

Artinya faktor pendorong perubahan dalam masyarakat bisa ada dan didatangkan ataupun perubahan itu merupakan keniscayaan di dalam masyarakat. Pada kondisi yang terakhir, biasanya berangkat dari situasi dalam masyarakat sendiri yang menghasilkan ketidakpuasan terhadap keadaan yang sekarang, yang dise-

babkan oleh nilai-nilai, norma-norma sosial, pengetahuan dan teknologi yang sekarang ada dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan bermasyarakat atau karena dianggap tidak mampu memenuhi berbagai kepentingan yang semakin kompleks dan serba tak terbatas. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat cepat atau lambat akan berubah lewat berbagai upayanya untuk mencari formulasi baru terkait dengan berbagai kebutuhan baru yang ada. Apalagi didukung dengan fakta dimana lingkungan di dalam masyarakat menemukan berbagai metode dan teknologi atau sarana baru yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang. Berbagai hal yang sifatnya baru pada akhirnya menjadi penyebab terganggunya keseimbangan atau tidak adanya sinkronisasi. Terganggunya keseimbangan dengan sendirinya akan mengakibatkan terjadinya ketegangan dalam tubuh masyarakat.

Secara umum, ketegangan-ketegangan yang terjadi didalam tubuh masyarakat lebih dikarenakan dialektika antara penemuan baru (*invention*) dengan pertumbuhan penduduk (*population*) dan kebudayaan (*culture*). Dimana faktor penemuan baru adalah hasil gagasan baru yang merupakan rangkaian penciptaan individu-individu dalam masyarakat dengan bersandar pada tujuan dan kehendak tertentu. Sedangkan penemuan-penemuan baru merupakan hasil ciptaan dari sebuah proses sebelumnya yaitu penemuan dari suatu unsur yang baru, yang diciptakan oleh individu-individu dalam masyarakat (*discovery*). Dalam hal ini, bisa dalam bentuk apapun temuan tersebut. Entah dalam bentuk

immaterial semisal pola ekonomi baru, nilai-nilai keseharian yang dihasilkan dari sebuah proses interaksi dengan budaya lain atau karakter-karakter budaya yang berbeda dengan karakter budaya pada waktu sebelum terjadi perubahan atau bentuk-bentuk material yang termanifestasikan dalam bentuk-bentuk kebendaan, yang akan terkait dengan nilai gunanya dalam kehidupan dalam masyarakat. Dan beberapa faktor pendorong terhadap individu dalam usaha mencari penemuan baru yaitu :

- ☞ Kesadaran dari orang perorangan akan kekurangan dalam kebudayaannya.
- ☞ Kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan.
- ☞ Adanya perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat.

Sedangkan perubahan masyarakat yang disebabkan oleh faktor pertumbuhan penduduk yaitu perubahan masyarakat yang disebabkan oleh pertumbuhan dan berkurangnya penduduk daerah tertentu. Pertumbuhan penduduk tersebut bisa disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang membuat suatu wilayah mempunyai daya tarik baik secara ekonomis ataupun secara geografis dan itu akan berdampak pada masuknya individu-individu ke dalam suatu lingkup masyarakat yang telah mempunyai suatu karakter kebudayaan tertentu. Konsekuensinya adalah adanya proses tarik ulur antar karakter kebudayaan pada individu-individu dalam suatu masyarakat akan berdampak pada semakin kompleknya masyarakat tersebut dengan berbagai latar belakang sosial dan budaya yang berbe-

da-beda dan itu berarti akan merubah masyarakat pada perilaku dan pola hubungan sosial yang semakin individualis. Atau tarik ulur tersebut akan berdampak pada berkembang peta wilayah pendapatan pada struktur ekonomi baik itu ruang lingkup kerja, standart hidup hingga terseleksinya individu-individu ke dalam tingkatan-tingkatan kerja sesuai dengan kapasitas mereka. Dan perubahan itu pada akhirnya akan mampu meluas ke berbagai fragmen di dalam masyarakat, entah kaitannya dengan fragmen hukum, sosial ataupun politik. Selain perubahan yang diakibatkan oleh pertumbuhan masyarakat, faktor kebudayaan pada masyarakat secara timbal balik akan dapat mendorong perubahan pada bentuk dan hubungan sosial-kemasyarakatannya. Dimana karakter kebudayaan yang beraneka ragam akan saling berusaha untuk menunjukkan kemampuannya dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Kecendrungan untuk saling mempengaruhi dan saling terbuka atau sebaliknya saling menolak.

e. Tipe-tipe Perubahan

Yang terakhir, berkaitan dengan kajian tentang perubahan sosial adalah tipe-tipe perubahan. Namun penting untuk diketahui dan ditekankan bahwa studi mengenai perubahan fungsi sosial dalam satuan sosio-budaya yang dihayati suatu satuan sosial atau masyarakat, tidak bisa mengabaikan kenyataan tentang perubahan pada dimensi struktur masyarakat yang bersangkutan karena masyarakat menjalankan fungsinya selalu dalam struktur yang dibuatnya atau dalam struktur yang sudah ada. Sekalipun struktur sosial memiliki

aspek yang statis, hendaknya struktur itu tidak digambarkan sebagai sesuatu yang kaku. Struktur sosial merupakan suatu komposisi dari semua unsur kemasyarakatan yang dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga seluruh unsur dapat menjalankan fungsi yang telah ditentukan dan menghasilkan jasa yang diinginkan. Unsur-unsur tersebut adalah sistem penempatan warga masyarakat menurut status sosial dan peranannya yang sesuai, pola-pola kelakuan sosial, sistem nilai budaya yang menuntut jenjang hirarki nilai yang berlaku bagi satuan budaya itu. Namun pada dasarnya berbagai tuntutan tersebut akan diusahakan untuk selalu berjalan relatif tetap dan berbagai perubahan yang menimpa berbagai unsur yang ada di dalam struktur atau perubahan yang menimpa struktur itu sendiri merupakan konsekuensi logis takkala asumsi dasar kita adalah adanya individu-individu yang dinamis, yang dibingkai dalam masyarakat. Berbagai perubahan itu biasanya meliputi, perubahan struktural dimana perubahan ini meliputi bergesernya cara pandang individu terhadap struktur yang ada di dalam masyarakatnya atau memang menurunnya kemampuan struktur untuk mempertahankan berbagai nilai gunanya pada masa silam karena harus dihadapkan pada dinamika tuntutan dan dinamika masyarakat. Kemudian yang kedua, perubahan pada pola-pola kelakuan. Ketika struktur mengalami pergeseran maka berbagai bentuk aktivitas yang menyertainyapun mengalami perubahan yang sesuai dengan berbagai kelakuan yang baru dan relevan dengan perubahan yang terjadi. Lalu perubahan itu juga akan menimpa nilai-nilai sosial yang

berlaku di dalam masyarakat. Struktur, pola kelakuan dan nilai adalah unsur yang mutlak ada dalam bingkai suatu masyarakat. Dan dinamika yang dialami oleh nilai-nilai sosial juga akan menghasilkan pola kelakuan yang berbeda dan pada akhirnya dinamika itu akan mampu mendinamisir struktur yang ada, selama struktur itu tidak mampu mengadopsi berbagai hal yang dinamis itu (Hendropuspito, *Op. Cit.* : 257-262).

Lain dengan paparan di atas, Astrid Susanto melihat jenis perubahan sosial dalam tiga tampilan, yang berupa evolusi sosial, mobilitas sosial dan revolusi sosial. Yang pertama, yaitu evolusi sosial merupakan perkembangan gradual karena adanya kerjasama harmonis antar manusia dengan lingkungannya, dalam bentuk evolusi kosmis, evolusi organis dan evolusi mental, dimana yang terakhir ini merupakan akibat dari adanya perubahan teknologi (*technical change*) dan perubahan kebudayaan (*cultural change*). Masing-masing perubahan mempunyai kecepatannya masing-masing karena adanya interdependensi dan relasi antara bagian-bagian yang berubah dengan yang tidak berubah. Maka yang akan terjadi kemudian adalah kemampuan masing-masing kelompok apabila terjadi perubahan yang sama cepatnya. Artinya, kita akan menyinggung kemampuan masyarakat dalam mengelaborasi perubahan tersebut dalam sistemnya (*adaptif*) atau kemudian melakukan penolakan terhadap perubahan yang sedang berjalan (*non adaptif*) dan kemampuan untuk mengadaptasi perubahan tersebut tergantung pada elemen-elemen tertentu, yang terdapat di dalam masyarakat. Oleh Bogardus ditegaskan bahwa kemampuan tersebut dicapai melalui :

- 1) Perubahan dari teknologi yang ada dan punya nilai guna dalam masyarakat.
- 2) Pengisian waktu luang yang dilakukan oleh individu-individu.
- 3) Derajat pendidikan yang diperoleh anggota-anggota masyarakat.
- 4) Aktivitas dalam masyarakat.
- 5) Suasana rumah tangga.
- 6) Agama.

Kemudian yang kedua, mobilitas sosial yang didefinisikan sebagai penyesuaian diri dengan keadaan karena adanya dorongan oleh keinginan manusia akan hidup dalam keadaan yang lebih baik, serta pemanfaatan dari penemuan-penemuan baru dan pada umumnya gerakan sosial terbentuk apabila ada konsep yang jelas apalagi apabila konsep itu tidak mempunyai strategi yang jelas pula. Hal itu akan sangat terasa pada prosesi mobilitas yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan membawa implikasi pada perubahan kepribadian di tingkat individu yang terlalu parah, ketidakstabilan dalam masyarakat, adanya lebih banyak rangsangan dari pada perubahan yang nyata dan itu lebih disebabkan oleh perubahan yang hanya menjadi slogan atau rangsangan yang tidak diwujudkan. Dan mobilitas sendiri, banyak terjadi bila hambatan-hambatan dalam perkembangan atau apabila evolusi mengalami kegagalan. Hal mana yang disebabkan oleh tindakan-tindakan dalam bidang autokrasi, adanya terlalu banyak kepentingan kelompok/individu, adanya kelompok-kelompok yang hendak mempertahankan status ekonomi atau politiknya.

Lalu revolusi yang senantiasa ditandai dengan adanya teror atau aktivitas fisik, yang tentunya didahului oleh ketidakpuasan dari golongan-golongan tertentu, yang mana hal itu terjadi setelah didahului oleh tersebarnya ide-ide baru dalam masyarakat. Dilihat dari segi sosialnya, suatu revolusi pecah apabila dalam suatu masyarakat faktor disorganisasi lebih besar daripada faktor reorganisasi atau apabila faktor-faktor adaptif lebih kecil daripada faktor nonadaptif. Dan biasanya revolusi sosial terjadi apabila terdapat suatu kegagalan dalam proses evolusi, dimana tahapan puncak revolusi selalu berangkat dari adanya kebutuhan akan harapan-harapan yang berubah namun dirasakan tidak mungkin untuk diwujudkan. Namun sebelum revolusi terjadi, akan terdapat beberapa gejala yang dipakai indikator untuk melihat kemungkinan terjadinya revolusi. Indikator tersebut antara lain, berupa frustrasi sosial, peningkatan aktivitas politik (praktis) dan terjadinya instabilitas politik. Frustrasi sosial sendiri terjadi apabila dinamika ekonomi sekaligus tidak berarti mobilitas sosial atau bahkan bila harapan akan terjadinya mobilitas sosial lebih tinggi dari pada hasil pembangunan ekonomi. Selanjutnya terjadi fase peningkatan praktek politik sebagai wujud aktualisasi keinginan untuk memperbesar ruang-ruang mobilitas sosial yang telah tertutup dan pada akhirnya akan terjadi partisipasi politik praktis yang tak terkendali dimana hal ini terjadi lebih karena dikonstruksi oleh ketiadaan upaya-upaya untuk melembagakan kegiatan-kegiatan politik tersebut (Astrid Susanto, *Op. Cit.* : 170-177).

## 2. Studi Transisi Masyarakat

Layaknya siklus, peradaban manusiapun mengalami hal yang sama. Karakter kebudayaan yang sedang terbangun bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya secara otomatis. Namun, karakter kebudayaan selalu mempunyai relasi dengan karakter kebudayaan yang lain, bisa dengan budaya yang sebelumnya ada ataupun sebagai sebuah hasil dari interaksi dengan budaya yang lain.

### a. Studi Perubahan Dalam Budaya

Masyarakat dalam kajian sosiologi mendapat porsi yang besar karena dalam masyarakatlah individu-individu bersama-sama menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Dan didalam masyarakat kebudayaan akan dikonstruksi secara terus menerus, dengan tetap mencari relevansinya dengan berbagai kebutuhan yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Gambaran tentang arti pentingnya kebudayaan dalam masyarakat ditegaskan oleh Melville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski yang merumuskan pengertian '*cultural determinism*', yang berarti bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dan perlu diketahui bahwa pemaknaan terhadap kebudayaan juga penuh dengan berbagai bentuk sehingga sukar untuk mendapatkan pembatasan akan pengertian atau definisi yang tegas tentang kebudayaan. Sedangkan oleh E. B. Taylor kebudayaan dianggap sebagai kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hu-

kum, adat istiadat dan kebiasaan yang didapatkan oleh individu sebagai anggota masyarakat. Artinya, kebudayaan mencakup keseluruhan dari apa-apa yang didapatkan dan dipelajari oleh individu dalam masyarakat.

Kebudayaan itu sendiri pada dasarnya sama, karena diletakkan diatas unsur-unsur pokok dari kebudayaan yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga dan sistem politik. Malinowski bahkan menambahkan unsur-unsur pokok dalam setiap keadaan, yang berupa:

- ☞ Sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat agar masyarakat menguasai alam sekelilingnya.
- ☞ Organisasi ekonomi.
- ☞ Alat-alat dan lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan, dimana lembaga keluarga menjadi salah satu yang utama.
- ☞ Organisasi kekuasaan.

Sedangkan Kluckhohn menambahi konsepsi kebudayaan dengan mengajukan kajian tentang *Universal Categories of Culture* sebagai unsur kebudayaan yang mutlak ada pada setiap bingkai kebudayaan masyarakat. Tujuh unsur kebudayaan yang ada dan dianggap sebagai *Cultural Universal*, yaitu :

- ☞ Peralatan dan perlengkapan hidup manusia
- ☞ Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi
- ☞ Sistem kemasyarakatan
- ☞ Bahasa
- ☞ Kesenian
- ☞ Sistem pengetahuan
- ☞ Sistem kepercayaan

Unsur-unsur tersebut akan tetap ada dan dipertahankan oleh masyarakat sejauh masing-masing unsur tersebut masih mempunyai kegunaan bagi masyarakat. Sejalan unsur-unsur tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang ada dan berkembang didalam masyarakat maka unsur tersebut akan relevan dan tak tergantikan. Namun apabila kemampuan unsur-unsur tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, secara otomatis sistem yang ada dalam masyarakat akan memproduksi berbagai hal untuk sesegera mungkin memenuhi kebutuhan yang ada. Karena di situlah penjelasan akan nilai guna kebudayaan terasa bagi individu-individu yang memilikinya (Soerjono Soekanto, 1986 : 153-167). Dari penjelasan itu digambarkan bagaimana setiap masyarakat akan mempunyai identitas kebudayaannya. Disetiap sistem yang universal itu, masing-masing kebudayaan akan mempunyai bentuk yang sesuai dengan karakter masyarakat sehingga akan didapatkan sebuah kejelasan bahwa pada setiap masyarakat (pada kurun waktu tertentu) akan melahirkan berbagai bentuk kebudayaan yang berbeda-beda. Karena tiap bingkai masyarakat akan mempunyai kerangka nilai yang berbeda, oleh sebab yang berbeda pula.

b. Studi Perubahan Dalam Sejarah

Dalam perspektif historis dijelaskan bahwa pada abad 14 ketika pertama kalinya para pedagang dari India masuk ke Indonesia untuk berdagang, mereka memulainya dari daerah pesisir pantai utara. Dari situ kemudian sejarah kita berangkat untuk mengkonteks-kannya dengan kondisi ke-Islaman yang mulai merebak ke berbagai belahan wilayah di Indonesia (sejarah

Indonesia modern). Kondisi yang kemudian terbangun adalah membesarnya ruang kultural religius dan juga ruang-ruang politis yang juga tercipta ketika momentum ini dimulai. Implikasi yang paling nampak adalah terintegrasinya masyarakat daerah pesisir pantai di belahan utara dengan berbagai pihak yang menjadi aktor dalam perdagangan internasional, sehingga mampu memberi basis kelembagaan pada konteks kultural masyarakat yang ada di daerah tersebut. Fenomena berdirinya kerajaan Demak pada abad 15 adalah gambaran yang maksimal tentang pola integrated-nya berbagai kondisi politis, ekonomis, religius dalam sebuah wadah. Pasca keberadaan kerajaan Demak berdiri kemudian membangun kekuatan dengan mengkonsolidasi kekuataannya sehingga mampu menundukkan berbagai kota besar yang ada di beberapa daerah pesisir utara dan wilayah pedalaman di Jawa timur seperti Tuban, Madiun, Pasuruan, Malang hingga Kediri. Dengan pengembangan yang di dukung dengan keberadaan kerajaan Islam yang lain seperti Cirebon dan Banten.

Namun, kondisi itu tidak bertahan lama, terutama pada saat memasuki awal abad ke-16, saat ketika pertama kalinya kekuatan Barat memasuki Asia Tenggara. Dan kelak moment ini menjadi awal terbentuknya sejarah baru di Indonesia. Pada saat itu, ekspansi merkantilisme Eropa dengan daya dukung kekuatan militer mampu menghancurkan kemapanan sistem perdagangan yang telah mapan di Asia Tenggara untuk kemudian memasuki masa-masa kolonialisme. Hal itu terjadi ketika Demak mulai tergerogoti oleh keberadaan Portugis (di satu sisi) yang telah menghancurkan kekuatan

kerajaan Malaka (yang menjadi payung bagi eksistensi Demak) secara otomatis pula mengurangi kemampuan cengkaman kerajaan Demak ke wilayah-wilayah yang telah dikuasainya. Hal ini dijadikan investasi bagi kekuatan yang telah ter-reduksi sebelumnya yaitu kekuatan Hindu-Jawa. Kekuatan *renaisans* Jawa ini, kemudian melakukan konsolidasinya di wilayah pedalaman Jawa yang cenderung jauh dari konsentrasi kerajaan Demak pada saat masih tegak. Keinginan dari kekuatan Hindu Jawa yang ingin menegakkan kembali keberadaannya di Jawa, menjadi ancaman bagi keberadaan Demak yang sudah diancam juga oleh kekuatan Portugis, yang sebelumnya telah menguasai wilayah perairan di pesisir utara. Di sinilah (akhir abad 16) Demak mengalami kemundurannya, ketika momentum historis yang menggiring kekuatan Demak (Islam) menghadapi kekuatan eksternal yaitu ekspansi kapitalisme barat dan secara internal menghadapi kekuatan internal yaitu kebangkitan kekuatan ideologi pribumi (feodalisme). Konfigurasi dua kekuatan ini kemudian menjadi latar belakang sejarah kebangsaan kita sepanjang abad ke 17 hingga 19 dan ber-efek pada perubahan karakter masyarakat, yang berawal dari etos pedagang yang mobil, kosmopolit, bercorak urban berganti menjadi mentalitas petani yang statis, localised, dan agraris. Secara sosial, proses '*peasantization*' dan '*ruralisation*' berakses luar biasa pada kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Pasca kehancuran Demak yang diakhiri dengan kekalahan Demak oleh kekuatan Pajang, yang kemudian menegakkan kekuatannya di Jawa pedalaman dan kemudian melahirkan kekuatan baru pula di daerah Jawa

pedalaman ini, yaitu Mataram yang kelak kemudian (kekuatan Mataram ini), mampu menjadi kekuatan baru yang ada di Jawa (Kuntowijoyo, 1998 : 22-30).

Hampir sama dengan penjelasan diatas D.H. Burger (1960 : 86-104), menggambarkan bagaimana Jawa dengan bingkai kebudayaannya dihadapkan pada tantangan akan perubahan. Dimana Jawa, pada masa-masa sebelumnya telah dihantam gelombang perubahan yang pertama yaitu Hindu, yang mampu membangun peradabannya selama hampir 500 tahun lebih sekaligus mampu memapankan strukturnya dalam masyarakat lewat otoritas kekuasaannya. Namun selepas Hindu mulai mengalami krisis, dengan ditandai oleh berbagai konflik dan kekalahan yang dialami oleh Majapahit (sebagai wakil terakhir kekuasaan Hindu dalam bentuk kekuasaan), masyarakat Jawa kemudian dihadapkan pada kedatangan Islam yang sekali lagi tidak mampu bertahan lama karena gelombang perubahan yang ketiga di Jawa mulai mendekat kepulauan Jawa, ketika Islam sedang jaya-jayanya di Jawa. Mereka adalah ekspansionisme Eropa, yang pada akhirnya mengembalikan karakter kebudayaan Jawa pada karakter perfeodalan baru (tinggalan Hindu-Jawa) yang telah dielaborasikan dengan kebudayaan Islam.

Dalam karakter kehidupan masyarakat Jawa sendiri, yang paling menonjol adalah bentuk keber-agamaan mereka. Dimana kesadaran akan nilai-nilai teologis merupakan puncak dari semua kerangka nilai yang mereka sepakati. Ditegaskan oleh P.J. Zoetmulder, bahwa konstruksi filsafat hidup orang Jawa terbentuk dari perkembangan kebudayaan Jawa yang telah dipengaruhi

oleh filsafat Hindu dan Islam. Sekalipun kerangka nilai yang dibangun dalam masyarakat Jawa tradisional, kepercayaan Hindu dan ajaran tasawuf Islam namun tradisi yang paling dominan adalah nilai-nilai Islam yang telah mengalami banyak proses adaptasi dengan karakter Jawa tradisional. Hal ini terasa masuk akal, karena otoritas tradisional yang besar dan terakhir berkuasa sebelum Mataram adalah kerajaan Islam-Jawa yaitu Demak. Fakta dari berbagai naskah klasik Jawa yang menggambarkan konsepsi masyarakat tentang bangunan kehidupannya, entah dalam bentuk karya-karya sastra seperti *Serat Centini* yang menggambarkan riwayat hidup ulama yang merupakan keturunan wali atau *Serat Sasangka Djati* yang mengajarkan tentang delapan sikap dasar yang mesti dimiliki oleh setiap individu dan diawali dari nilai-nilai teologis. Atau penokohan wayang seperti halnya *Wrekudara Kalenggahan Sang Hyang Tunggal*, yang menceritakan konsepsi tasawuf keIslaman lewat media-media peninggalan Hindu-Jawa (Budiono Herusatoto, 2000 : 61-86). Dan penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh masyarakat Jawa (setidaknya pada abad 16) berpusat pada persoalan yang berhubungan dengan teologi, ritual dan hubungan politik antara bentuk-bentuk mistik dan kesalehan Islam yang normatif dilapangan kehidupan sehari-hari. Proses inipun memunculkan banyak variasi dalam tipe-tipe Islam lokal Jawa (Mark Woodward, 1999 : 79-88).

Tapi oleh Woodward ditegaskan tentang proses transisi dan konversi penduduk Jawa ke Islam lebih bersifat gradual, tak merata dan berlangsung terus menerus hingga kini. Karena fakta bahwa Islam, datang

ke Jawa bermula dari proses berdagang di lautan India. Dari situ potret sejarah Islam-Jawa bukan hanya proses konversi budaya saja namun penegasan Islam (pada akhirnya) sebagai agama kerajaan merupakan suatu proses tersendiri, yang banyak mengakibatkan hancurnya budaya Hindu-Budha. Dan terbentuklah konstruksi baru, dimana ulama mensubordinasi kekuasaan dan keraton. Dalam perkembangannya masyarakat Jawa kemudian sangat berorientasi pada ulama dalam pengertian status sosial yang tinggi, karena sebagian besar mereka berasal dari proses afiliasi dengan keturunan guru-guru muslim. Bahkan ulama pada masa sebelum bangkitnya Mataram, yaitu di Demak, mereka mempunyai otoritas yang tinggi. Para ulama ada pada posisi untuk mengangkat raja-raja di kerajaan Islam di Jawa sampai pada menentukan garis besar pemerintah dan di zaman Mataram-pun tidak jauh berbeda, peran para ulama tersebut (A. Adaby Darban, 1991 : 343-350). Dan di jelaskan juga tentang arti dan peran ulama dalam masyarakat Jawa, yang terbagi menjadi ulama yang merangkap penguasa, ulama keturunan bangsawan, ulama yang menjadi alat birokrasi (abdi dalem pame-takan, abdi dalem kaji dll) dan golongan ulama yang tinggal di pedesaan. Namun, ikatan keagamaan, ke-ilmuan dan pertalian darah pada akhirnya menyuburkan perkembangan Islam di Jawa sekaligus merupakan bagian dari usaha mereka untuk tetap mempertahankan status sosial mereka dengan segala keistimewaan yang menyertainya. Jadi bentuk nilai-nilai yang dijadikan standart untuk hukum yang mengatur semua aktivitas sosial hingga budaya, ditetapkan oleh bangsawan

(sebagai pewaris Hindu-Jawa) disandarkan pada para ulama (Zaini Muhtaram, 1998 : 24), bahkan relasi dan bentuk sinkreteisme Islam di Jawa sampai pada upaya pemitosan yang menempatkan Islam dan Hindu di Jawa pada konstruksi yang saling kait mengkait (Heddy Sri Ahimsa, 2000 : 349-386).

Selepas abad pertengahan (pasca Islam di Jawa) sebenarnya hampir seluruh Asia juga mengalami pergeseran kebudayaan, dimana mereka sebelumnya berada di bawah otoritas kekuasaan feodal dari Turki ke peradaban baru yang dikembangkan oleh merkantilisme Eropa. Dan dalam masa itu Jawapun mulai kehilangan orientasi perekonomiannya di laut dan bergeser kembali ke daratan. Kemunduran perdagangan laut di Asia mengakibatkan juga melemahnya peradaban kota dan peradaban pantai yang individualis dan menyebabkan berkembangnya peradaban feodal yang kontinental. Semua perdagangan yang pernah ada di laut lenyap dan Jawa mulai memasuki kebudayaan yang tertutup dan memisahkan diri (*isolement*) yang ekstrim. Pemisahan ini menjadi lahan subur bagi perkembangan feodalisme baru (Hindu-Jawa-Islam) yang aristokratis. Kebudayaan yang berat sebelah ini hanya berdasarkan pada berbagai tradisi kebangsawanan yang senantiasa berkembang namun tidak diiringi dengan tradisi ekonomi yang sebelumnya ada, sebagai akibat pengaruh dari luar lewat berbagai pola interaksi dengan perdagangan laut sebagai pintu gerbangnya.

Kebudayaan Jawa pada saat itu merupakan 'kebudayaan pahlawan' yang berarti bahwa setiap cita-cita hidup pada masa itu terdiri dari cita-cita atau nilai hi-

dup kemuliaan kaum bangsawan. Atau dengan penjelasan lain dari kebudayaan ini adalah kebudayaan yang menjunjung tinggi bentuk hidup kaum bangsawan. Cara hidup ini berakar dari kekayaan kebudayaan, yang terkandung dalam kesusasteraan klasik dan wayang, yang merupakan warisan kebudayaan Jawa kuno yang dipengaruhi oleh Hindu dan Islam. Pengetahuan akan kesusasteraan Jawa dan wayang merupakan hal yang penting karena dari situlah media sosialisasi nilai sekaligus proses edukasi diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam sastra dan wayang, nilai-nilai hidup lama ditransformasikan kepada segenap masyarakat untuk dijadikan pegangan hidup, pandangan dunia dan pandangan untuk hidup, karena nilai-nilai yang ada bertujuan untuk membentuk sifat dan peradaban baru agar terbangun kepribadian-kepribadian yang sempurna. Seluruh kebudayaan yang terkandung dalam sastra dan wayang di Jawa, digunakan masyarakat agar mampu mengkonstruksi keharmonisan dalam hubungannya dengan sesama dan alam sekitarnya.

Sebenarnya zaman feodal yang tulen telah tumbuh sejak abad 13 seiring dengan perkembangan periode Raja-Kota, dimana kekuasaan dibangun diatas kekayaan dalam bentuk materi atau berupa tindakan-tindakan yang mampu menunjukkan eksistensi diri sebagai seseorang yang memegang otoritas tinggi dalam masyarakat. Efek lain dari perkembangan kebudayaan seperti ini adalah cara hidup yang lebih memberi penekanan pada memperindah kehidupan kebangsawannya dengan romantisme masa lalu lewat berbagai

tradisi ritual kehidupan yang dihiasi dengan berbagai keindahan dan kemuliaan. Mereka membangun kebudayaannya dengan berpaling dari dunia luar, membalik kedalam dan semata-mata hanya mempertinggi dan memperluas kehidupan kraton. Dan semua karakter kebudayaan itu mampu menjalin masyarakat dengan bangsawannya tanpa harus menafikkan konsepsi mereka tentang alam. Semuanya terangkai dalam kebudayaan yang menjadi corak hidup seluruh kaum bangsawan sekaligus memberi arah kepada seluruh masyarakat Jawa karena kaum bangsawan ternyata juga mampu mengkonstruksi diri mereka untuk dijadikan panutan. Sehingga segala bentuk kepatuhan masyarakat adalah bentuk-bentuk ritual kehidupan yang mempunyai makna sakral dan suci.

Masih dalam kerangka kebudayaan tersebut, bahasa Jawapun mengalami pergeseran dari bahasa yang sederhana dengan bentuk hubungan tinggi-rendah, sedikit dalam bentuk dan pilihan kata, dalam prakteknya pun tidak mempunyai kemutlakan karena memang kerangka feodalisme sebelumnya jauh lebih sederhana sehingga derajat kebangsawaanan tidaklah begitu luas. Hal itu minimal akan tampak dalam bahasa yang tidak menekankan keteraturan, kurang maju dan tidak memberi prioritas pada sisi keindahan. Namun selepas bangunan feodalisme lama tumbang dan karakter kebangsawanan baru, tumbuh seiring dengan tidak tumbuhnya kelas menengah sebagai kelas pedagang dan penyeimbang ini, merubah bahasa Jawa ke dalam berbagai macam bentuk, perbedaan dalam kata-kata dengan berbagai sinonim yang halus dan penuh ke-

hormatan. Dari sinilah kesusasteraan Jawa baru dideklarasikan sebagai efek dari kebudayaan Hindu yang telah lama tumbang dan sisa-sisa kekuatan Islam yang masih memberi pengaruhnya untuk kemudian menegakkan keberadaan feodalisme baru. Di samping itu terdapat juga perangkat kebudayaan lain seperti wayang yang mengalami kemajuan dengan pesat, seni batik ataupun kerajinan tangan yang semuanya mempunyai aspek memuliakan kaum bangsawan atau semangat sopan santun dalam kehidupan masyarakat yang terdeferensiasi ke dalam struktur yang feodal, yang penuh dengan rasa keterikatan dari sejarah, tradisi, nilai-nilai keagamaan. Hal itu tergambar dari adat-istiadat yang ada dan dijadikan referensi sekaligus tolak ukur perilaku masyarakat dalam kesehariannya (Budiono Herusatoto, *Op. Cit.* : 38-39).

Namun, hubungan yang harmonis antara Islam dan otoritas tradisional tidaklah eksis dalam waktu yang relatif lama, apalagi kaum kolonial yang pada akhirnya menempatkan karakter tradisional sebagai faktor dominan untuk melakukan mediasi terhadap kekuatan Islam yang telah mapan dan bergerak pada karakter Islam yang progresif. Akhirnya, formasi sosial kembali berubah menjadi Jawa-Islam dengan kaum kolonial yang telah beradaptasi dengan Jawa, tentunya tetap dalam ketidakseimbangan hubungan antar kebudayaan tersebut. Selepas kedatangan kaum kolonial yang mampu merubah orientasi kebudayaan di istana menjadi sekedar mengungkapkan etos kebangsawanan yang semakin tidak relevan dengan masa damai, tetapi juga etos yang ikut menyenangkan dan berfaedah bagi

kaum kolonial. Karena memang menjadi agenda bagi mereka untuk memanfaatkan penguasa tradisional, bagi kepentingan otoritas mereka agar tetap eksis di Jawa (Riklefs, 1998 : 193-199). Pada saat itu kaum kolonial mencoba meliberalkan politiknya dalam masyarakat dengan meminimalisir peran bangsawan keraton (lewat penghapusan berbagai simbol elit feodal) sekaligus menanamkan semangat baru bagi generasi muda di Jawa. Salah satunya lewat pendidikan, yang berakibat pada terbukanya peluang untuk mengalami mobilitas struktural. Semisal peran Bupati sebagai media kolonial (terkait dengan administrasi modern) untuk tetap menjaga jarak dengan kaum feodal pada akhirnya menempatkan para Bupati tersebut pada posisi kaum feodal baru. Kaum terdidik itu pada akhirnya mampu menjadi priyayi-priyayi baru, yang mereka dapatkan karena kemampuan mereka secara pribadi dalam dunia akademis. Dan merekalah yang kemudian menjadi tulang punggung bagi kaum kolonial dari Belanda hingga Jepang. Mereka sangat signifikan terhadap dalam proses administrasi modern kaum kolonial untuk tetap menjalankan roda pemerintahan kolonial di nusantara. Pada saat yang sama, kaum bangsawan yang mendapatkan otoritasnya lewat keturunan mengalami degradasi peran luar biasa oleh sebab kebijakan kaum kolonial tersebut. Kekuasaan, prestise dan kepercayaan diri kaum elit bangsawan mencapai titik yang terendah bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Oleh Sartono Kartodirjo (Hans Antlov, 2001 : 30-45) ditambahkan beberapa penyebab terjadinya perubahan di Jawa, terutama berkaitan dengan mundur-

nya aristokrasi adalah dengan maraknya kaum kolonial membangun sistem ekonomi baru yaitu agro-industri yang diikuti oleh perkembangan komunikasi, transportasi dan pendidikan, yang secara otomatis merubah juga karakter masyarakatnya (dari masyarakat agraris menjadi masyarakat semi industri) yang juga diikuti dengan munculnya ekonomi pasar, yang sejalan dengan lahirnya re-stratifikasi dengan munculnya kelas-kelas baru yaitu kaum terdidik. Dan apa yang terjadi di Jawapun, sebenarnya juga terjadi dibelahan dunia yang lain, dimana proses perubahan masyarakatnya mengambil jalur dari tradisional ke peralihan dan pada akhirnya menuju modernisasi yang kompleks namun dengan skala perubahan yang berbeda-beda. Dengan mengambil indikator modernisasi pada jumlah penduduk, proses urbanisasi, keberhasilan dunia pendidikan modern, media-media komunikasi dan transportasi serta dampaknya secara sosiologis, juga dipaparkan dalam memudarnya masyarakat tradisional : suatu laporan oleh Daniel Lerner (1983 : 60-90).

Munculnya sistem ekonomi baru sebagai akibat dari proses transisional tersebut, berakibat pada semakin tidak kuatnya masyarakat tradisional untuk mempertahankan eksistensi mereka dan bangunan masyarakat baru dan modern (*nation*) makin tak terbendung proses persebarannya, karena generasi baru dari tiap masyarakat akan selalu membutuhkan identitas. Negara-lah struktur modern yang merupakan kunci bagi semua struktur kapitalisme lokal yang mulai melembaga. Dengan negara, masyarakat baru mampu menciptakan perangkat-perangkatnya dan salah satunya adalah

hukum. Dan hukum-lah yang menempatkan negara dalam sebuah prosesi bermasyarakat yang bersifat legal yang berarti awal dari keruntuhan feodalisme dan patrimonialisme. Sistem dalam negara menyediakan perangkat-perangkat modern melalui sistem hukum yang bersifat universal dan rasional. Dan ditambahkan oleh Collin Randall -ketika menjelaskan perspektif Weber tentang kapitalisme dan modernitas- bahwa awal dari proses tersebut adalah terbentuknya kota-kota yang dinamis, modern dan orientasi berpikirnya rasional-ekonomis (Stephen K Sandersons, 2000 : 180-183). Monopoli kaum kolonial dalam sistem ekonomi baru yang mereka kembangkan pada akhirnya menjadi variabel penting dalam mengakselerasi dinamika masyarakat dan pertumbuhan kota-kota baru karena mulai terdesentralisasinya beberapa perangkat agro-industri kolonial. Sistem ini melahirkan perusahaan-perusahaan besar yang mendinamisir pembangunan kota-kota di Jawa, entah dalam bentuk meningkatkan perdagangan dan proses industrialisasi yang berimplikasi juga pada urbanisasi di kota-kota yang mengalami proses tersebut. Oleh Wertheim (*Op. Cit.* : 138-149) proses tersebut, pada tahun-tahun berikutnya melahirkan banyak permasalahan yang mesti ditanggung oleh individu-individu yang ada, baik itu dalam bentuk segregasi, urbanisasi yang berlebihan hingga disintegrasi budaya akibat tidak langsung dari adanya pertukaran barang dan jasa secara besar-besaran di kota. Dalam perspektif sosiologis, aktivitas pertukaran dalam masyarakat bukanlah aktivitas ekonomis belaka namun sebagaimana yang diungkap Granovetter, yaitu aktivitas yang

didalamnya terkandung aktivitas-aktivitas dan nilai-nilai sosial (Robert W Hafner, 1999 : 18).

Terakhir, penting untuk ditambahkan yaitu pemaknaan individu terhadap semua proses transisional masyarakat tersebut, yang mana individu menjadi bagian dari proses yang sedang berjalan. Dan diantara berbagai proses perubahan tersebut (Zdenek Suda, 1989 : 199-225), modernisasi menjadi lokus yang paling dinamis sekaligus memberi dampak paling kompleks bagi individu. Karena modernisasi (dengan relativitas-waktunya) yang dengan-nya berbagai unsur struktur budaya dan sosial, muncul dan lenyap atau diganti oleh unsur-unsur yang lain. Semua fakta tersebut adakalanya ditempatkan pada posisi yang obyektif, karena terkait dengan perubahan yang dialami oleh perangkat-perangkat teknologi atau sosial pada kurun waktu tertentu. Namun adakalanya perubahan juga dilihat sebagai perubahan yang subyektif-relatif, dengan menempatkan individu sebagai aktor yang berhadapan dengan berbagai dinamika teknologi dan perangkat sosial yang ada sekaligus jauh lebih beragam konsekuensinya bagi individu-individu dalam masyarakat.

Dalam penelitian yang mengambil Kauman sebagai lokasi penelitian. Menempatkan Kauman sebagai sebuah kota yang dibangun atas dasar tuntutan sosio-politis masyarakat Jawa pada masa lalu, memberikan berbagai gambaran yang amat banyak terhadap perkembangan kota pada era aristokratis dan feodalisme yang mengalami kemapanannya di Jawa. Keberadaan Kauman sendiri berawal dari konsepsi Paku Buwono II (1757) yang membangun kraton Surakarta di Sala dengan berbagai

perlengkapan yang menyertai keberadaan kraton, seperti masjid Agung, alun-alun ataupun benteng-benteng peperangan. Kauman sendiri masih dalam wilayah *Bumi Pamethakan* (wilayah yang otoritasnya dipegang penuh oleh keraton) sebagai tempat tinggal para abdi dalem yang beragama Islam dan diberi tugas oleh kerajaan untuk mengurus makam-makam yang dihormati, masjid atau tempat-tempat yang dianggap sakral, yang diatur langsung oleh *Reh Pengulon* (administrasi keraton yang mengurus masalah-masalah keagamaan). Kata Kauman sendiri berasal dari kata *Qoum-Muddin* (bhs. Arab) yang berarti penegak agama Islam.

Dalam kerangka inilah Kauman dapat digambarkan sebagai representasi dari terintegrasinya karakter politik tradisional dengan agama dalam sebuah sistem sosial budaya yang khas. Sehingga pemaknaan akan Kauman sebagai masyarakat Islam tradisional diletakkan dalam sebuah bingkai masyarakat yang beragama Islam, yang dipengaruhi oleh otoritas tradisional peninggalan Hindu-Budha dan melahirkan berbagai pola kebudayaan yang mengadopsi nilai-nilai Islam-Hindu-Budha dan dikemas dalam otoritas feodalisme Jawa yaitu kraton Surakarta. Dengan pola pembentukannya yang khas yaitu seleksi atas dasar agama menjadikan perkembangan kota ini linear dengan pola pembentukannya diawal keberadaan Kauman. Kontinuitas ini, menjadi hal yang menarik ketika kita hendak melihatnya pada kerangka perubahan dengan melakukan komparasi antara kondisi awal keberadaan Kauman dengan kondisi kekinian di Kauman karena berbagai agenda modernisasi tersebut.

Agenda modernisasi sendiri ada seiring dengan keberadaan otoritas modern yaitu negara. Keberadaan negara yang mempunyai jaring-jaring kekuasaan pada wilayah yang paling kecil sekalipun, pada akhirnya menghadap-hadapkan antara kraton (sebagai otoritas tradisional) dengan pemerintah daerah (sebagai wakil dari otoritas modern) *vis to vis* dalam ruang-ruang kebudayaan. Agenda pengembangan kota Surakarta yang menempatkan Kauman sebagai bagian dari kota Surakarta yang sedang bergerak ke arah modernisasi, dengan melakukan berbagai perubahan dalam setiap bidang kehidupan memberi dampak tersendiri terhadap Kauman. Perubahan yang dialami oleh Kauman adalah sebuah potret sederhana tentang kecenderungan memudarnya kekuatan tradisi, ketika harus dihadapkan pada gerak perubahan yang sangat dinamis dan perubahan yang terjadi di Kauman tidak bisa lepas dari perubahan yang dialami oleh individu-individu di dalamnya. Perubahan Kauman dalam dimensi ekonomi, budaya, sistem nilai hingga perubahan pada aspek fisik, menyeret individu untuk juga memahami dan mengikuti proses tersebut. Penelitian ini akan melihat prosesi perubahan di Kauman, sejauh yang telah terjadi hingga sekarang dan menyoroti dinamika individu-individu yang ada di dalamnya dalam menghadapi prosesi perubahan tersebut.

Titik tolak dari pembahasan ini adalah tentang pola dan proses perubahan yang menempatkan subyek sebagai pengambil keputusan dalam berbagai interaksi mereka sehari-hari. Pengambilan keputusan merupakan proses memilih suatu rangkaian tindakan dari dua atau

lebih alternatif. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data (akan realitas), penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat dan cepat.

Sesuatu keputusan diambil untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Kiranya telah disadari bahwa pelaksanaan keputusan tidak pernah terjadi dalam suasana kekosongan. Artinya terdapat kekuatan yang selalu mempengaruhi sesuatu keputusan yang diambil. Kekuatan-kekuatan itu adalah:

1) Dinamika individu.

Hal ini berkaitan dengan sikap dan tingkah laku yang dilakukan seseorang dalam keadaan tertentu. Sikap dan tingkah laku ini dapat diketahui dengan terlebih dahulu mengetahui pandangan seseorang tersebut terhadap dirinya sendiri. Pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri biasanya merupakan sintesis dari aspirasi, pendidikan, pengalaman dan penilaian orang-orang sekelingnya kepadanya. Seseorang mengambil keputusan selaku individu untuk melindungi atau memperbesar pandangannya terhadap dirinya.

2) Dinamika lingkungan.

Semua kondisi dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi suatu keputusan termasuk ke dalam kategori lingkungan. Setiap keputusan mempunyai lingkungan sendiri yang khas. Dalam

arti yang sesungguhnya semua keputusan harus taat pada tekanan-tekanan yang bersumber dari lingkungan. Tentunya merupakan suatu harapan pula supaya keputusan yang diambil merubah lingkungannya sebagai sebuah kekuatan yang mempengaruhi proses dan teknik pengambilan keputusan. Lingkungan di sini termasuk kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

Pengambilan keputusan didasarkan kepada satu skala prioritas yang rapi dan berencana, oleh karena itu pada tingkat dan ruang lingkup masing-masing, keputusan-keputusan yang diambil berbeda dalam penting atau tidaknya suatu keputusan ini tidak berdiri sendiri. Keputusan yang penting misalnya, merupakan suatu sumber yang akan menimbulkan reaksi berantai dan akan diikuti oleh keputusan-keputusan lain. Dengan perkataan lain bahwa suatu keputusan hanya merupakan suatu titik dalam mata rantai waktu. Sekali keputusan diambil, segera timbul perubahan dalam lingkungan keputusan tersebut. Hadirnya selalu kekuatan-kekuatan pengubah dalam lingkungan memaksakan adanya usaha yang terus menerus untuk memperbarui keputusan dan tindakan.

Dan ini berarti tindakan mereka mempunyai arti atau bermakna. Konsep tindakan yang bermakna dan penuh arti dapat kita temukan dalam paradigma definisi sosial (*Social Defenition Paradigm*). Dalam paradigma ini terkandung dua konsep dasar yaitu konsep tindakan sosial dan konsep tentang penafsiran atau pemahaman. Tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang

tindakan itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Menurut Weber, tindakan sosial dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, dapat bersifat membatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Untuk mempelajari tindakan sosial adalah dengan metode penafsiran dan pemahaman, yang menurut terminologi Weber adalah *verstehen*, yaitu suatu upaya untuk menginterpretasikan tindakan si aktor dengan memahami motif dari tindakan yang dilakukannya.

Salah satu teori yang sepenuhnya berawal dari karya Weber adalah teori aksi (*action theory*). Asumsi-asumsi fundamental dari teori ini sebagaimana dikemukakan oleh Hinkle dengan merujuk karya Mac Iver, Znaniecki dan Parsons sebagai berikut:

- 1) Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek.
- 2) Sebagai obyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu.
- 3) Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.
- 4) Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya.

5. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan yang telah dilakukannya.
6. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan.
7. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subyektif seperti metode verstehen, imajinasi, sympathetic atau seakan-akan mengalami sendiri (*vicarious experience*).

Menurut Cooley, sesuatu yang mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah apa yang disebutnya sebagai “kesadaran subyektif” dan hal ini merupakan pengakuan terhadap sifat aktif dan kreatif individu. Selain kesadaran subyektif, perasaan-perasaan individual, sentiments dan ide-ide merupakan faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berinisiatif atau mengakhiri tindakannya terhadap orang lain.

Sedangkan menurut Parsons (seorang pengikut Weber yang mengembangkan teori aksi) sejak semula telah menjelaskan bahwa teori aksi tidak dapat menerangkan keseluruhan aspek kehidupan sosial. Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Adanya individu sebagai aktor.
- 2) Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu.
- 3) Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya.

- 4) Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu.
- 5) Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang memengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan (George Ritzer, 1992 : 45-74).

Aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat. Tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih, yang menurut terminologi Parsons disebut "*voluntarism*". Singkatnya voluntarism adalah kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya. Berbagai tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan norma serta situasi penting lainnya kesemuanya membatasi kebebasan aktor. Tetapi disamping itu, aktor adalah manusia yang aktif, kreatif dan evaluatif.

## **F. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-eksploratif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Dimana aspek subyektif dari perilaku obyek akan menjadi

penekanan dalam penggalian informasi yang dibutuhkan. Pemahaman akan dunia konseptual dari obyek akan coba dipahami sedemikian rupa sehingga akan didapatkan berbagai pemahaman atau pengertian yang dikembangkan oleh individu, pada berbagai peristiwa yang mereka hadapi dan pada perilaku yang mereka lakukan. Agenda untuk menangkap proses penafsiran individu atas realitas yang ada disekitarnya akan menjadi alat untuk kemudian menangkap makna dari perilaku individu-individu (Robert Bogdan & Steven Taylor, 1993 : 45).

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kauman, yaitu sebuah kelurahan di kota Surakarta, Jawa Tengah. Alasan utama pemilihan lokasi ini terkait dengan representasi-nya Kauman sebagai wakil dari gambaran peneliti di latar belakang masalah, dimana Kauman (sampai sekarang) masih menjadi bagian dari otoritas keraton Surakarta yang sangat kental dengan berbagai agenda keraton yang bersifat tradisional dan bernuansakan Islam. Di samping juga berbagai agenda yang dilakukan oleh pemerintah kota, yang terus mulai membangun berbagai fasilitas modern disekitar keraton dan Kauman. Sehingga tarik ulur antara bangunan kebudayaan tradisional untuk tetap eksis dengan berbagai aktivitas dan infra struktur modern yang tak terbendung, sangat terasa dampak dan dinamikanya pada dan didalam masyarakat Kauman. Dan studi terhadap Kauman diharapkan mampu memberi penjelasan terhadap perubahan sosial yang ada di kota Surakarta.

### 3. Data dan Tehnik Pengumpulannya

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, berupa data-data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan diperoleh lewat wawancara mendalam dengan informan di lapangan, terutama berkaitan dengan berbagai pemahaman individu (dalam bentuk pengalaman yang bersifat subyektif) terhadap dinamika di sekitarnya. Karena pada unit individulah yang langsung menjadi partisipan dalam masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1991 : 158-172). Dengan masyarakat Kauman yang menjadi populasi secara keseluruhan maka peneliti menggunakan tehnik pengambilan sampel dengan tehnik *purposive*. Tehnik ini digunakan dengan syarat-syarat pengambilan sampel harus didasarkan atas karakteristik sampel tertentu yang memenuhi ciri pokok populasi, subyek yang diambil merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi (*key subject*) sekaligus memberi banyak informasi berkaitan dengan kebutuhan peneliti. Disamping tehnik ini, peneliti juga menggunakan tehnik *snow ball* yaitu dengan menggulirkan sample atas dasar informasi yang telah didapatkan sebelumnya, untuk membangaun kerangka informasi bagi peneliti. Dengan mengkombinasikan dua tehnik pengambilan sampel ini, peneliti berharap dapat menggali informasi berkaitan dengan kebutuhan peneliti secara maksimal. Pada bentuk data ini, peneliti membuat pemetaan informan menjadi, penduduk asli Kauman, pendatang tetap dan pendatang tidak tetap di Kauman. Untuk kemudian dikombinasikan dengan berbagai informasi yang diperoleh dari teks-teks yang ada, yang memberikan gambaran tentang otoritas di Kauman pada masa silam. Dengan format seperti ini, wawancara

sebagai sebuah proses pencarian data dapat diinteraktifkan dan dikonfirmasi satu dengan lainnya (Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 1981 : 145).

Kemudian data sekunder yang peneliti gali dari berbagai tehnik observasi untuk melihat setiap aktivitas individu dan masyarakat Kauman. Sebab setiap aktivitas dalam masyarakat adalah gejala dari eksistensi realitas yang sedang dan terus dikonstruksi oleh individu dalam posisinya sebagai anggota masyarakat. Dan setiap gejala akan punya arti dan bermakna bagi individu (Harsja W Bachtiar, *ibid* Koentjaraningrat, 1991 : 108-128).

Dengan target seperti yang diatas, peneliti telah mengalokasikan waktu untuk mengikuti berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam kesehariannya (dengan *life in*). Karena dengan interaksi yang intensif (*partisipan observation*) antara peneliti dengan masyarakat yang diteliti, diharapkan akan didapati berbagai pemaknaan individu yang bersifat natural (Robert Bogdan & Steven J Taylor, 1993 : 31-34). Di samping juga dari literatur yang berkaitan dengan data-data monografi yang menggambarkan dinamika demografis masyarakat untuk dijadikan data-data pendukung agar memaksimalkan usaha peneliti.

#### 4. Analisis dan Validitas Data

Analisis data pada umumnya, adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian yang bertujuan memberi penjelasan. Dalam bahasa lain, digambarkan sebagai proses yang memerinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis sesuai dengan apa yang digambarkan oleh data yang diperoleh. Dengan tahap ini

data diolah sedemikian rupa dengan tujuan untuk menggambarkan suatu keadaan dengan jelas dan tepat (Lexy Moeloeng, 1999 : 103). Usaha menggambarkan keadaan suatu masyarakat dengan jelas dan tepat, memerlukan tahap-tahap yang harus dilalui, yaitu : mengumpulkan data, menyusunnya ke dalam kategori-kategori dan menyatakan berbagai sifat dari kategori-kategori tersebut. Tentang kategori-kategori dan sifat-sifatnya, maka ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Kategori-kategori dan sifat-sifatnya merupakan dasar utama untuk analisis. Kategori dan sifatnya dipakai untuk menggambarkan dan memberikan batasan pada data. Hubungan antar kategori-kategori dengan berbagai sifat-sifatnya, yang disebut hipotesis, merupakan pedoman atas penelitian berikutnya karena satu kategori menunjukkan kategori yang lain, analisis dari satu kategori mengarah untuk menetapkan kategori yang lain.
- b. Kategori-kategori didasarkan pada data penelitian. Teori dan semua unsur-unsurnya harus muncul dari penelitian, bukan dirumuskan terlebih dahulu sebelumnya. Sehingga seluruh analisis didasarkan pada data penelitian, dan bukan gagasan-gagasan yang ditetapkan sebelumnya.
- c. Pengumpulan data dan analisis data berlangsung pada waktu yang bersamaan. Dengan mengumpulkan data kemudian mengklasifikasikannya, dan yang telah dipelajari sebelumnya langsung merupakan pedoman pada apa yang masih harus dikumpulkan dan pedoman dimana data itu harus dicari. Sehingga pengumpulan data didasarkan pada pengembangan analisis (Lexy Moleong, *Ibid* : 190-196).

Langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis-hipotesis. Hipotesis adalah hubungan-hubungan yang mungkin terjadi diantara kategori-kategori dengan berbagai sifat-sifatnya, yang kesemuanya lahir dari data-data penelitian. Untuk menampakkan suatu kerangka yang menyeluruh maka kategori-kategori dan hipotesis-hipotesis dianalisis lebih mendalam, sehingga akan kelihatan kait mengkait antar kategori-kategori dan hipotesis-hipotesis. Inilah inti yang dikembangkan. Inti ini merupakan pedoman atau kunci pada langkah terakhir dari pengumpulan data, dimana peluang di dalam uraian dan teori mulai dapat diisi (Robert Bodgan & Steven Taylor, *Op. Cit.* : 131-152)

Kemudian untuk memperoleh data yang kredibel dan valid, cara yang ditempuh peneliti adalah dengan melakukan triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain (diluar data itu) untuk keperluan pengecekan atau sekedar pembandingan terhadap data tersebut. Alternatif triangulasi yang mungkin digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah:

1. *Data triangulation*, dimana peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama.
2. *Methodological triangulation* adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.
3. *Theoretical triangulasi* adalah melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisis dengan menggunakan beberapa perspektif teoritis yang berbeda (Lexy Moleong, *Op. Cit.* : 178-179).

Dalam penelitian ini tidak semua cara / macam triangulasi digunakan untuk mencari keabsahan data, semuanya akan mempertimbangkan kebutuhan dilapangan.

#### **H. METODE PENELITIAN**

Pada awal penelitian ini, peneliti melakukan observasi dasar sambil sesekali mewawancarai beberapa orang yang dapat peneliti temui dilapangan. Sambil tetap mengkaji banyak bahan yang terkait dan mendiskusikannya dengan beberapa pihak yang berkompeten dengan lokasi dan tema yang peneliti minati. Hal ini terasa penting, untuk menentukan tema dan arah penelitian ini dirancang. Selepas observasi awal, peneliti mencoba membuat rancangan aktivitas penelitian dilapangan. Dari situ peneliti memulai tahap-tahap penelitian dan tahapan tersebut adalah :

**Pertama** yang peneliti lakukan adalah mencari tempat untuk bisa menetap (*live in*) di lapangan, harapan peneliti adalah untuk memudahkan proses penelitian selanjutnya. Di lapangan penelitian sendiri ternyata banyak alternatif tempat untuk bisa ditinggali oleh pendatang. Entah itu berupa pondok pesantren (tempat yang berada dalam lokasi Masjid Agung dan berorientasi untuk memberi tempat bagi mereka yang hendak menuntut ilmu keagamaan yang diadakan oleh lembaga tersebut), home stay (tempat yang disediakan bagi para pendatang untuk menetap sementara waktu dalam jangka waktu satu minggu hingga satu bulan dan biasanya kepemilikannya bersifat individual dengan tempat relatif luas) ataupun kost-kost-an (yaitu tempat yang disediakan bagi para pendatang yang bertujuan untuk tinggal dalam jangka waktu yang relatif lama dan sekalipun kepemilikannya bersifat pribadi namun relatif lebih kecil bila dibanding dengan rumah yang dijadikan home stay).

Akhirnya peneliti memilih bertempat tinggal di sebuah kost-kost-an di Jalan Wijaya Kusuma III No. 23 Rt. 01 Rw. 04 Kauman. Dengan pertimbangan beberapa hal, beberapa di antaranya adalah *pertama* dekat dengan sebuah langgar (tempat ibadah bagi orang beragama Islam) dari kondisi itu berarti peneliti akan dekat dengan aktivitas publik. Artinya di langgar tersebut, peneliti akan bertemu dengan banyak orang ketika menunaikan kewajiban keagamáannya sehari-hari di samping juga sebagai tempat untuk berkumpul pada moment tertentu oleh warga sekitarnya. Yang *kedua*, dengan bertempat tinggal di kost-kost-an peneliti secara tidak langsung dapat memahami aktivitas para pendatang yang tinggal bersama peneliti. Dan yang *ketiga*, yang sekaligus strategis bagi peneliti adalah pemilik dari tempat yang peneliti tinggali adalah tokoh masyarakat (ulama ; orang yang paham agama Islam) sehingga banyak membantu peneliti dalam penempatan diri dalam proses sosialisasi di lapangan.

**Kedua**, untuk tahap ini peneliti melakukannya dalam proses yang relatif lama yaitu pengamatan sehari-hari di Kauman. Di sini peneliti menghabiskan waktu relatif paling lama untuk melakukan pengamatan (sebagai salah satu tehnik pengambilan data) terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh obyek penelitian di lapangan (observasi mendalam I). Tehnik yang peneliti lakukan adalah proses pembauran dengan semua aktivitas yang ada, untuk kemudian peneliti dokumentasikan dalam catatan harian lapangan. Sambil terus untuk membangun kerangka berpikir tentang realitas yang ada di lapangan. Bangunan-bangunan hipotesis tentang realitas yang peneliti hadapi selalu berubah-ubah sesuai dengan semakin banyaknya moment yang peneliti amati di lapangan.

Semua proses itu berjalan secara bertahap sesuai dengan proses sosialisasi yang peneliti lakukan agar tidak terasa janggal

dengan realitas yang peneliti hadapi. Dan proses ini berjalan lancar karena peneliti memang secara khusus meminta bantuan seseorang yang oleh peneliti ditempatkan sebagai penerima di lapangan agar memudahkan hubungan yang peneliti miliki dengan obyek penelitian (*gate-keeper*). Jadi selama itu, proses yang ada di lapangan hanyalah pengamatan lalu dokumentasi peneliti dalam bentuk catatan harian lapangan sambil tetap membuat rangkaian tipologi atas realitas dan hipotesis-hipotesis yang sifatnya sementara. Dan proses ini peneliti lewati sambil menyelesaikan kerangka kajian pustaka (proposal) yang peneliti telah buat sebelumnya.

Dari sini kemudian peneliti membuat *sampling frame* tentang individu-individu yang ada di Kauman. Yang mana, peneliti membaginya atas tiga kategori dasar yaitu penduduk asli Kauman; dalam artian mereka adalah penduduk yang mempunyai garis keturunan dari mereka yang pernah menjadi *Abdi Dalem Pametakhan* ataupun mereka yang menjadi keturunan dari masyarakat yang datang karena bekerja menjadi tenaga kerja *Abdi Dalem Pametakhan* tersebut. Namun yang terakhir tidak peneliti menempatkan-nya secara khusus sebagai representasi dari masyarakat Kauman (dalam masa lalu-nya). Kemudian yang kedua adalah mereka yang telah menjadi penduduk Kauman dan menetap di Kauman. Kebanyakan mereka adalah pendatang yang datang baik pada saat Kauman masih dalam otoritas keraton ataupun mereka yang datang selepas aturan-atauran negara berlaku di Kauman. Namun dalam prosesnya kedua-nya (mereka yang menjadi keturunan-yang bukan) tampak tidak ada perbedaan yang mendasar sebab keduanya kini adalah warga Kauman. Mereka sama-sama memiliki hak atas tanah di Kauman dan dengan bebas pula diperjualbelikan. Yang terasa berbeda adalah dengan kelompok ketiga yaitu warga yang terdapat di Kauman namun

mereka tinggal di dalam Kauman karena adanya lapangan kerja ataupun mereka tinggal di Kauman dengan waktu yang relatif terbatas. Dengan menempati rumah-rumah yang dengan sengaja disewakan, mereka menjadi sumber daya manusia bagi berbagai kegiatan ekonomi yang terselenggara di Kauman ataupun sekitarnya. Dari situlah rangkaian data, bagi peneliti mulai di telusuri dan dikonstruksi berbagai hipotesis tentang skema perubahan yang terjadi di Kauman.

Dari apa yang telah peneliti lakukan, ternyata berdampak pada apa yang peneliti rasakan sendiri bahwa setiap moment yang peneliti lewati bersama orang lain di lokasi penelitian adalah data yang tidak bisa diabaikan oleh peneliti.

**Ketiga**, yaitu tahap masuknya peneliti secara resmi ke lapangan. Di tahap ini peneliti menyelesaikan berbagai prosedur resmi penelitian secara resmi, seperti halnya adalah masalah perijinan terkait dengan apa yang peneliti lakukan di lapangan.

**Keempat** adalah tahapan utama yaitu pengambilan data lewat wawancara dengan beberapa informan di lokasi penelitian (observasi mendalam II). Tahap ini berjalan maksimal setelah peneliti melalui tahap-tahap sebelumnya. Dimana peneliti punya berbagai kerangka pemikiran dari hasil pengamatan di lapangan yang telah peneliti lakukan sebelumnya, untuk kemudian dikonfirmasi dengan data yang peneliti peroleh dari wawancara pada tahap ini.

Namun dalam tahapan ini, peneliti membaginya dalam beberapa fase pengambilan data dalam bentuk wawancara. Hal ini dilakukan oleh peneliti berdasarkan apa yang peneliti kategorikan sebagai komposisi penduduk Kauman (sebagai hasil dari observasi mendalam I). Tapi fase-fase ini, tentunya mengalami banyak penyesuaian dilapangan untuk disesuaikan dengan semua data baru yang peneliti miliki.

1. Fase yang *pertama* adalah pengambilan data dalam bentuk wawancara dengan penduduk asli Kauman (*Abdi Dalem Pamethakan*) dan keturunannya (wawancara tahap I). Dari data ini, peneliti membangun hipotesis awal tentang perubahan Kauman dalam kerangka obyek utama dari masyarakat Kauman asli.
2. Fase yang *kedua* adalah pemaksimalan hipotesis yang telah peneliti miliki dari hasil wawancara tahap I yang telah peneliti elaborasi dengan catatan lapangan hasil dari observasi mendalam I, peneliti melengkapinya dengan mengambil data dalam bentuk wawancara dengan penduduk Kauman yang menetap (mereka adalah penduduk yang menetap di Kauman selepas Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945-an dan mereka sudah beranak pinak; wawancara tahap II). Dengan cara ini peneliti, menghasilkan apa yang peneliti butuhkan dari apa yang peneliti pertanyakan dalam perumusan masalah. Artinya hipotesis yang peneliti miliki sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, berdasarkan wawancara tahap I dan II.
3. Fase *refleksi* dari kondisi data yang peneliti miliki, maka peneliti mencoba mengambil tengat waktu untuk mencoba merefleksikan data yang peneliti ambil sebelumnya. Hal ini penting untuk membiarkan data-data yang ada dipaparkan secara baik dan dari situ akan terlihat lubang-lubang kekurangan yang peneliti miliki ketika melalui proses pengambilan data pada fase wawancara tahap I dan II. Sekaligus memberi kesempatan bagi peneliti untuk menyusun laporan sebagai tahap penulisan awal. Dan berdasarkan kondisi ini, peneliti juga membangun temuan-temuan untuk di follow up-i pada fase pengambilan data berikutnya.

### *Dudarnya Kauman*

4. Fase yang *keempat* adalah fase *trianggulasi*. Fase ini bermula dari temuan. Dan ternyata informan yang dibutuhkan dalam fase ini adalah sekaligus masuk dalam kategori penduduk Kauman yang menetap dan beberapa diantaranya sekarang tinggal di luar Kauman.
5. Fase berikutnya yaitu yang *kelima* adalah tahapan untuk melengkapi data lapangan dengan mengulangi proses fase sebelumnya (tahap I dan II) yaitu pengambilan data dalam bentuk wawancara dengan penduduk asli Kauman dan penduduk menetap. Pada fase ini, peneliti mencoba untuk menutup lobang-lobang hipotesis (baru) yang peneliti miliki, yang merupakan hasil dari pengambilan data pada tahap I dan II sekaligus yang telah ditrianggulasi-kan. Dalam fase ini, agenda peneliti lebih pada melengkapi apa yang menjadi target dari peneliti yaitu temuan atas semua variabel yang terdapat di lapangan dan dengan penjelasan atas semua variabel tersebut.

Di samping itu juga peneliti menerima banyak bantuan dari berbagai pihak (baik itu Kepala Kelurahan atau beberapa figur tokoh masyarakat) yang memberi referensi bagi peneliti untuk selalu berani mengubah hipotesis yang peneliti miliki ataupun membantu untuk menyempurnakan kerangka berpikir peneliti.

**Kelima**, adalah tahap akhir dari fase penelitian ini yaitu penulisan laporan. Setelah semua proses yang telah peneliti lalui maka penulisan laporan menjadi tahap akhir dari agenda penelitian ini, tentunya tetap dengan menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang telah membantu peneliti melakukan penelitian di Kauman. Dan untuk tahap ini peneliti tetap akan merasa banyak kekurangan sehingga tetap membuka diri untuk kembali ke lapangan sebagai komitmen dari kekurangan tersebut, untuk kemudian benar-benar keluar dari lapangan dan menyelesaikan penelitian secara total.

## BAB II

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. SEJARAH KERATON SURAKARTA

Pada pertengahan abad 16, kerajaan Majapahit mengalami keruntuhannya. Runtuhnya Majapahit ditandai dengan terjadinya disintegrasi wilayah dan diikuti dengan munculnya dinasti baru, yaitu kerajaan Islam-Demak. Majapahit yang telah berkuasa di sebagian besar belahan nusantara, akhirnya tidak mampu mempertahankan eksistensinya di bawah pimpinan Prabu Brawijaya, Demak kemudian menjadi penguasa di Jawa selepas Majapahit. Namun selepas pemerintahan Raden Patah, Demak pun tak bisa menghindari berbagai konflik internal yang menjadikannya tidak stabil. Konflik kekuasaan pun menjadi salah satu penyebab mengerosnya kekuasaan Demak di Jawa, terutama setelah memasuki abad 17-an yaitu abad yang berkenaan dengan ekspansionisme Eropa di bumi nusantara (Dwi Ratna, 1999 : 55-56).

Surutnya kekuasaan Demak, diikuti dengan menguatnya kekuatan Mataram. Kemunculan Mataram sendiri pada pertengahan abad 17 sesungguhnya lebih didasarkan pada respon masyarakat Jawa (yang agraris) terhadap meningkatnya permintaan beras dalam perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional (Kuntowijoyo, *Op. Cit.* :29). Dengan mengambil basis geografis di daerah pedalaman Jawa yang sangat subur, secara efektif Mataram akhirnya muncul sebagai pemegang

monopoli beras. Untuk mempertahankan statusnya ini, Mataram-pun melakukan berbagai upaya penaklukan terhadap kubu-kubu peninggalan Demak untuk kemudian diintegrasikan ke dalam sistem perekonomiannya yang agraris. Inilah tahap, ketika konstelasi kekuasaan di Jawa bergeser dari pesisir pantai (Demak) ke pedalaman (Mataram) yang juga bersamaan dengan bergesernya basis material dari perdagangan maritim ke pertanian agraris.

Meskipun Mataram pernah mengalami kejayaannya, terutama ketika dipimpin oleh Sultan Agung yang bergelar *Sultan Agung Senopati ing Alaga Ngabdur Rachman*, dan mampu mengembangkan kekuasaan Mataram hingga meliputi seluruh wilayah pantai utara -yang terbentang dari Kerawang (di Barat) sampai Pasuruan (di Timur)-, Mataram tak lepas jua dari pasang surut kekuasaan. Mulai dari berpindahnya pusat kekuasaan, intervensi kaum kolonial, perang sesama kerajaan di Jawa hingga konflik internal antar sesama bangsawan Mataram. Perpindahan pusat kekuasaan dari Kraton Karta ke Pleret, pada masa kepemimpinan Amangkurat I. Kemudian pada kepemimpinan Sunan Amangkutrat II berpindah lagi dari Pleret ke Wanakerta, yang letaknya di daerah Pajang dan kelak berganti nama menjadi Kartasura Hadiningrat. Lalu yang terakhir, pada masa kepemimpinan Susuhunan Paku Buwana II (1727-1749) Mataram-pun memindahkan untuk kesekian kalinya pusat kekuasaan dari Kartasura ke Surakarta di daerah Sala.

Disamping itu semua, setting kekuasaan Mataram-pun tak lepas dari berbagai intervensi kaum kolonial. Karena pada saat kekuasaan Mataram tegak di Jawa, kekuatan kaum kolonial dengan VOC-nya juga mulai merambah ke berbagai pedalaman pulau Jawa. Keterlibatan VOC dalam urusan intern kerajaan Mataram dimulai sejak masa pemerintahan Amangkurat II

(1677-1703), yang sedang menghadapi peperangan dengan sesama kerajaan tradisional di Jawa yaitu Trunajaya dari Madura. Kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan membuat Mataram mulai membuka diri dengan pihak asing dan itu berkonsekuensi pada perkembangan kekuasaan di kemudian hari yang senantiasa dibayang-bayangi oleh berbagai kepentingan kaum kolonial. Bahkan ketika terjadi konflik internal dalam tubuh kekuasaan di Mataram, yang melibatkan sesama bangsawan Kraton, kaum kolonial menjadi salah satu kekuatan yang dijadikan aliansi (gabungan kekuatan) dalam kerangka kepentingan akan kekuasaan. Seperti apa yang terjadi pada masa pemerintahan Sunan Paku Buwana II, yang melibatkan dua saudara Sunan Paku Buwana II yaitu Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Mangkunegara atau ketika kekuasaan dihadapkan konflik dari dalam wilayah kekuasaannya, semisal ketika terjadi *Geger Pecinan* yang melibatkan etnis Cina yang mendapat banyak dukungan dari elit pribumi untuk memberontak melawan kekuasaan Mataram dan kaum kolonial, pada akhirnya menjadikan kaum kolonial semakin kuat pengaruhnya di Mataram karena mampu meredam konflik ini lewat peperangan yang dimenangkan oleh mereka. Salah satu dampak dari konflik yang terakhir ini adalah perpindahan pusat kerajaan Mataram dari Kartasura ke Surakarta, karena pusat kerajaan Mataram yang terletak di Kartasura mengalami kerusakan yang berat selepas penyelesaian konflik tersebut.

Perpindahan pusat kekuasaan Mataram dan memilih desa Sala dengan pertimbangan sebagai berikut : pertama, desa Sala terletak di dekat pertemuan dua sungai yaitu sungai Pepe dan sungai Bengawan. Di samping punya makna magis, sungai juga memberikan manfaat dalam kerangka kepentingan ekonomi, sosial, politik dan militer. Kedua, dengan alasan praktis bahwa

### *Dudarnya Kauman*

daerah Sala telah menjadi tempat hunian bagi masyarakat umum dan daerah-daerah sekitar Sala telah menjadi bagian yang dikembangkan oleh kekuasaan di Kartasura. Kemudian yang ketiga, yaitu keterkaitan dengan berbagai kepentingan Kraton sendiri dengan pihak kolonial untuk memilih Sala sebagai pusat pemerintahan, seperti mudahnya jalur transportasi baik dalam kepentingan ekonomi ataupun militer (Darsiti Soeratman, 2000 : 66-79). Dan pada akhir 1745 Sunan Paku Buwana II mulai mempersiapkan proses perpindahan kraton yang berjarak kurang lebih 10 km dari kraton yang lama. Namun baru pada tanggal 17 Februari 1746 Sunan paku Buwana II dapat menempati keratonnya yang baru di Sala, setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jenderal William van Imkoff di Batavia (Jakarta), tertanggal 27 Juli 1745.

Setelah sekian lama eksistensi kraton tegak, kini keberadaannya masuk dalam bagian dari Pemerintah Daerah Surakarta. Perubahan itu melalui proses panjang, berkaitan dengan perkembangan politik nasional yang melalui tahap-tahap penjajahan dari Belanda, Jepang dan memasuki masa-masa Kemerdekaan. Berbagai bentuk perubahan konsep pengembangan melanda kota ini, hingga akhirnya diberlakukan Undang-Undang No.18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah hingga sekarang (Pemerintah Kota dengan UU No. 22 tahun 1999). Dengan menempatkan kota Surakarta sebagai pusat wilayah dari kota Surakarta secara keseluruhan dan menempatkan Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali dan Wonogiri sebagai bagian dalam wilayah Pemerintahan Daerah Surakarta.

## B. SEJARAH KAUMAN

Seiring dengan pembangunan kraton Surakarta, salah satu kebijakan kraton sendiri adalah mengembangkan wilayah sekitarnya dalam kerangka kekuasaan. Maka lingkungan kraton pun tak lepas dari konsepsi kekuasaan yang luas, dimana setiap bagian dari wilayah kekuasaan akan mempunyai peran dan makna sendiri. Begitu juga dengan kraton dan lingkungannya, yang menempatkan konsep konsentris (empat lingkaran) kerajaan Jawa. Lingkaran pertama yaitu *kedhaton*, sebagai pusat kekuasaan karena berbagai simbol kekuasaan ditempatkan di sini. Kemudian lingkaran yang kedua, berupa kompleks bangunan di Baluwarti sebagai tempat tinggal para bangsawan dan abdi dalemnya. Dan yang ketiga berupa *paseban*, yang berfungsi menjadi tempat mediasi kekuasaan dengan dunia luar. Lalu yang terakhir adalah Alunalun yang berfungsi menjembatani kraton (sebagai pusat jagat raya) dengan dunia luar secara luas (Danys Lombard, 1996 : 113).

Di samping pola pembangunan kraton tersebut, pengembangan wilayah disekitar kratonpun menempatkan berbagai peran yang dipunyai oleh masyarakatnya dengan agenda-agenda strategis kraton. Karena kraton sendiri mempunyai konsepsi tentang masyarakatnya dalam konsep hirarki antara Raja dan keluarga (*sentana dalem*), pegawai dan pejabat kerajaan (*abdi dalem*) dan rakyat biasa (*kawula dalem*). Raja dan keluarga tinggal di dalam lingkungan kraton, para pegawai dan pejabat fungsional kerajaan, tinggal di sekitar kraton dengan mengelilingi kraton. Lalu rakyat biasa tinggal dalam area bebas namun tetap masih dalam wilayah otoritas kraton Surakarta (Danys Lombard, *Ib. id* : 125). Terkait dengan tempat tinggal para abdi dalem kraton, maka disediakan daerah-daerah tertentu yang mempunyai letak disekitar kraton. Semisal, jabatan *Pepatih Dalem* atau *Bupati Nayaka*, akan disesuaikan dengan nama tempat yang

menjadi tempat tinggal mereka. Sehingga kita dapat mengenali nama-nama *Kepatihan*, *Kampung Sewu* ataupun *Penumping*. Kemudian untuk abdi dalem prajurit, tinggal disekitar *Baluwarti*. Lalu untuk abdi dalem yang bertugas sebagai abdi dalem *kriya* (pertukangan) menempati daerah *Sayangan* atau *Gemblegan*. Dan abdi dalem yang mengurus bidang keagamaan atau mengurus segala sesuatu yang berkait dengan agenda kraton yang bernuansakan religi, ditempatkan disekitar Masjid Agung sekaligus mengurus dan memelihara Masjid Agung, yang berfungsi sebagai pusat aktivitas keagamaan bagi Kraton Surakarta.

Nama bagi mereka kemudian diambil dari kata *Qoum-Kaum* (yang berarti = ulama) dan tempat bagi mereka dinamai kampung Kauman (Darsiti Soeratman, *Op. Cit.* : 85-86). Kampung (sekarang menjadi kelurahan) yang dibatasi oleh Kampung Baru di sebelah Utara, Kelurahan Kemlayan di sebelah Barat, Kelurahan Gajahan di sebelah Selatan dan Kelurahan Kedung Lumbu di sebelah Timur.

Kauman sendiri dibangun dalam kaitannya dengan pembangunan Masjid Agung dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan kerajaan Surakarta, yang sekaligus wujud dari warisan tradisi Islam Demak (Dannys Lombard, *Op.Cit* : 116). Kauman terletak diluar benteng istana, tepatnya dekat Alun-alun Utara sebagai permukiman abdi dalem yang bertugas dalam bidang keagamaan. Karenanya struktur keorganisasian di kraton Surakarta, terdiri dari tiga bagian administrasi pemerintah berupa :

1. Lembaga administrasi pemerintah di bawah kekuasaan *Patih*, yang menjadi pejabat tertinggi dalam hirarki birokrasi dan biasa disebut dengan *Reh Kepatihan*.
2. *Reh Kadipaten Anom*, yang berfungsi sebagai kepala administrasi untuk mengurus kebutuhan para *Sentana Dalem*. Lembaga ini dibawahahi oleh seorang *Pangeran Adipati Anom*.

3. *Reh Pengulon*, berfungsi mengurus administrasi keagamaan secara integratif dibawah pimpinan *Penghulu Tafsir Anom*. Pegawai-pegawai yang membantu lembaga *Reh Pengulon* disebut sebagai *Abdi Dalem Pamethakan* yang berarti golongan putih (suci).

*Penghulu* memimpin *Reh Pengulon*, bertanggung jawab terhadap urusan-urusan agama termasuk di dalamnya melaksanakan keadilan dalam pertikaian dalam kaitannya dengan hukum Islam. Lembaga ini dikepalai oleh *Penghulu Ageng*, yaitu kepala alim ulama di Masjid Agung kerajaan. Dalam kaitannya dengan istana, *penghulu* diberi tugas untuk memimpin upacara-upacara keagamaan, berdoa untuk keselamatan Raja, memberi pengajaran tentang agama Islam kepada kerabat Raja dan sebagainya.

#### 1. Karakteristik Kauman

Keberadaan Kauman sejak awal pembangunannya memang ditujukan sebagai komunitas Muslim, yang juga berguna dalam aktivitas keagamaan keraton. Dari kondisi tersebut, Kauman berproses dalam kerangka identitas kebudayaan yang khas, yang tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukannya diawal. Karena sistem yang ada di Kauman juga bagian dari keberadaan Kraton Surakarta ataupun Masjid Agung sebagai salah satu perangkat kebudayaannya.

##### a. Ikatan Keagamaan

Abdi dalem yang mengurus bidang keagamaan dan tinggal di Kauman, dibawahhi oleh *Penghulu Tafsir Anom*. Dan pemuka Kauman yang pertama bermukim di lahan sekitar Masjid Agung adalah *Kanjeng Kyai Penghulu Mohammad Thohar Hadiningrat (Penghulu*

*Dalem ing Kraton Dalem Surakarta*). Wewenang *Penghulu* adalah mengatur seluruh aparatnya yang disebut sebagai *Abdi Dalem Pamethakan* di wilayah kekuasaannya dalam *Reh Pengulon* yang berhubungan dengan peraturan dan kemakmuran Masjid Agung.

Dalam kaitannya dengan agenda keagamaan yang diselenggarakan di Masjid Agung, kraton Surakarta menempatkan sejumlah alim ulama dalam birokrasi *Reh Pengulon*. Jajaran birokrasi tersebut antara lain :

- 1) *Ketib*, yang merupakan pegawai yang bertanggung jawab dalam terselenggaranya khotbah Jum'at di Masjid Agung. Jumlah *Ketib* ini adalah tujuh orang yaitu : *Ketib Winong, Trayem, Sememen, Cendana, Arum, Imam* dan *Anom*. Para *Ketib* ini dikepali langsung *Penghulu*.
- 2) *Modin*, berasal dari sebutan *Muadzin* yang artinya bertugas mengumandangkan lafal adzan (seruan unuk beribadah) dengan jumlah ada sekitar lima orang, disesuaikan dengan jumlah *Sholat* (ritual ibadah) dalam sehari yaitu sejumlah lima waktu.
- 3) *Qoyyim*, pengganti atau membantu tugas *Modin* apabila berhalangan.
- d. *Mabot* yaitu mereka yang terikat di dalam Masjid Agung dan bertugas memelihara lingkungannya.

Mereka yang direkrut oleh Kraton, untuk kemudian diberi tugas memelihara dan membantu aktivitas keagamaan Kraton berasal dari para ulama dan santri yang ada di wilayah kekuasaan Kraton Surakarta. Sebagai konsekuensinya, mereka diberi tanah di sekitar Masjid Agung. Fasilitas yang diberikan oleh kraton, selain

tanah tempat *Gaduhan* (tanah tempat tinggal) juga gaji dan tanah *Palungguh* (garapan) yang berada di pedesaan. *Penghulu* memperoleh tempat tinggal sekaligus tempat kerjanya di dalam *Reh Pengulon* yang terletak di sebelah Utara Masjid Agung. Sedangkan tempat tinggal untuk *Ketib Anom*, *Arum* dan *Imam* berada di sebelah Barat, sementara *Ketib Winong* dan *Trayem* berada di sebelah utara Masjid Agung. Dan *Ketib Sememi* mendapatkan tempat tinggal di sebelah Barat Laut Masjid Agung (M. Zaki, 1999 : 21-25).

Dari gambaran tersebut, keberadaan Masjid Agung dan segenap abdi dalemnya selain sebagai bentuk ekspresi dari simbol kerajaan yang menganut Islam, pada akhirnya mampu mengkonstruksi suatu masyarakat yaitu masyarakat Kauman. Masjid Agung sebagai pusat kegiatan ibadah ritual sekaligus sebagai tempat berinteraksi sesama jamaah yang pada akhirnya mampu menghasilkan suatu kebersamaan. Sebuah kebersamaan dengan segala perangkatnya (layaknya suatu sistem sosial tersendiri). Kebersamaan dengan perekat norma-norma Islam sebagai landasan dalam berinteraksi sehari-sehari.

Ikatan keagamaan yang terbangun, berawal dari sebuah kesepakatan untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam keseharian mereka. Dimana sosialisasi nilai-nilai keIslaman dilakukan secara intensif melalui media-media pendidikan yang ada. Di Kauman, lembaga pendidikan yang ada hanyalah Kyai, Langgar dan pengajaran yang dilakukan secara individual yang mengacu pada pola pendidikan pesantren, seperti apa yang mereka dapatkan sebelumnya. Pada masa-masa

awal pertumbuhannya tradisi pemahaman Islam yang tumbuh dari budaya pesantren telah menjadi akar budaya masyarakat Kauman. Dengan otoritas kehidupan keagamaan ada ditangan para Kyai, yang sekaligus mereka juga menjadi abdi dalem Kraton sehingga batas antara nilai-nilai keagamaan yang murni dan orientasi nilai-nilai tradisi tidak mempunyai batas yang tegas. Berbagai tradisi yang ada, baik diselenggarakan masyarakat luas atau oleh Kraton seperti *Grebekan* atau *Sekaten* maupun *Slametan*, telah menjadi tradisi yang umum. Pemahaman terhadap nilai-nilai keIslaman berada di balik otoritas penuh para ulama, yang nota bebe mereka juga mengembangkan tradisi yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari perilaku masyarakat secara luas. Percampuran antara tradisi-originalitas nilai, mistik-terekat atau pemahaman yang diambil dari ke-empat mazhab besar menjadi unsur-unsur utama dalam pandangan masyarakat Kauman.

Budaya pendidikan pesantren yang dikembangkan oleh para ulama tersebut, sangat mewarnai pola perkembangan masyarakat Kauman. Pola pendidikan pesantren yang berawal dari belajar mengaji (membaca kitab suci) yang diasuh oleh keluarga sendiri kemudian meningkat ke Langgar (musholla; tempat ibadah dengan ukuran lebih kecil dari masjid) yang diasuh para Kyai setempat untuk diteruskan ke pesantren-pesantren besar. Dari pola pelestarian seperti ini, hubungan kelangsungan jabatan sebagai *Abdi Dalem Pamethakan* dilanjutkan dari dalam Kauman.

b. Pertalian Darah

Berkaitan dengan penghargaan yang mereka dapatkan sebagai *Abdi Dalem Pamethakan* -atas dasar ukuran pemahaman tentang agama Islam- mau tidak mau menempatkan mereka pada satu status sosial dan kedudukan tertentu, oleh karenanya, yang terjadi di dalam masyarakat Kauman juga demikian adanya. Para *Abdi Dalem Pamethakan* yang mempunyai kedudukan penting dalam birokrasi Kraton Surakarta, pada akhirnya mengembangkan suatu pola interaksi yang mengikat warganya dalam pergaulan yang lebih erat dengan frekuensi yang tinggi (tentunya dengan kesamaan untuk bersama-sama melaksanakan syariat Islam).

Salah satu cara untuk mempertahankan status sosial mereka adalah dengan melakukan perkawinan dengan status yang sama diantara kedua belah pihak (*endogen*). Dari proses tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat Kauman secara sadar berusaha untuk mempertahankan statusnya sebab perkawinan yang dilangsungkan antar sesama keturunan *Abdi Dalem Pamethakan* atau kalau tidak dengan mereka yang mempunyai derajat keIslaman yang tinggi, ternyata berkonsekuensi pada terbentuknya ikatan kekeluargaan dengan mekanisme perkawinan antar sesama atau keturunan *Abdi Dalem Pamethakan* sehingga menutup dengan sendirinya bagi masyarakat lain untuk melakukan mobilitas seperti yang pernah dilakukan oleh para *Abdi Dalem Pamethakan* pada awal keberadaan mereka diawal keberadaan Kauman (Adaby Darban, *Op. Cit* : 17-18). Sekaligus juga menutup kemungkinan bagi komunitas diluar Kauman untuk masuk ke dalam Kau-

man. Dengan pola ini, hirarki jabatan maupun tingkat kemampuan material tidak menjadikan perbedaan yang mencolok, karena pengaruh keagamaan dan pertalian darah telah diwujudkan dalam pergaulan sosial yang intim.

c. Status Sosial yang Tinggi

Dalam konstruksi masyarakat Jawa, terdapat penggolongan secara sosial terhadap individu-individu yang ada di dalamnya ke dalam strata-strata tertentu. Status sosial yang tinggi yang dimiliki oleh individu bisa berdasarkan garis keturunan yang diperolehnya secara otomatis atau status sosial yang memang secara sengaja diberikan oleh otoritas keraton terhadap individu yang mempunyai peran tertentu dalam struktur tradisional tersebut.

*Abdi Dalem Pamethakan* yang rata-rata mempunyai pemahaman keagamaan keIslaman yang baik, mendapatkan peran sosialnya dalam birokrasi Kraton Surakarta yang sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam kerajaan Demak. Peran yang diberikan kepada mereka, secara otomatis mengangkat status sosial mereka secara vertikal (Adaby Darban, *Op. Cit* : 18-19). Ketika berbagai jaminan sosial melekat dalam status tersebut, mereka kemudian mengembangkan pola perkembangan komunitas secara tertutup sehingga status sosial yang telah melekat dalam diri mereka dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu.

Di samping itu, peran nilai yang berlaku pada alam masyarakat Jawa Mataram (peninggalan Demak), yang menempatkan peran sentral dari seseorang yang mem-

punya pemahaman agama lebih dari yang lain. Kepemimpinan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai pemahaman agama (Kyai atau Ulama) memberi peran sosial yang luas terhadap masyarakat Jawa pada saat itu. Dari Kraton hingga masyarakat luas, menempatkan orang yang mempunyai pemahaman agama yang lebih, pada suatu status yang khas untuk diakui peran-peran sosialnya dengan segala atribut religius yang menyertainya sekaligus melahirkan berbagai kepatuhan dan penghormatan terhadap peran dan status tersebut. Dan Kauman menjadi tempat berkumpulnya para ulama untuk kemudian mengabdikan di Kraton Surakarta, maka secara otomatis pula mengakumulasi berbagai penghargaan terhadap peran para ulama dan Kauman secara keseluruhan.

### **C. KEADAAN GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS**

Kelurahan Kauman sebagai salah satu wilayah yang berada dalam administrasi Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta – Propinsi Jawa Tengah, merupakan wilayah yang berada pada bagian Selatan Surakarta dan terletak pada  $110^{\circ} - 111^{\circ}$  BT dan  $7.8^{\circ} - 8^{\circ}$  LS. Dengan luas 20.10 Ha dan terdiri dari 26 Rukun Tetangga (RT) serta 6 Rukun Warga (RW), Kauman kini berada dibawah administrasi secara langsung Kelurahan Kauman.

Dari data yang diperoleh peneliti dari kantor Kelurahan Kauman per Mei 2002, kini terdapat 795 Kepala Keluarga, dengan jumlah keseluruhan warga 3324 jiwa yang terdiri dari 1685 berjenis kelamin laki-laki dan 1639 berjenis kelamin perempuan. Disamping itu juga terdapat 1 masjid yaitu Masjid Agung, 6 langgar antara lain *Sememen, Trayeman, Winongan, Hidayat, Gontoran, Modinan* dan 1 musholla putri Yasinan, 1 pondok pe-

santren *Tahfidl Wa'takmil*, 2 yayasan pendidikan NDM dan Muhammadiyah, 1 kantor ormas Muhammadiyah dan beberapa komunitas pengajian yang diselenggarakan di rumah ataupun langgar. Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci dari keadaan demografi di Kauman, peneliti mencoba menggambar-kannya dalam tabel-tabel berikut :

**1. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.**

Kondisi kependudukan yang terdapat di Kauman, yang didasarkan atas komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, dirasa perlu. Untuk melihat komposisinya, tabel di bawah ini akan menggambarkan kondisi tersebut.

**Tabel 1**  
**Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin**

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	91	56	147
5-9	111	114	225
10-14	143	118	261
15-19	116	119	235
20-24	143	115	258
25-29	151	150	301
30-39	359	364	123
40-49	292	233	525
50-59	139	158	297
60 +	140	212	352
<b>Jumlah</b>	<b>1685</b>	<b>1639</b>	<b>3324</b>

Sumber : Data Monografi Kelurahan Kauman, Mei 2002

Hampir seimbang komposisi penduduk yang berjenis kelamin Laki-laki dan Perempuan. Namun yang paling dominan dari tabel di atas adalah jumlah penduduk yang sudah memasuki masa produktif (kerja) yaitu diatas usia 20 tahun hingga usia 59 tahun, yang berjumlah 1504. Dan sisanya adalah penduduk yang belum memasuki masa usia produktif, tersebar dalam berbagai segmen aktivitas seperti pendidikan hingga pensiunan.

**2. Komposisi penduduk menurut pendidikan.**

Komposisi penduduk menurut pendidikan perlu diketahui untuk melihat keadaan atau berlangsungnya proses pendidikan di Kauman.

**Tabel 2**  
**Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan**  
**Dengan catatan, untuk usia 5 tahun ke atas**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tamat Akademi/PT	620
Tamat SLTA	825
Tamat SLTP	501
Tamat SD	132
Sudah Tamat SD	265
Belum tamat SD	229
Tidak sekolah	55
<b>Jumlah</b>	<b>2627</b>

Sumber : Data Monografi Kelurahan Kauman, Mei 2002

### *Dudarnya Kauman*

Gambaran di atas adalah satu potret tentang besarnya penduduk Kauman yang telah mendapatkan pendidikan (formal). Dimana untuk lulusan SLTA ke atas 1445 orang, yang juga berarti, terdapatnya penghargaan yang tinggi penduduk Kauman pada aspek pendidikan yang mesti mereka peroleh. Sekalipun tetap menyisakan 55 orang yang tidak mendapatkan pendidikan namun kerangka pendidikan tentunya tidak hanya dalam kerangka pendidikan formal semata, sebagai pemenuhannya. Karena di Kauman media-media pendidikan non formal-pun tetap berjalan dengan media-media lain seperti aktivitas-aktivitas keagamaan yang rutin diselenggarakan dirumah-rumah atau langgar-langgar yang ada.

### **3. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian.**

Kemudian kondisi berkaiataan dengan komposisi penduduk menurut mata pencaharian mereka, baik yang diperoleh di Kauman sendiri aataupun di luar Kauman. Sehingga gambaran tentang aktivitas perekonomian serta komposisinya dapat secara jelas dipahami.

**Tabel 3**  
**Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian**  
**Dengan catatan, untuk usia 10 tahun ke atas**

<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
Petani	-
Bruruh Tani	-
Nelayaan	-
Pengusaha	8

Buruh Industri	39
Buruh Bangunan	175
Pedagang	182
Pengangkutan	63
PNS/TNI	102
Pensiunan	63
Lain-lain	597
<b>Jumlah</b>	<b>1229</b>

Sumber : Data Monografi Kelurahan Kauman, Mei 2002

Dari tabel di atas, dua jenis pekerjaan yang banyak diambil oleh penduduk Kauman adalah pedagang dan PNS. Kondisi ini tentunya bermula dari adanya pendidikan yang cukup (lihat Tabel 2) sehingga pekerjaan formal menjadi pilihan utama. Sedangkan perdagangan berawal dari pengembangan kampung Kauman sendiri yang strategis serta berkembang seiring dengan pengembangan wilayah sekitar Kauman menjadi daerah produktif dan persebaran penduduk yang tak teridentifikasi merupakan daya dukung dari sektor perdagangan tersebut. Namun tetap yang menjadi kekhasan penduduk Kauman juga tetap ada, yaitu berdagang kebutuhan-kebutuhan keagamaan dimana mereka menjalankannya secara turun temurun. Di samping para penduduk yang menjadi buruh ditempat lain, tentunya adalah mereka yang tidak mempunyai modal pendidikan dan keuangan sehingga pekerjaan itu jadi alternatif paling memungkinkan.

**4. Komposisi penduduk menurut agama.**

Komposisi penduduk di Kauman, sekarang tampak beragam. Dimana penduduk Kauman sekarang juga mulai memeluk agama selain agama Islam.

**Tabel 4**  
**Komposisi Penduduk**  
**Menurut Agama**

Agama	Jumlah
Islam	3120
Katholik	57
Protestan	106
Budha	41
Hindu	-
<b>Jumlah</b>	<b>3324</b>

Sumber : Data Monografi Kelurahan Kauman, Mei 2002

Satu catatan penting dari tabel ini adalah terdapatnya penduduk Kauman yang memeluk agama di luar agama Islam. Hal ini terasa penting untuk dilihat sebagai proses keterbukaan penduduk Kauman secara luas dan melepas sekat-sekat agama sebagai pembentuk masyarakat Kauman pada awal keberadaan mereka di Kauman. Sekalipun penduduk yang beragama Islam tetap dominan namun perubahan komposisi ini adalah salah satu indikator untuk melihat perubahan dalam struktur keagamaan di dalam masyarakat Kauman.

**5. Keadaan sarana dan prasarana.**

Untuk gambaran tentang kondisi sarana dan prasarana ini, peneliti ingin menjelaskan berbagai perangkat kebudayaan yang dimiliki oleh penduduk Kauman, sebagai salah satu ukuran dari adanya kepemilikan individu terhadap sesuatu, yang digunakannya secara produktif.

**Tabel 5**  
**Sarana dan Prasarana**

Jenis Sarana	Jumlah
Radio	212
Telivisi	439
Sepeda	172
Sepeda Motor	113
Mobil Dinas	-
Mobil Pribadi	87
Becak	3

Sumber : Data Monografi Kelurahan Kauman, Mei 2002

Kondisi tersebut, menegaskan tentang kepemilikan penduduk terbanyak adalah kendaraan bermotor, yang orientasinya, tentu saja untuk semua aktivitas produktif bagi mereka.

**6. Keadaan penduduk berkaitan dengan mutasi penduduk.**

Kemudian gambaran tentang dinamika mobilitas masyarakat Kauman baik dalam konteks penambahan penduduk lewat kelahiran atau pindah masuk, ataupun berkurangnya penduduk lewat kematian atau pindah keluar dari Kauman.

**Tabel 6**  
**Mutasi Penduduk**

Mutasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pindah	6	8	14
Datang	15	9	24
Lahir	-	6	6
Mati	2	2	4
- 5 tahun	-	-	-
+ 5 tahun	-	-	-

Sumber : Data monografi Kelurahan Kauman, Mei 2002

Tabel diatas menunjukkan gerak penduduk yang dinamis dimana pergeseran penduduk yang terjadi di Kauman lebih banyak meraka yang masuk ketimbang dari Kauman pindah keluar Kauman. Tentunya hal ini akan terkait dengan keberadaan Kauman sebagai wilayah yang berada tepat di tengah-tengah dinamika penduduk kota sekaligus juga dekat dengan ruang-ruang yang mendinamisir uang dalam bentuk investasi perdagangan ataupun konsumsi.

**7. Keadaan penduduk berkaitan dengan etnis.**

Berkaitan dengan tabel ini, gambaran tentang keterbukaan penduduk Kauman baik dalam agama (lihat Tabel 4) ataupun dalam dinamikaa ruang (lihat Tabel 6) juga bisa kita dapati dari tabel komposisi WNI keturunan yang terdapat di Kauman. Karena adalah fakta bahwa WNI tersebut merupakan pendatang di Kauman.

**Tabel 7**  
**WNI Keturunan**

Kebangsaan	Dewasa	Dewasa	Anak	Anak
	Lk	Pr	Lk	Pr
Cina	95	93	9	9
Lainnya	10	10	4	3
Jumlah	105	103	13	12

Sumber : Data Monografi Kelurahan Kauman, Mei 2002

Biasanya keterbukaan dalam aspek ini berkaitan dengan masuknya masyarakat ber-etnis lain (non Jawa) ke dalam komposisi penduduk Kauman, yang dinamis secara ekonomis. Karena mereka datang dan berada pada posisi untuk berdagang atau secara khusus membeli/sewa lahan di sepanjang pinggir Kauman karena sejalur dengan perkembangan kawasan jalan Slamet Riyadi. Dan karena mereka bermodal besar maka pilihan untuk berdagang barang-barang kebutuhan modern lebih menjadi pilihan.

Demikian rangkaian data yang menggambarkan kondisi Kauman dari awal keberadaannya hingga data terakhir berkaitan dengan berbagai kondisi penduduk, yang dapat peneliti peroleh di lapangan.



### BAB III

## KAUMAN DAN PERUBAHAN

Kauman sebagai sebuah kota yang dibangun atas dasar tuntutan sosio-politis masyarakat Jawa pada masa lalu, memberikan berbagai gambaran yang amat banyak terhadap perkembangan kota pada era aristokratis dan feodalisme yang mengalami kemapanannya di Jawa. Keberadaan Kauman sendiri berawal dari konsepsi Paku Buwono II (1757) yang membangun keraton Surakarta di Sala dengan berbagai perlengkapan yang menyertai keberadaan keraton, seperti masjid Agung, alun-alun ataupun benteng-benteng peperangan. Kauman sendiri masih dalam wilayah *Bumi Pamethakan* (wilayah yang otoritasnya dipegang penuh oleh keraton) sebagai tempat tinggal para abdi dalem yang beragama Islam dan diberi tugas oleh kerajaan untuk mengurus makam-makam yang dihormati, masjid atau tempat-tempat yang dianggap sakral, yang diatur langsung oleh *Reh Pengulon* (administrasi keraton yang mengurus masalah-masalah keagamaan). Kata Kauman sendiri berasal dari kata *Qoum-Muddin* (bhs. Arab) yang berarti penegak agama Islam.

Dalam kerangka inilah Kauman dapat digambarkan sebagai representasi dari terintegrasinya karakter politik tradisional dengan agama dalam sebuah sistem sosial budaya yang khas. Sehingga pemaknaan akan Kauman sebagai masyarakat Islam tradisional diletakkan dalam sebuah bingkai masyarakat yang beragama Islam, yang dipengaruhi oleh otoritas tradisional peninggalan Hindu-Budha dan melahirkan berbagai pola kebudayaan

### *Dudarnya Kauman*

yang mengadopsi nilai-nilai Islam-Hindu-Budha dan dikemas dalam otoritas feodalisme Jawa yaitu kraton Surakarta. Dengan pola pembentukannya yang khas yaitu seleksi atas dasar agama menjadikan perkembangan kota ini linear dengan pola pembentukannya diawal keberadaan Kauman. Kontinuitas ini, menjadi hal yang menarik ketika kita hendak melihatnya pada kerangka perubahan dengan melakukan komparasi antara kondisi awal keberadaan Kauman dengan kondisi kekinian di Kauman karena berbagai agenda modernisasi tersebut.

Agenda modernisasi sendiri ada seiring dengan keberadaan otoritas modern yaitu negara. Keberadaan negara yang mempunyai jaring-jaring kekuasaan pada wilayah yang paling kecil sekalipun, pada akhirnya menghadap-hadapkan antara kraton (sebagai otoritas tradisional) dengan pemerintah daerah (sebagai wakil dari otoritas modern) *vis to vis* dalam ruang-ruang kebudayaan. Agenda pengembangan kota Surakarta yang menempatkan Kauman sebagai bagian dari kota Surakarta yang sedang bergerak ke arah modernisasi, dengan melakukan berbagai perubahan dalam setiap bidang kehidupan memberi dampak tersendiri terhadap Kauman. Perubahan yang dialami oleh Kauman adalah sebuah potret sederhana tentang kecenderungan memudarnya kekuatan tradisi, ketika harus dihadapkan pada gerak perubahan yang sangat dinamis dan perubahan yang terjadi di Kauman tidak bisa lepas dari perubahan yang dialami oleh individu-individu di dalamnya. Perubahan Kauman dalam dimensi ekonomi, budaya, sistem nilai hingga perubahan pada aspek fisik, menyeret individu untuk juga memahami dan mengikuti proses tersebut. Penelitian ini melihat prosesi perubahan di Kauman, sejauh yang telah terjadi hingga sekarang dan menyoroti dinamika individu-individu yang ada di dalamnya dalam menghadapi prosesi perubahan tersebut.

## **A. PERUBAHAN YANG TERJADI DI KAUMAN**

Beberapa perubahan yang terjadi di Kauman, sejauh apa yang dapat peneliti temukan di lapangan antara lain :

### **1. Berubahnya Struktur Tafsir Anom.**

Kauman dalam posisinya dengan keraton adalah sebuah perangkat kebudayaan sekaligus simbol politis. Dimana Masjid Agung adalah salah satu peninggalan konsep politik kerajaan Islam Demak. Dan dalam konstruksi itulah keraton menempatkan salah satu bagian administrasinya di Kauman, yang langsung dibawahahi oleh *Reh Pengulon* (administrasi keagamaan). Dalam struktur tersebut, keraton menempatkan wakil-nya di Kauman dalam posisi wakil keagamaan keraton bagi rakyatnya

#### **a. Pola Rekrutmen**

Tafsir Anom adalah salah satu bagian administrasi dari keraton Surakarta Hadiningrat, yaitu struktur keagamaan yang dibawahahi langsung oleh *Reh Pengulon*. Tafsir Anom sendiri yang mempunyai arti sebagai wakil keagamaan dari keraton dalam kaitannya dengan perilaku keagamaan rakyat. Seperti yang tegaskan oleh seorang informan :

‘Tafsir Anom itu berasal dari kata *Tafsir* yang berarti menjelaskan dan *Anom* yang berarti masyarakat luas’

Sedangkan Beliau sendiri adalah Tafsir Anom ke - 22, beliau diangkat sekitar tahun 90-an awal. Sebelumnya semua Tafsir Anom mulai dari ketika kraton belum pindah dari Kartosura ke Surakarta, yang urutannya sebagai berikut :

*Dudarnya Kauman*

- 1) K.K.P. Anom Tafsir, sebagai Penghulu Ageng pertama di Kartasura. Beliau menjabat selama 24 tahun dan dimakamkan di Laweyan.
- 2) K.K.P. Tangkilan, menjabat selama 2 tahun dan dimakamkan di Weyana.
- 3) K.K.P. Mubin, menjabat selama 1 tahun dan dimakamkan di Wiyana.
- 4) K.K.P. Handipaningrat I, menjabat selama 14 tahun dan dimakamkan di Banyu Urip.
- 5) K.K.P. Jalalen I, menjabat selama 6 tahun dan dimakamkan di Pajang.
- 6) K.K.P. Dipaningrat II, menjabat selama 1 tahun dan dimakamkan di Karang Turi.
- 7) K.K.P. Jayaningrat, menjabat selama 1 tahun dan dimakamkan di Wanatara.
- 8) K.K.P. Pekik Ibrahim yang menjabat selama 4 tahun dan dimakamkan di Sampangan.
- 9) K.K.P. Jalalen II, yang menjabat selama 6 tahun ; dua tahun pada saat keraton masih berada di Kartasura dan enam tahun saat keraton mulai pindah ke Surakarta, sekarang dimakamkan di Laweyan.
- 10) K.K.P. Muhammad Thohar Hadiningrat (menantu dari K.K.P. Jalalen II) yang menjabat selama 46 tahun dan dimakamkan di Laweyan.
- 11) K.K.P. Tafsir Anom Hadiningrat (putra dari K.K.P. M. Thoha Hadiningrat) yang menjabat selama 15 tahun dan dimakamkan di Kuta Gede.
- 12) K.K.P. Martalaya menjabat selama 21 tahun.
- 13) K.K.P. Sumemi (adik dari K.K.P. Martalaya) yang menjabat selama 6 tahun dan dimakamkan di Pajang.

- 14) K.K.P. Dipaningrat II menjabat selama 7 tahun dan dimakamkan di Pajang.
- 15) K.K.P. Tafsir Anom II menjabat selama 8 tahun dan dimakamkan di Pajang.
- 16) K.K.P. Tafsir Anom III menjabat selama 3 tahun dan dimakamkan di Pajang.
- 17) K.K.P. Tafsir Anom IV menjabat selama 31 tahun dan dimakamkan di Pajang.
- 18) K.R.P. Tafsir Anom V menjabat selama 49 tahun dan dimakamkan di Pajang.
- 19) K.R.P. Tafsir Anom VI menjabat selama 23 tahun dan dimakamkan di Pajang.
- 20) K.R.P. Hadipaningrat.
- 21) K.R.T. Tafsir Anom Zaelani Maknawi
- 22) K.R.T. Tafsir Anom Muhammad Dasuki.

Di samping tugas tersebut, mereka semua secara otomatis menjadi *Abdi Dalem Pametakhan* yang berfungsi memberi pengetahuan tentang agama ke pada para kerabat raja dan juga menjadi *Pengulu* (petugas yang menikahkan) bagi kerabat keraton. Dan pada saat keraton mengadakan kegiatan kebudayaan kaitannya dengan rakyat secara luas maka para abdi dalem inilah yang menjadi penanggung jawabnya, seperti acara Hajat Dalem Gunung Keraton Surakarta Hadiningrat pada bulan *Sura* (hitungan dalam Jawa) ataupun bulan-bulan lain yang kaitannya dengan peringatan keagamaan yang biasanya diselenggarakan di dalam lingkungan Masjid Agung (yang sekaligus juga menjadi tanggung jawab bagi *Abdi Dalem Pametakhan*). Dari fungsi awal inilah keraton kemudian menempatkan mereka dalam

### *Dudarnya Kauman*

sebuah wilayah tertentu yaitu Kauman. Kata Kauman sendiri berasal dari kata *Qoum-Muddin* (bhs. Arab) yang berarti penegak agama Islam.

Tafsir Anom sebagai sebuah jabatan yang masuk dalam administrasi keraton melahirkan satu status sosial yang memapankan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan dalam sejarahnya, rekrutmen yang ada menggambarkan pola hubungan kekerabatan yang kental. Hal ini sangat memungkinkan karena mereka tinggal dan menetap pada satu tempat yang sama sehingga memungkinkan pola itu berkembang dengan baik. Maka bisa dimaklumi pola pergantian yang ada tidak lepas dari satu garis keturunan keluarga ke garis keturunan keluarga lainnya atau ke keluarga lain yang mempunyai hubungan kekerabatan. Sekalipun dasar rekrutmennya adalah kefahaman atas agama namun hubungan kekerabatan, pada akhirnya menjadi prioritas. Dan kecendrungan ini dimulai selepas keraton pindah dan membangun Masjid Agung dan Kauman.

Dalam gambaran ini, kita bisa menemukan K.K.P. M.Thohar Hadiningrat (Tafsir Anom ke - 10) adalah menantu dari Tafsir Anom sebelumnya yaitu K.K.P. Jalalen II. Yang kemudian diwarisi oleh putranya sendiri yaitu K.K.P. Tafsir Anom Hadiningrat untuk menjadi Tafsir Anom ke -11. Lalu K.K.P. Sumemi yang melanjutkan menjadi Tafsir Anom untuk menggantikan kedudukan kakaknya yang meninggal yaitu K.K.P. Martalaya, yang telah menjabat selama 21 tahun. Namun seiring dengan pergerakan waktu, pola tersebut mengalami pergeserannya. Dimana dua pejabat Tafsir Anom yang terakhir ternyata bukan orang yang mem-

punyai garis keturunan dengan kerabat keraton ataupun dari mereka yang dulunya pernah menjadi kerabat *Abdi Dalem Pametakhan*. Dalam pola yang berubah ini, ditegaskan oleh seorang informan :

‘Sekarang struktur Tafsir Anom, ternyata bisa diduduki oleh orang yang sebelumnya tidak mempunyai hubungan apapun dengan *Reh Pengulon*. Artinya ada ketidaksinambungan lagi dalam pola pewarisan jabatan ini’

Dan memang diketahui, bahwa dua Tafsir Anom yang terakhir ternyata memang tidak tidak punya hubungan kekerabatan dengan keraton ataupun dengan *Abdi Dalem Pametakhan*. Kalau bapak M. Dasuki berasal dari Boyolali sedangkan Bapak Zaelani Maknawi (almarhum) berasal dari kota Surakarta namun bukan Kauman. Dan yang menarik dari keduanya adalah pensiunan pegawai Departemen Agama Kota Surakarta. Disinilah letak pergeseran pola rekrutmen pada struktur Tafsir Anom, yang kini hanya meletakkannya pada satu standart yaitu pemahaman keagamaan, dan mulai menggeser pola lama yang berupa ikatan kekerabatan atau keturunan *Abdi Dalem Pamethakan* sebelumnya.

b. Struktur Ulama

Masjid Agung yang dibangun oleh keraton dan diserahkan pemeliharannya kepada *Abdi Dalem Pametakhan*, mempunyai beragam kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan ataupun kebudayaan. Dan dalam pelaksanaannya semua kegiatan itu, pada awalnya diorientasikan pada pendidikan keagamaan bagi

kerabat Keraton dan masyarakat secara luas. Masjid Agung menjadi pusat bagi semua kegiatan keagamaan dari kerajaan Surakarta Hadiningrat.

Konsekuensi dari sebuah pusat kegiatan keagamaan adalah menempatkan Masjid Agung dalam peringkat kekuasaan yang secara langsung melakukan transformasi nilai pada masyarakat secara luas. Dan dalam konteks inilah pemaknaan secara politis terhadap Tafsir Anom selaku wakil keagamaan dari keraton terasa penting. Struktur Tafsir Anom yang mempunyai kekerabatan dengan keraton sangat menungkingkan terjaminnya pola sosialisasi kekuasaan keraton untuk tetap ditegakkan. Maka penanggung jawab terhadap semua aktivitas yang diselenggarakan di masjid Agung-pun tak lepas dari otoritas Tafsir Anom.

Dalam kaitannya dengan agenda keagamaan yang diselenggarakan di Masjid Agung, kraton Surakarta menempatkan sejumlah alim ulama dalam birokrasi *Reh Pengulon*. Seumpamanya *Ketib*, yang merupakan pegawai yang bertanggung jawab dalam terselenggaranya khotbah Jum'at di Masjid Agung. Jumlah *Ketib* ini adalah tujuh orang yaitu : *Ketib Winong, Trayem, Sememen, Cendana, Arum, Imam dan Anom*. Para *Ketib* ini dikepalai langsung *Penghulu*. Semua *Ketib* ini merupakan bagian dari struktur Tafsir Anom, yang berarti mereka juga punya hubungan kekerabatan dan tinggal di Kauman. Sekarang sebagian besar nama *Ketib* itu menjadi nama langgar yang sekarang mulai banyak dibangun di dalam Kauman, untuk lebih memudahkan warga Kauman -menunaikan kewajiban lima waktunya- yang letak rumahnya jauh dari Masjid Agung sekaligus nama tempat dimana langgar itu berada.

Kaitannya dengan keterbukaan pada pola rekrutmen struktur Tafsir Anom maka komposisi *Ketib* (struktur ulama yang bertugas memberikan khutbah setiap hari Jum'at di masjid Agung) pun berubah. Sekarang dominasi penyampai materi khutbah pada setiap hari Jum'at di Masjid Agung, kebanyakan bukan merupakan bagian dari struktur Tafsir Anom dan rata-rata berasal dari luar Kauman. Bahkan struktur itupun sekarang berubah menjadi struktur yang lebih baku yaitu pengurus Masjid Agung, yang secara otomatis semakin membuka kemungkinan lebih besar bagi orang yang non kekerabatan dengan *Abdi Dalem Pamethakan* untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Masjid Agung. Sebagai sebuah gambaran tentang perubahan tersebut, seorang informan menyampaikan tentang apa yang di dalamnya terkait dengan kewajibannya dalam menyampaikan materi keagamaan sebagai berikut :

' Sejak saya datang (beliau berasal dari Purbalingga) awal tahun 70-an, sampai sekarang saya masih diminta untuk mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan di Masjid Agung '.

Dan kondisi tersebut menguat selepas kemerdekaan bangsa Indonesia, dimana terjadi pendistribusian masyarakat secara luas dan intens ke tempat-tempat yang memberi lebih banyak jaminan kehidupan.

c. Status Sosial

Komposisi di atas ini, menegaskan pada kita semakin kompleksnya orang yang terlibat dalam aktivitas keagamaan di Masjid Agung. Yang mana Masjid

Agung adalah simbol dari sebuah budaya yang menempatkan mereka yang punya pemahaman agama dan mempunyai garis keterunan dengan kerabat keraton ataupun mereka yang mempunyai tali kekerabatan dengan mereka yang menjadi *Abdi Dalem Pametakhan*, ditempatkan pada satu status sosial yang tinggi. Hal ini relevan dengan karakteristik kerajaan pasca Demak yang menempatkan agama menjadi salah satu pilar kekuasaannya.

Namun efek dari pola rekrutmen yang berubah dan terbukanya struktur keagamaan orang-orang yang menjadi penggiat keagamaan di Masjid Agung dan Kauman, mulai surut statusnya. Situasi ini terasakan sekali, seperti apa yang disampaikan oleh seorang informan terkait dengan status sosial Tafsir Anom :

‘Kalau dulu Tafsir Anom itu digaji dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Namun sekarang jabatan itu terasa biasa saja. Tanpa gaji, tanpa penghargaan, ya biasa saja. Lha, saya sendiri memang awalnya orang biasa’

Artinya memang ada yang berubah dari cara pandang masyarakat secara luas terhadap status mereka yang menjadi *Abdi Dalem Pametakhan*. Bahkan dalam situasi yang paling akhir yang peneliti temukan adalah digusurnya semua bangunan yang berada di depan Masjid Agung, dalam rangka penataan dan perbaikan lingkungan kota. Dan salah satu bangunan yang digusur adalah rumah tinggal Bapak M. Dasuki. Beliau yang secara simbolis adalah wakil dari keraton dalam bidang keagamaan dan bertanggung jawab atas Masjid Agung dan lingkungan Kauman, kini harus tinggal di luar Kauman.

Dalam keseharianpun tak tampak, ada semacam perilaku yang membedakan mereka yang menjadi *Abdi Dalem Pametakhan* dengan warga biasa kecuali hanya tampak dari aktivitas keagamaan mereka yang lebih intens ketimbang mereka yang bukan menjadi *Abdi Dalem Pametakhan*. Tapi itupun tidak dalam konteks, mereka yang menjadi keturunannya. Sekarang yang ada hanyalah, penghargaan atas mereka yang taat beribadah tanpa harus melihatnya sebagai keturunan abdi dalem atau bukan. Sejauh kemudian ada individu-individu mempunyai kepaahaman dalam bidang keagamaan dan intens melaksanakannya maka tanpa harus melihatnya sejarah keturunannya, secara otomatis derajat penghargaan orang akan berbeda dengan orang lain. Status sosial akan diwujudkan dalam bentuk penghargaan yang sifatnya abstrak namun terasakan dalam bentuk interaksi sehari-hari.

Kini mereka yang menjadi keturunan *Abdi Dalem Pametakhan* menjadi bagian dari masyarakat biasa yang dalam keseharian perilakunya, tidak harus mencerminkan sebuah perilaku yang khas (agamis). Dan apa yang peneliti rasakan terhadap status sosial yang tinggi, mungkin hanya masih berlaku pada mereka yang menjadi *Abdi Dalem Pametakhan* namun bukan dalam kerangka bahwa mereka adalah abdi dalem keraton namun lebih didasarkan atas pemahaman keagamaan mereka yang lebih baik dari pada warga yang lain. Artinya, bagi mereka yang menjadi *Abdi Dalem Pametakhan* kini mulai tanggal satu bentuk penghargaan masyarakat secara luas kepada mereka sebagai abdi dalem keraton dalam bidang keagamaan. Namun tetap menyisa-

kan bentuk pengharagaan oleh masyarakat dalam standard yang berbeda -tapi dulu juga pernah ada- yaitu penghargaan atas dasar kefahaman agama sekaligus tauladan dalam pelaksanaan praktek keagamaan tersebut. Konsekuensinya adalah terbukanya bentuk penghargaan (dengan dasar ini) kepada orang lain tanpa harus memperhatikan status yang diberikan oleh keraton.

## 2. Pola Pemenuhan Kebutuhan Hidup Baru

Mengenai keberadaan Kauman dari sejak awal tidak bisa dilepaskan dari keberadaan keraton, yang memang sedari awal menempatkan Kauman dalam sebuah bingkai sistem sosial-nya. Dimana keraton dijadikan muara dari sistem sosial yang menempatkan Kauman menjadi salah satu sub sistem yang dikembangkan oleh keraton. Dalam bingkai sistem sosial tersebut, realitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga menjadi salah satu bagian yang disediakan oleh keraton.

### a. Habisnya Patron-klien

Kauman yang menjadi disalah satu sub sistem dari kebudayaan keraton juga disediakan perangkat pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Jadi masyarakat Kauman sebagai bagian dari salah satu abdi dalem maka keraton pun tak lepas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pola pemenuhan kebutuhan ekonomis masyarakat Kauman (dengan posisinya sebagai *Abdi Dalem Pame-thakan*) pada awalnya memang dipenuhi oleh keraton. Dengan sistem gaji yang ada dan sudah berkembang seiring dengan perkembangan berbagai pola ekonomi modern, sebagai akibat dari ekspansi kolonial. Keraton

pun tak luput untuk mengadopsi pola tersebut. Dalam sebuah penjelasan yang disampaikan oleh seorang informan, beliau menjelaskan :

‘ Kalau dulu, semua abdi dalem itu mendapatkan gaji dari keraton ... Dan mereka juga mendapatkan jaminan hidup dari keraton, yang salah satunya adalah hak untuk menempati tanah yang ada di sekitar Masjid Agung ‘.

Dari penjelasan tersebut, tampak betapa ketergantungan secara ekonomis masyarakat Kauman dengan keraton sangat tinggi. Namun hal tersebut bukan berarti menempatkan Kauman dalam sebuah posisi yang lemah ketika harus berhadapan dengan keraton. Sebab konsepsi tentang Kauman sendiri juga tidak bisa lepas dari eksistensi kekuasaan keraton.

Kondisi tersebut bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama hingga kemudian dinamika masyarakat tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi yang berakibat ada banyak ruang kehidupan manusia. Perubahan pada ruang-ruang teknologi ini tidak bisa lepas dari apa yang dilakukan oleh kaum kolonial yang mulai mengembangkan ekonomi ‘baru’ dalam bentuk perdagangan. Pola ekonomi ini tampak sangat dinamis seiring dengan perkembangan dan semakin beragamnya kebutuhan yang disediakan dalam pasar.

Akibat paling awal dari sistem ekonomi ini adalah semakin beragamnya tingkat kebutuhan masyarakat secara luas. Kauman juga tidak bisa lepas dari apa yang terjadi disekelilingnya maka berbagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin hari-semakin ber-

kembang tanpa ada jalan keluar untuk memenuhinya. Sebab Kraton sendiri tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan tersebut maka melakukan aktivitas yang sifatnya produktif menjadi pilihan awal untuk kemudian menyelesaikan masalah yang menjadi bagian dari apa yang mereka inginkan sebelumnya.

Batik adalah alternatif yang paling memungkinkan bagi mereka. Dengan pola pembagian kerja yang menempatkan para suami pada tempat-tempat publik, dalam bentuk mengajar materi agama, menjadi bagian dari struktur kekuasaan tradisional hingga tugas-tugas keagamaan. Pada akhirnya memungkinkan bagi para suami untuk hanya bekerja pada aktivitas tersebut, secara terus menerus. Kondisi pembagian kerja ini, berbeda dengan apa yang dialami oleh kaum wanita yang ditempatkan pada sektor domestik yang memungkinkan mereka untuk mempunyai waktu luang dalam jumlah yang sangat banyak untuk menghasilkan aktivitas produktif. Dan ketrampilan batik yang mereka peroleh lewat media pembelajaran antara sesama kerabat dan awalnya memang berasal dari kerabat kebangsawanan keraton. Dan pada perkembangannya, ketrampilan tersebut secara intensif dikembangkan oleh para kaum perempuan yang menjadi suami para *Abdi Dalem Pametakhan*. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena para bangsawan mempunyai ketrampilan membatik sekedar bagian dari sistem apresiasi mereka terhadap budaya keraton semata tapi tidak dengan para istri *Abdi Dalem Pametakhan*.

Dengan mengembangkan ketrampilan ini, sebagian besar warga Kauman, terutama para istri *Abdi Dalem*

*Pemethakan* mampu tidak sekedar menghasilkan dalam bentuk batik dalam jumlah satu dua atau tiga namun dalam jumlah yang banyak. Dan ditambah lagi dengan pola kekerabatan yang mereka miliki pada akhirnya mampu mengakumulasi jumlah produksi sebanyak mungkin untuk kemudian dikomersilkan. Fase pengkomersilan tersebut secara bertahap berawal dari transaksi-transaksi kecil ataupun sekedar proses jual beli yang lebih menekankan bentuk hubungan kekerabatan antara mereka yang tinggal di Kauman dengan mereka yang tinggal di luar Kauman. Yang pada akhirnya menuntut adanya peningkatan dalam hal produksi.

Dari adanya tuntutan akan produktivitas inilah kemudian mengawali bangunan kemandirian secara ekonomi sebagian besar warga Kauman, terutrama istri dari para *Abdi Dalem Pametakhan*.

b. Ekonomi mandiri

Tuntutan akan produktivitas batik yang semakin banyak, akhirnya menggeser semangat pembuatannya. Dari sekedar mengisi waktu luang dan melakukan aktivitas dalam ruang domestik menjadi semangat pemenuhan terhadap meningkatnya kebutuhan yang ada dan berkembangnya secara sekaligus. Dari sini pulalah pergeseran gerak sosial para istri dari para *Abdi Dalem Pametakhan* ke sektor publik baru yaitu berdagang.

Dengan berdagang, mereka yang menjadi istri *Abdi Dalem Pamethakan* mampu menghasilkan aktivitas ekonomi yang menguntungkan dan mampu memberi penghasilan tambahan bagi keuangan keluarga mereka. Perdagangan batik yang bermula dari pola-pola transaksi

kecil kemudian mulai meluas, yang murni penuh dengan semangat berdagang dan transaksi kemudian meluas antar daerah hingga keluar daerah.

Semakin hari kondisi perdagangan mereka ternyata memberi jaminan secara ekonomi lebih baik dari pada apa yang diberikan keraton sebagai bentuk kompensasi mereka sebagai abdi dalem. Apalagi dengan semakin pesatnya jaringan perdagangan yang telah mereka miliki, mampu menciptakan pasar yang benar-benar siap menerima produktivitas yang semakin hari-semakin meningkat. Peningkatan produktivitas tersebut juga bermula dari semakin besarnya permintaan di pasar dan mulai masuknya tenaga kerja dari luar Kauman untuk menjadi tenaga kerja murni, yang dipekerjakan oleh para istri *Abdi Dalem Pametakhan*. Dengan kedatangan sumber daya manusia dari luar Kauman, menjadikan pergeseran berikutnya yang dialami oleh istri para abdi dalem ini menjadi pihak yang bekerja secara produktif yang kemudian digantikan oleh mereka yang sengaja didatangkan menjadi pihak pengelola usaha ini. Mereka menjadi pemilik dari usaha yang ada sekaligus pemodal dan yang mengembangkan usaha ini keluar.

Input ekonomis ini, pada akhirnya mampu menutup kebutuhan yang ada bahkan pada beberapa kasus tertentu menjadikan apa-apa yang mereka peroleh dari keraton sebatas penghargaan yang musti mereka jaga dan bukan lagi sesuatu yang benar-benar mereka jadikan sumber pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. Inilah awal kemandirian yang dimiliki oleh para *Abdi Dalem Pametakhan* dan secara tidak langsung telah me-

mutus hubungan secara ekonomis dengan keraton sebagai sumber pemenuhan kebutuhan ekonomi yang telah berjalan sebelumnya.

Proses ini kemudian berkembang dan mengalami puncaknya ketika jaringan pasar yang ada telah berkembang hingga luas dan pada saat yang bersamaan tuntutan akan adanya peningkatan terhadap produktivitas mampu merekaenuhi dengan mendatangkan alat-alat produksi dalam bentuk mesin. Produktivitas yang dihasilkan kemudian menjadi sebuah industri baru yang mempunyai banyak kelebihan. Baik itu dari penggunaan tenaga kerja, penghematan dari sisi waktu hingga peningkatan hasil dalam jumlah yang semakin banyak. Penjelasan dari seorang informan yang keluarganya dulu mengembangkan batik namun kemudian bangkrut secara bertahap, yaitu informan yang menegaskan :

'Kedatangan mesin batik pada awalnya menguntungkan Mas, karena produksi bisa ditekan. Namun sayang ternyata para pemilik (mesin tersebut) ternyata kebanyakan bukan mereka yang berasal dari Kauman. Tapi para pendatang yang telah mulai memenuhi Kauman untuk ikut menanamkan modal di Kauman. Apalagi ketika beberapa daerah di luar Kauman (terutama Laweyan) juga mampu menghasilkan batik dan juga mempunyai pasar sendiri. Maka semakin lengkap-lah penyebab kehancuran batik Kauman, disamping minat dari generasi mudanya terhadap batik juga tidak ada, ya sudah ... '

Menurutnya batik tulis (tradisional) yang sebelumnya dikuasai oleh para istri abdi dalem, oleh pertumbuhan industri batik baru yang menggunakan

mesin menyebabkan perubahan pada orientasi produktivitas batik tersebut. Batik yang asal mulanya adalah bagian dari sistem simbolis kebudayaan yang hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang kemudian menjadi sebuah industri dengan mengabaikan apa-apa yang menjadi sistem nilai di dalamnya. Batik kemudian mulai kehilangan ruang pemaknaan bagi para warga Kauman yang mempunyai ketrampilan batik dan berdagang, menjadi sekadar batik yang mempunyai orientasi pasar murni.

Semangat simbolis yang telah hilang pada akhirnya menjadikan terbatasnya sosialisasi tradisi batik bagi generasi muda Kauman. Yang ada sekarang hanya tinggal sedikit, dan mereka yang dulunya menyandarkan kebutuhan hidupnya pada batik kemudian mulai bergeser pada alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari. Dan itu bersamaan dengan mulai menyurutnya pengaruh keraton, yang salah satunya adalah tidak lagi memberi kompensasi secara ekonomis kepada sebagian besar para abdi dalemnya. Moment inipun bersamaan dengan semakin berkembangnya pola ekonomi modern, dimana pasar hingga aktivitas pekerjaan lain memberikan jaminan yang sama yaitu penghasilan ekonomi. Maka yang terjadi kemudian adalah pergeseran pemenuhan kebutuhan sebagian besar warga Kauman dengan bekerja pada semua bidang kehidupan. Dari kondisi paling akhir, yang peneliti dapatkan di Kauman kaitannya dengan pekerjaan warga Kauman secara luas adalah sebagai berikut, sebagian kecil dari warga Kauman menjadi pengusaha, beberapa diantaranya masih bertahan untuk

mengembangkan batik. Sebagian besar yang lain tersebar dalam aktivitas berdagang, Pegawai Negeri Sipil atau buruh bangunan. Dan sisanya tersebar pada sektor-sektor non formal (lihat tabel 3). Kondisi ini tentunya bermula dari adanya pendidikan yang cukup sehingga pekerjaan formal menjadi pilihan utama. Sedangkan perdagangan sebagai salah satu alternatif berawal dari pengembangan Kauman sendiri yang strategis serta berkembang seiring dengan pengembangan wilayah sekitar Kauman menjadi daerah produktif dan persebaran penduduk yang tak teridentifikasi merupakan daya dukung dari sektor perdagangan tersebut. Namun tetap yang menjadi kekhasan penduduk Kauman juga tetap ada, yaitu berdagang kebutuhan-kebutuhan keagamaan dimana mereka menjalankannya secara turun temurun.

Paparan tersebut tentunya sudah memetakan warga Kauman secara keseluruhan. Artinya bukan sekedar mereka yang menjadi kerabat dari *Abdi Dalem Pametakh-an* saja namun secara luas yaitu mereka yang telah mempunyai tanda pengenal atau menjadi warga dari Kelurahan Kauman.

### **3. Bergesernya Perangkat Nilai dan Tata Nilai**

Dalam setiap kebudayaan akan hadir berbagai bentuk dan pola perilaku dalam masyarakatnya, yang berusaha menggambarkan bagaimana kebudayaan yang ada dan berlaku. Karena pada dasarnya kebudayaan adalah bentuk yang dinamis yang senantiasa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan setiap proses dari penerusan nilai-nilai kebudayaan tersebut adalah bagian dari sistem dalam kebudayaan yang ada. Nilai yang telah diwaris-

kan akan menjadi standart perilaku bagi masyarakat untuk mengembangkan kebudayaannya. Baik dalam sistem normatif hingga berbagai bentuk organisasi yang dibutuhkan sebagai alat pemenuhan kebutuhan mereka sebagai masyarakat dan setiap perangkat kebudayaan yang melahirkan nilai (yang kemudian dijadikan standart) akan selalu mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan masyarakat sendiri dan perkembangan berbagai kebutuhan yang menyertainya.

Jadi pada tiap kebudayaan, akan ada bentuknya yang sesuai dengan karakter masyarakat yang ada sehingga akan didapatkan sebuah kejelasan bahwa setiap masyarakat (pada kurun waktu tertentu) akan melahirkan berbagai bentuk kebudayaan yang berbeda-beda. Karena tiap bingkai masyarakat akan mempunyai kerangka nilai yang berbeda, oleh sebab perangkat kebudayaan yang berbeda pula.

a. Memudarnya Tradisi Lama

Keraton Surakarta dalam gambaran akan eksistensinya, yang mempunyai banyak sandaran kekuasaan. Di samping Masjid Agung, Alun-alun hingga benteng yang mengelilingi keraton, juga mempunyai perangkat pendidikan dan kaitannya dengan Kauman sebagai bagian dari pilar kekuasaan kemudian konsepsi Islam yang ter-elaborasi dalam kekuasaan maka perangkat pendidikan yang ada-pun menghadirkan dua hal tersebut secara bersamaan. Pendidikan kemudian menjadi bagian dari alat untuk meng-eksiskan bentuk kebudayaan yang mereka inginkan.

Wujud dari pendidikan itu sendiri kemudian hadir di Kauman dalam sebuah konstruksi yang integral dengan Masjid Agung. Masjid Agung yang menjadi tem-

pat pelaksanaan ibadah keagamaan juga tidak meninggalkan begitu saja tugasnya untuk melakukan sebuah proses pendidikan. Pendidikan dalam kerangkanya untuk melakukan sebuah transformasi nilai dari satu waktu ke waktu yang lain. Dan dalam kepentingannya itu, disamping Masjid Agung, keraton mendirikan tempat pendidikan keagamaan dengan nama *Mamba'ul 'Ulum* (yang berarti tempatnya ilmu). Di sini para *Abdi Dalem Pametakhan* dan keturunannya di didik untuk memahami agama Islam sebagai sebuah nilai untuk kemudian mereka dijadikan sebagai sandaran dalam perilaku oleh anggota masyarakat yang lain. Para abdi dalem tersebut kemudian menjadi sumber daya dalam semua aktivitas keagamaan yang diadakan oleh keraton dalam bentuk ritual keagamaan ataupun dalam ritual kebudayaan. Disamping mereka juga berfungsi sebagai individu-individu yang dijadikan tauladan (contoh) dalam perilakunya bagi masyarakat secara luas. Dari situlah nilai-nilai keagamaan ditransformasikan ke dalam perilaku sehari-sehari dalam masyarakat Kauman karena memang mereka adalah bagian dari masyarakat keraton yang berfungsi mengkonstruksi kekuasaan yang berorientasikan pada nilai-nilai keislaman disamping kemudian mengembangkan semangat kebudayaan yang diinginkan oleh keraton sebagai satu sistem kebudayaan.

Di samping juga sistem pendidikan yang dikembangkan dalam aktivitas pengajaran yang dilakukan di rumah-rumah dimana para abdi dalem tersebut tinggal. Dalam sistem pendidikan ini kemudian mereka mengajarkan materi keagamaan seperti belajar membaca Al-Qur'an (kitab suci dalam agama Islam), Fiqh (masa-

lah-masalah kegiatan keagamaan sehari-hari) hingga materi Ahlaq (perilaku dalam standart keagamaan kaitannya dengan hubungannya dengan orang lain). Proses pendidikan ini berjalan dalam keseharian masyarakat Kauman sehingga efek dari kedua pola pendidikan ini, terbangun satu pola interaksi masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai keagamaan -yang dalam hal ini menghadirkan semangat keIslaman- dan situasi ini berjalan dalam kemapanannya sampai kemudian negara hadir di Kauman.

Kehadiran negara kemudian mengubah pola pendidikan yang ada dengan pola pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Pendidikan yang dikembangkan negara kemudian hadir dalam berbagai bentuk, sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. Kini di Kauman tempat pendidikan *Mamba'ul 'Ulum* sudah ditutup digantikan dengan pendidikan yang dibuat oleh negara yaitu Madrasah Aliyah Negeri I (semacam SMU namun bernaung di bawah Dep. Agama) dan itu berarti sistem pendidikan tradisional yang tercermin dalam pendidikan yang dikembangkan lewat *Mamba'ul 'Ulum*. Sekarang pola pendidikan menjadi pola pendidikan yang formal dimana anak-anak harus memulai jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak lalu Sekolah Dasar kemudian mereka melanjutkannya di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan masuk ke Sekolah Menengah Umum baru kemudian mengakhirinya di Perguruan Tinggi. Hampir sebagian besar warga Kauman secara umum mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi (lihat tabel 2). Mereka biasanya mengambil pendidikan formal

tersebut sebagai sebuah kewajiban untuk bisa bersaing dan meraih masa depan yang dicita-citakan.

Di samping pendidikan formal tersebut juga terdapat bentuk pendidikan non-formal yang masih dikembangkan di Kauman. Dan untuk pendidikan non-formal tersebut lebih memberi penekanan pada materi-materi keagamaan, biasanya dalam bentuk :

- ☞ Dengan mengambil pola pengajaran berupa pengajian-pengajian dirumah-rumah dalam bentuk giliran dengan mengambil materi membaca Al-Quran, yang biasanya diikuti oleh kaum perempuan.
- ☞ Pendidikan yang diadakan di langgar berupa materi keagamaan dengan materi yang lebih beragam, dengan peserta yang lebih beragam pula. Biasanya tiap langgar akan mempunyai kebiasaannya sendiri-sendiri.
- ☞ Pendidikan dengan materi-materi keagamaan yang diselenggarakan oleh Masjid Agung dalam bentuk pengajian yang sifatnya terbatas seperti kuliah ba'da Subuh (sekitar jam 05.00-06.00 wib) atau ba'da Dhuhur (jam 12.30-13.30 wib) bertempat di teras Masjid Agung. Tapi untuk peserta pengajian tersebut kebanyakan malah bukan warga Kauman, kalau dalam kajian ba'da Subuh biasanya mereka yang ikut adalah anak-anak pesantren yang letaknya di Masjid Agung sedangkan pada saat kajian ba'da Dhuhur kebanyakan yang mengikutinya malah mereka yang sedang beristirahat di teras Masjid Agung dan kebanyakan mereka adalah pedagang di pasar Klewer.

### *Dudarnya Kauman*

- ☞ Pendidikan keagamaan untuk anak-anak mengambil waktu sore hari, dengan materi membaca Al-Quran dan berbagai materi tentang dunia anak-anak, yang diselenggarakan di langgar yang ada.
- ☞ Kemudian untuk mereka yang masih berusia remaja biasanya tergabung dalam akaivitas keagamaan yang diselenggarakan oleh masing-masing langgar.

Ditambah dengan pondok pesantren *Tahfidh Wa'taklimil*, tempat dimana mereka secara serius menuntut ilmu keagamaan dan tinggal di tempat tersebut dalam jangka waktu yang relatif lama. Namun semua santri yang ada dan para pengajar di pondok pesantren tersebut bukan berasal dari Kauman.

Kesemua pola itu sampai sekarang tetap berjalan sekalipun kemudian dalam banyak kasus, peneliti menemukan banyak fakta bahwa partisipasi masyarakat Kauman dalam semua aktivitas tersebut sangat minim. Artinya minimnya partisipasi tersebut diukur dengan keikutsertaan mereka yang ikut dengan jumlah mereka yang ada dan tinggal di sekitar tempat-tempat kegiatan pendidikan keagamaan tersebut diselenggarakan.

#### b. Orientasi Nilai Baru

Dalam hal ini, nilai-nilai adalah salah satu bentuk kesepakatan yang menjadi komitmen individu dalam hidupnya bermasyarakat. Dan kerangka nilai yang dulu dijadikan standart oleh para *Abdi Dalem Pametakhan* adalah pelaksanaan semua hukum Islam sebaik mungkin karena mereka adalah orang-orang yang menjadi figur bagi masyarakat secara luas. Di samping itu juga pengadopsian terhadap nilai-nilai tradisi,

menempatkan mereka pada satu bangunan kebudayaan yang khas. Yang tertutup, agamis dengan status yang mapan baik secara ekonomis hingga sosial.

Tapi dari apa yang peneliti temukan, kebanyakan mereka yang sekarang menjadi *Abdi Dalem Pametakhan*, pada dasarnya tetap menempatkan agama Islam sebagai sebuah standart nilai namun dalam relevansinya dengan berbagai tuntutan dan perkembangan berbagai hal yang ada, kaitannya dengan keberadaan mereka maka tradisi yang sebelumnya mutlak menjadi hal yang urgent kini mulai perlahan ditinggalkan sedikit demi sedikit. Mulai dari rekrutmen anggota keluarga yang tidak lagi didasarkan atas standart yang dulu pernah dijadikan tolak ukur dalam menentukan seseorang untuk menjadi bagian dari sistem kekerabatan yang ada, kini mulai terasa longgar. Ataupun dalam dimensi pendidikan, ketika hampir semua keturunan mereka belajar dan bekerja di tempat-tempat umum -yang jauh dari nuansa tradisi- menjadi pilihan-pilihan utama. Hingga acara-acara yang bernilai budaya, kini tidak begitu menarik bagi mereka.

Artinya ada yang bergeser dari pola pendidikan dulu dengan sekarang, dimana dulu pendidikan merupakan bagian dari sistem nilai yang dikembangkan dan berlaku pada saat itu yaitu nilai-nilai keagamaan dan semangat menjunjung tinggi tradisi pada akhirnya menghasilkan satu bangunan karakter masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi dan semangat keagamaan yang tinggi. Namun dengan perubahan perangkat pendidikan tersebut maka berubah pula pola kerangka nilai yang ada dan yang berlaku. Kini semangat yang

menunjukkan kecendrungan tradisi mulai ditinggalkan sangat terasa, di samping juga berbagai bentuk nilai dalam kaitannya dengan pola kehidupan sehari-hari, dimana mereka dihadapkan pada banyaknya tuntutan ekonomis yang membuat mereka meletakkan kebutuhan ekonomi menjadi sebuah prioritas dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai contoh untuk menunjukkan mulai tertinggalnya nilai-nilai tradisi adalah sebuah komparasi kegiatan. Yang satu kegiatan yang diselenggarakan oleh keraton yaitu pengajian malam *Rabo-pahing* tiap bulan, dalam rangka memperingati perpindahan keraton dari Kartasura ke Surakarta hanya diikuti oleh sebagian kecil abdi dalem yang masih aktif dalam lingkungan keraton, beberapa keturunan dan kerabat keraton (bangsawan). Kegiatan yang sebenarnya ditujukan pada masyarakat luas dan diisi oleh Tafsir Anom adalah bentuk pendidikan kepada masyarakat (utamanya kerabat keraton dan abdi dalem) tentang relasi agama dan budaya (dalam bentuk menyimak bacaan Al-Qur'an, dzikir-tahlil dan kajian kebudayaan), yang diselenggarakan dalam lingkungan keraton, tepatnya bangsal *Semorokoto*. Namun keturunan *Abdi Dalem Pametakhan* pun tidak ada yang berminat untuk mengikutinya, begitu juga dengan warga Kauman yang lain. Berbeda situasinya dengan apa yang peneliti alami ketika masyarakat Kauman memperingati hari Kemerdekaan Indonesia yang berjalan semalam suntuk dengan berbagai hiburan setelah sebelumnya diisi oleh banyak kegiatan, mereka secara kolektif bersama-sama memeriahkan malam peringatan tersebut. Acara malam *Agustus-an* ke-

mudian menjadi satu ajang kebersamaan diantara warga dengan aparat Kelurahan yang berkeliling mengunjungi setiap tempat di Kauman yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Negara sebagai kekuatan yang datang di kemudian hari selepas keraton mulai surut kekuasaannya telah mampu menggeser orientasi dan pemaknaan akan nilai tradisi dan nilai-nilai baru yang mereka ajarkan lewat pola pendidikan yang ada. Di samping itu, misalnya nilai baru akan berbagai bentuk hubungan sosial yang ada didalam masyarakat Kauman. Negara hadir dengan mengubah pola pemenuhan kebutuhan ekonomi yang pada akhirnya merubah Kauman secara fisik dan non fisik, yang pada akhirnya mampu merubah Kauman yang dulu dikenal agamis dengan kekerabatan yang tinggi, untuk berubah menjadi masyarakat yang menunjukkan kecendrungan yang tidak sama dengan masa lalu dan mengembangkan pola interaksi yang terbatas dalam sekat-sekat sosial yang menjadikan mereka lebih individualistik, dan itulah mungkin yang dikategorikan sebagai ciri dari masyarakat yang modern.

c. Bergesernya Cita-cita

Kaitanya dengan perubahan pada perangkat pendidikan yang ada, yang berarti pula merubah kerangka nilai yang ada dan berlaku pada masyarakat Kauman sebelumnya. Kalau dulu setiap keturunan *Abdi Dalem Pamtekahan* akan bercita-cita menjadi bagian dari sistem yang ada dan itu berarti mereka akan sama menjadi abdi dalem sama seperti generasi mereka yang telah menjadi abdi dalem. Maka sekarang yang ada adalah

perubahan yang sangat mendasar dimana abdi dalem atau menjadi bagian dari sistem tradisi lama, bukanlah hal menarik lagi. Dalam satu wawancara, seorang informan menyampaikan :

‘Mas,... saya sebenarnya orang ‘biasa’ jadi nggak kepikir untuk menjadi abdi dalem keraton. Kalau-pun sekarang saya menjadi Tafsir Anom-pun setelah saya pensiun dari departemen Agama ...’

Dan fakta yang hampir sama dengan apa yang terurai di atas adalah, hampir semua keturunan dari mereka yang kini menjadi Tafsir Anom dan menjadi bagian dari struktur tersebut, kesemuanya mengambil pendidikan modern sebagai satu-satunya pilihan. Mereka biasanya menagmbil pendidikan umum tersebut sebagai wujud dari tuntutan yang berbeda dengan apa yang pernah dicita-citakan oleh masyarakat Kauman sebelumnya. Kini kebanyakan keturunan dari para abdi dalem tersebut selepas mengambil pendidikan umum maka mereka akan memilih pekerjaan umum (di luar bingkai abdi dalem) bahkan dalam banyak kasus juga mereka kini tinggal diluar Kauman dengan beberapa alasan tertentu.

Ditambah dengan sudah tidak adanya lagi hubungan dengan keraton baik secara kultural ataupun hubungan hirarkis secara langsung, bagi warga Kauman ternyata memberi dampak bagi mereka dalam membangun imajinasi mereka tentang masa depannya. Masyarakat Kauman kini, lebih memilih pekerjaan dalam kepentingannya mencari kemakmuran dalam bidang ekonomi dan mengabaikan apa-apa yang pernah dibangga-

banggakan dalam masa lalu Kauman, yang penuh dengan nilai-nilai tradisi dan sangat keagamaan.

#### **4. Realitas Sosial Baru**

Dalam konteks realitas sosial ini, peneliti melihatnya dalam beberapa dimensi yang akan menunjukkan beberapa perubahan yang terjadi pada realitas struktur kekuasaan yang terdapat di Kauman. Kaitannya dengan struktur sosial, dimana Kauman dalam konstruksi awalnya mempunyai bangunan struktur yang khas, yang dalam prosesnya dikondisikan untuk tetap stabil. Kestabilan tentu tidak bisa lepas dari kondisi yang menguntungkan bagi mereka yang ada di dalamnya. Dan setiap upaya yang dilakukan adalah upaya untuk mempertahankan kestabilan tersebut.

Realitas sosial yang terbangun dan ada, merupakan sebuah realitas yang hadir oleh sebab proses kebudayaan yang ada pada masa itu. Begitu pula, terminologi perubahan juga bagian dari sebuah proses kebudayaan yang sedang dan akan berjalan terus menerus. Relevansinya dengan Kauman adalah adanya perubahan yang memang tidak bisa diabaikan dimana kebutuhan masyarakat mengalami kemajuannya dan berbagai perangkat kebudayaan yang ada kemudian akan melakukan penyesuaian atas berbagai tuntutan yang ada, dan ketidak mampuan dalam memenuhi tuntutan yang ada akan berarti menghasilkan proses pergantian berbagai perangkat kebudayaan tersebut dengan yang lain. Begitu juga dengan realitas sosial yang ada, yang akan terus berubah karena perubahan itu sendiri dalam konteks sosial adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari.

a. Pergeseran Otoritas

Keraton Surakarta Hadiningrat, ketika mulai memerintah dari tempat barunya yaitu daerah Sala. Agenda yang pertama dibangun salah satunya adalah Masjid Agung yang menjadi bagian dari konsepsi kekuasaan yang dimiliki oleh keraton dengan menempatkan Masjid Agung disekitar keraton adalah salah bentuk representasi hadirnya kekuatan agama dalam menegakkan pilar kekuasaan sekaligus pemenuhan terhadap perangkat keagamaan bagi masyarakat secara luas.

Masjid Agung-pun tak lepas dari sebuah proses pemeliharaan, yang mana tanggung jawab ini dibebankan kepada para *Abdi Dalem Pametakhan* yang dibawah langsung oleh *Reh Pengulon*. Dengan menempatkan para *Abdi Dalem Pamethakan* menjadi penanggung jawab terhadap Masjid Agung dan pemeliharaannya maka Kraton juga menyediakan tempat tinggal yaitu berupa lahan untuk ditempati para abdi dalem tersebut. Mereka tinggal di sekitar Masjid Agung dan membangun konstruksi sosialnya sendiri. Konstruksi sosial yang mereka bangun merupakan sebuah realitas yang secara politis berada di bawah otoritas keraton secara langsung. Dengan menempatkan keraton sebagai pusat kekuasaan yang memberikan segala bentuk jaminan dari adanya kekuasaan tersebut, berarti akan adanya sebuah bentuk penghambaan atau pengabdian yang mesti diberikan oleh mereka selaku abdi dalem. Karena semua bentuk nilai yang ada akan bermula dari keraton sebagai sebuah sumber kebenaran yang menjadi sandaran bagi bentuk-bentuk perilaku kebudayaan sehari-hari. Dengan pola tersebut Kauman kemudian berkembang

dalam sebuah konstruksi sosial yang khas yaitu masyarakat yang secara sosial menempatkan keraton menjadi patron dalam semua bentuk kebudayaannya.

Namun seiring dengan berbagai dinamika yang meliputi sejarah keraton sendiri dalam banyak hal dan kaitannya dengan berbagai bentuk perubahan orientasi politik masyarakat kita secara keseluruhan, maka gerak perubahan mengambil jalan baru yaitu pendirian negara sebagai salah satu bentuk kemerdekaan dari penjajahan. Dengan semangat yang sangat nasionalistik dan heroik perjuangan dari agenda dari perubahan tersebut adalah penegakkan negara. Negara yang secara simbolis adalah bentuk kekuasaan modern seiring dengan perubahan pola pikir masyarakat secara luas. Hingga puncak dari gerak perubahan itu adalah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan mungkin bagi sebagian orang bisa berarti kebebasan dan itu berarti selama ini, mereka ada dalam sebuah ketertindasan (oleh penjajah). Namun bagi mereka yang selama ini mempunyai otoritas, maka kemerdekaan bisa berarti lain, karena dengan kemerdekaan berarti akan lahir sebuah bentuk kekuasaan baru dan itu berarti akan melahirkan resistensi terhadap kemerdekaan tersebut. Karena yang akan terjadi kemudian adalah kehadiran negara mau tidak mau akan meminggirkan kekuasaan lama yang sedang mengalami berbagai kemerosotan.

Kauman sebagai salah satu bagian dari kebudayaan masa lalu juga tidak lepas dampak perubahan otoritas ini. Kauman yang dulu pola kepemimpinannya terletak pada pola kepemimpinan yang tradisional dan agamis, dengan menempatkan keraton sebagai patron-

nya harus menerima gejala perubahan ini. Sebab kedatangan negara, secara otomatis kemudian merubah pola-pola yang sudah ada sebelumnya. Ekspansi negara memberi dampak dengan menghasilkan bentuk dan pola kepemimpinan baru, dengan dasar-dasar pembentukan yang berbeda. Kini dengan pola kepemimpinan negara, maka letak dasar kepemimpinannya didasarkan pada aspek administratif. Dimana peran para ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga dan perangkat Kelurahan hingga pimpinan Kelurahan menggeser apa yang sebelumnya menjadi sandaran dalam masalah kepemimpinan di Kauman. Padahal mereka dulunya adalah wakil Kraton dalam bidang keagamaan dan sekaligus menjadi wakil kraton juga dalam masyarakat Kauman. Masyarakat Kauman kini meletakkan berbagai masalah yang mereka hadapi dengan menyelesaikannya dengan semua perangkat negara, lewat musyawarah di Rukun Tetangga hingga Kelurahan. *Abdi Dalem Pametakhan* atau keturunannya kemudian hanya menjadi pelengkap bagi perangkat kebudayaan keraton semata-mata namun otoritas kepemimpinannya tidak ada sama sekali dan itu juga berarti memudarnya juga otoritas keraton di masyarakat.

Pada satu kasus lain dampak yang dihadirkan negara yaitu, tentang kepemilikan tanah misalnya. Tanah yang dulu terdapat di kauman adalah tanah yang diberikan kepada mereka sebagai kompensasi atas bentuk pengabdian yang mereka berikan ke keraton. Dan dalam hal ini kepemilikan secara luas kemudian masih menjadi milik keraton karena keraton adalah otoritas satu-satunya yang ada. Tapi setelah negara lahir dan

mengekspansi wilayah kekuasaan keraton, dalam berbagai bentuk, yang salah satunya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 26 Mei 1988 No. 593.82/1957/SJ tentang kepemilikan tanah bekas Swapraja atau kerajaan-kerajaan terdahulu menjadi aset negara dan pengajuan untuk kepemilikan harus mengurus di negara. Secara otomatis keraton kehilangan otoritasnya dalam masalah kepemilikan tanah, demikian juga dengan apa yang terjadi di Kauman, yang mengubah semua kepemilikan tanah kepada negara dan itu berarti membuka jalan orang di luar Kauman untuk masuk ke Kauman karena pengajuan mereka bukan lagi kepada keraton (sebagai *Abdi Dalem Pametakhan*) untuk memiliki tanah di Kauman namun dengan mengajukan kepada negara (sebagai warga negara) untuk memiliki tanah di Kauman. Berbagai norma yang dulu dikonvensikan keraton di Kauman sebagai tata perilaku kemudian luntur seiring dengan berganti pulanya aturan-aturan tersebut ke legalitas formal. Dan dengan terbukanya Kauman bagi setiap orang maka terbuka pulalah perangkat tradisi untuk diikuti atau tidak oleh warga Kauman yang baru. Apalagi kebanyakan mereka, datang dalam dimensi kebudayaan yang lain karena mereka bisa saja beretnis non-Jawa ataupun beragama non-Islam.

b. Terbukanya Sistem Rekrutmen

Dengan pola awal terbentuknya masyarakat Kauman yang mengadopsi semua karakter kebudayaan keraton, menjadikan Kauman berkembang dalam bingkai kebudayaan yang tertutup dan sesuai fungsinya sebagai *Abdi Dalem Pametakhan*, mereka menjadi stan-

dart dalam perilaku masyarakat lain terutama terkait dengan perilaku keagamaan yang mereka kembangkan. Dalam kerangka itulah kemudian Kauman mengembangkan pola rekrutmen yang terbatas dengan meletakkan standart kehidupannya pada agama. Semua bentuk perilaku yang mereka lakukan, mereka coba untuk merefleksikan pemahaman keagamaan mereka. Baik dalam nilai, dalam bentuk perilaku hingga pola rekrutmen kekeluargaan yang mereka kembangkan tak lepas dari standart tersebut.

Dengan pola itu, masyarakat yang ada dan berkembang di Kauman adalah masyarakat yang menjadi *Abdi Dalem Pametakhan*. Dan itu berarti hanya ada individu-individu yang paham agama untuk kemudian bisa menjadi bagian dari sistem sosial yang di Kauman. Bagi mereka yang telah menjadi bagian dari pola tersebut, kemudian akan mengembangkannya dalam bentuk perkawinan antar keturunan (*endogen*) sehingga perkembangan hubungan kekerabatan tetap terbatas pada sejumlah individu-individu yang ada. Hal itu terasa wajar apabila terkait dengan apa yang menjadi kompensasi yang mereka terima baik itu dari keraton ataupun yang mereka dapatkan dari masyarakat secara luas, entah dalam bentuk *privelege*, status sosial yang tinggi hingga penghargaan dalam bentuk materi. Sehingga kondisi dari kestabilan itu, dirasa penting untuk dijaga.

Namun seiring dengan berbagai tuntutan akan kebutuhan ekonomi yang meningkat, memaksa mereka untuk mengembangkan ketrampilan yang diperoleh dari para bangsawan keraton yaitu membatik. Dan ketika kemudian perkembangan batik tersebut meng-

alami perkembangan yang pesat, tuntutan akan adanya tenaga kerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan akan batik tersebut membuat mereka mulai menerima orang diluar Kauman untuk masuk ke Kauman namun dalam posisinya sebagai tenaga kerja. Proses ini juga hampir sama ketika kemudian berkembang industri batik yang menggunakan alat-alat mesin. Kebutuhan akan tenaga untuk mengoperasikannya menjadi lebih penting ketimbang upaya untuk mempertahankan Kauman dalam sebuah ketertutupan dari pihak luar. Artinya pada saat itu Kauman mulai membuka diri bagi orang di luar untuk masuk ke Kauman, dimana sebagian menjadi tenaga kerja dan sebagian yang lain -namun jumlahnya- terbatas masuk dan mengembangkan usaha batik di Kauman (pemodal).

Keterbukaan ini semakin teras ketika, bandul kekuasaan berpindah dari keraton ke negara (selepas kemerdekaan). Yang kemudian melepas semua perekat yang ada di Kauman dan dikembangkan oleh budaya tradisional keraton. Apalagi dengan dibukanya standar kepemilikan tanah di Kauman, maka sekarang bisa kita dapatkan bagaimana komposisi Kauman yang dulu homogen baik dalam nuansa keagamaan atau status sosial yang ada. Kini mulai beragam, baik terkait dengan komposisi keagamaan, baik itu Kristen, Hindu ataupun Protestan (lihat tabel 4). Kauman juga sekarang dipenuhi oleh etnis lain baik itu Cina ataupun Arab (lihat tabel 7) dan dalam masalah pekerjaan dan standar penghasilan pun, Kauman semakin kompleks. Mulai dari meraka yang bekerja di sektor non formal seperti pedagang kaki lima hingga tukang parkir sampai

pekerjaan yang resmi di instansi negara. Keberagaman ini tak lepas dari apa yang dilakukan oleh negara terkait dengan kebijakannya mengenai aturan kepemilikan tanah hingga pengembangan kota, yang menempatkan Kauman menjadi salah satu bagian dari aset pengembangan tersebut. Dan itu menyeret banyak orang untuk bisa tinggal di Kauman, tanpa harus di kategorikan mempunyai kepeahaman tentang agama Islam atau tidak, mempunyai garis keturunan dengan kerabat keraton atau tidak, mempunyai garis kekerabatan dengan *Abdi Dalem Pametkhan* atau tidak hingga harus Cina, Arab atau Jawa, kini semua kategori tidak terintegrasi di Kauman, untuk menjadikan Kauman sebagai masyarakat heterogen dan terbuka.

c. Sistem Stratifikasi Baru

Konsekuensi dari terbukanya pola rekrutmen masyarakat Kauman, maka yang terjadi kemudian adalah bentuk baru stratifikasi sosial yang ada. Kalau dulu masyarakat Kauman, ketika masih dalam otoritas keraton maka yang ada hanya satu struktur tunggal yaitu mereka yang manjadi *Abdi Dalem Pametahkan* dan keturunannya. Struktur tunggal ini mampu bertahan karena secara sengaja mereka mempertahankannya dengan pola pengembangan masyarakat yang tertutup yaitu lewat perkawinan antara sesama kerabat pola perluasan tali kekerabatan hanya menghasilkan satu pola yang linear antar satu keluarga dengan keluarga yang lainnya.

Pergeseran pada pola ini, dimulai ketika batik mulai berkembang di Kauman. Dengan perkembangan batik yang tidak hanya menghasilkan satu atau

dua batik namun mampu menjangkau pasar di luar Kauman dan ditambah dengan semangat untuk menghasilkan materi (finansial) menjadikan mereka mulai memasukkan individu-individu dari luar Kauman dalam kepentingannya sebagai tenaga kerja. Mereka diberi tempat tinggal untuk tetap bisa bekerja dengan baik. Kondisi ini bertahan dan berkembang ketika batik yang mulai dikembangkan oleh istri para abdi dalem-pun berkembang pesat dan menuntut peningkatan skala produksi, yang berarti juga menuntut penambahan jumlah tenaga kerja. Kemudian bergabung kembali kerabat pekerja yang sebelumnya telah tinggal dan bekerja di Kauman, untuk kemudian bersama-sama tinggal di Kauman sebagai tenaga kerja batik. Mereka masuk ke dalam sistem yang tertutup yang ada di Kauman dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Mereka mulai mengembangkan sistem sosial mereka sendiri, diluar sistem sosial yang dikembangkan oleh *Abdi Dalem Pametakhlan*. Sehingga pada tahapan ini, masyarakat Kauman mulai terpolarisasi ke dalam dua pola stratifikasi yaitu mereka yang menjadi tenaga kerja batik dan menetap di Kauman (*Teteko/Ngindung*) dan mereka yang menjadi *Abdi Dalem Pametakhlan* dengan keturunannya.

Perkembangan berikutnya adalah pergeseran dari dua pola masyarakat yang ada menjadi semakin kompleks ketika batik sudah berubah, bukan lagi sekedar hasil kerajinan tangan yang diperjual belikan namun berkembang menjadi industri batik. Dengan perkembangan ini, secara otomatis masyarakatnya pun mengalami berbagai pergeseran. Terutama dari pola dua ke-

las (*abdi dalem-ngindungan*) menjadi semakin kompleks. Kompleksitas tersebut berawal dari datangnya para pemodal untuk kemudian mengembangkan apa-apa yang telah maju dan berkembang di Kauman. Mereka datang dengan membawa modal siap mengembangkan batik Kauman menjadi sebuah industri, dengan pasar yang lebih luas dan keuntungan lebih banyak. Para pemodal ini kemudian menjadi kelas tersendiri di Kauman, yang berbeda dengan mereka yang menjadi *Abdi Dalem Pametakhan* dan keturunannya ataupun para pekerja yang telah menetap di Kauman (masyarakat *Teteko/ Ngindungan*).

Kompleksitas masyarakat Kauman ternyata tidak selesai sampai disitu tapi tetap bergerak meluas. Dalam artian, semakin bertambah kompleksitas masyarakat Kauman selepas memasuki masa-masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, negara dengan berbagai kebijakannya kemudian merombak Kauman (secara tidak langsung) dari masyarakat yang berorientasi pada keraton menjadi masyarakat yang terbuka, layaknya masyarakat di tempat lain. Kauman kemudian menjadi tidak lagi tertutup ketika negara mulai membukakan pintu kepemilikan tanah di Kauman. Warga negara Indonesia berhak untuk mengajukan kepemilikannya di Kauman tanpa memandang apakah mereka yang mau masuk ke Kauman berpengetahuan agama Islam dengan baik, beretnis Jawa atau mereka yang menjadi kerabat *Abdi Dalem Pametakhan*.

Negara merombak masyarakat Kauman menjadi lebih terbuka dan meninggalkan tradisi masa lalunya. Dan negara secara tidak langsung mengkonstruksi masyarakat baru dengan pola stratifikasi baru dengan ber-

dasar pendidikan, status sosial pemerintahan dan ekonomi sebagai satu standart baru dan mulai menghapus standart nilai lama yang berdasarkan kepaahaman keagamaan Islam dan pola kekerabatan yang kental.

#### **5. Fisik Kauman yang Berubah**

Kauman sebagai sebagai sebuah tempat yang merepresentasikan masa lalu dari sebuah kekuasaan, maka menghadirkan banyak simbol dari kekuasaan tersebut. Dimana gambaran akan adanya sebuah kekuasaan adalah bentuk dari berbagai perangkat kebudayaan yang diciptakan, untuk kemudian melambangkan eksistensi kekuasaan tersebut. Artinya keraton sebagai sebuah simbol kekuasaan, juga tak luput untuk menghadirkan banyak hal terkait dengan kepentingannya untuk menetapkan eksistensinya.

Dalam kajian kebudayaan, semua bentuk kekuasaan akan melahirkan sistem sosial dan budaya yang diorganisir oleh dalam kerangka kebudayaan yang dikembangkan oleh kekuasaan tersebut. Dari adanya bangunan kebudayaan yang terpusat dari kekuasaan maka yang terkonstruksi kemudian adalah sebuah pendistribusian pola-pola kebudayaan, yang persebarannya berarti adalah persebaran kekuasaan itu sendiri. Dalam hal ini Kauman akan menjadi bagian yang terintegrasi dalam lambang kekuasaan dengan menghadirkan simbol keagamaan, yang pada awal eksistensi kekuasaan tersebut merupakan pola yang berkembang luas selepas tumbangny Majapahit.

##### **a. Disfungsi ruang**

Salah satu yang khas dari Kauman dan itu menjadi simbol secara fisik bagi otoritas keraton yang ada adalah Masjid Agung. Masjid Agung yang secara fisik

terletak di sebelah barat Alun-alun keraton, ingin menempatkan keraton dalam posisinya sebagai pusat kekuasaan yang menghubungkan antara Alun-alun sebagai simbol masyarakat yang luas yang kemudian dihubungkan dengan keraton sebagai penguasa di dunia dengan Masjid Agung sebagai simbol dari kekuasaan diluar ke dunia manusia. Disamping itu juga, pemaknaan akan Masjid Agung yang menjadi simbol ter-elaborasinya agama dalam eksistensi kekuasaan, untuk kemudian ditunjukkan dalam berbagai ritus kebudayaan yang diciptakan keraton dengan menghubungkan antara keraton, Masjid Agung dan Alun-alun.

Kehadiran Masjid Agung menjadi mutlak dalam kerangka pengembangan kebudayaan yang diinginkan oleh keraton. Pengembangan kebudayaan yang menempatkan agama dalam posisi yang urgent dalam semua kerangka nilai yang berkembang sekaligus menjadi standart kebenaran yang ada. Fungsi simbolis inilah yang kemudian seiring dengan perubahan yang dialami oleh keraton untuk kemudian digantikan oleh negara yang ter-transformasi dalam semua perangkat kekuasaannya seperti Departemen Agama atau Departemen Pariwisata yang secara tidak sengaja kemudian merubah pola kebudayaan yang telah berkembang sebelumnya. Masjid Agung yang sangat strategis dalam kerangka kebudayaan masa lalu kemudian berubah fungsi ketika pola kekuasaan yang lama mulai kehilangan otoritasnya terhadap perangkat kebudayaan tersebut. Masjid Agung kini diatur oleh negara dalam Keppres No. 23 tahun 1988 yang menempatkan Keraton, Alun-alun dan Masjid Agung dalam otoritas negara.

Masjid Agung kini menjadi medan yang masih diperebutkan oleh otoritas lama yang memang tidak begitu saja kehilangan berbagai piranti kebudayaannya dengan otoritas baru yang secara simbolis kekuasaannya tak terbatas dan mampu dibendung oleh kekuasaan lama. Di Masjid Agung kini semua pengurus yang ada dilantik oleh Departemen Agama dan bertanggung jawab terhadap Departemen Agama. Pada saat yang bersamaan Tafsir Anom mulai kehilangan pengaruhnya dalam medan perebutan simbol kebudayaan ini.

Semua aktivitas di Masjid Agung kemudian kehilangan makna simbolisnya dari sebuah warisan mulia yang ingin diwariskan oleh otoritas yang lama. Berbagai bentuk ritual yang masih dicoba untuk diselenggarakan oleh keratonpun (yang tentunya bertujuan dalam kerangka kebudayaan yang ingin mereka kembangkan) kemudian menjadi sebuah aset wisata biasa ketika kemudian negara hadir secara tiba-tiba. Orang yang mengikuti aktivitas kebudayaan itu tidak lagi berpikir tentang makna yang ingin disampaikan oleh sebuah kekuasaan yang ingin masih tegak dengan tetap menghadirkan simbol Masjid Agung sebagai bagiannya, tetapi menjadi sekedar berwisata saja, yang tentunya mempunyai nilai ekonomis bagi negara karena kemudian momentum kebudayaan (bagi keraton) ini bernilai ekonomis untuk kemudian dikomersilkan oleh negara.

Dalam kesehariannya-pun Masjid Agung kemudian sekedar menjadi sebuah tempat yang tak menghadirkan nuansa kebudayaan yang kental karena mulai kehilangan maknanya bagi masyarakat luas. Masjid Agung kini sekedar hanya tempat wisata bagi orang

yang datang dari luar kota untuk kemudian mengambil gambar atau sekedar beristirahat sejenak didalamnya untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Hal yang sama juga terjadi pada saat pelaksanaan sholat lima waktu yang diselenggarakan Masjid Agung, pada Dzuhur (jam 12.00 wib) yang ada hanya orang-orang yang bekerja di Klewer untuk kemudian menunaikan kewajibannya lalu istirahat sejenak dan itu terjadi pada waktu pelaksanaan kewajiban sholat Ahsar (jam 15.00 wib). Yang itu berarti ketika terselenggaranya Kultum Ba'da Dhuhur yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Agung maka peserta atau orang-orang yang mengikutinya adalah mereka yang kebetulan pada saat itu rutin beristirahat di Masjid Agung yaitu para pedagang Klewer. Kondisi ini tak jauh berbeda ketika penyelenggaraan kewajiban sholat Subuh (jam 05.00 wib) yang kemudian dilanjutkan dengan Kajian Ba'da Subuh, yang diikuti oleh mereka yang tinggal di pesantren dan hampir dari semua yang tinggal di pesantren bukan orang Kauman (keturunan *Abdi Dalem Pametakhan*). Hal ini, bermula ketika keraton mulai kehilangan pengaruhnya di Masjid Agung maka keraton mulai membangun Masjid di dalam lingkungannya (Baluwarti) dan itu berarti memutuskan hubungan secara simbolis dengan Masjid Agung. Oleh informan peneliti di lapangan ditegaskan sebagai berikut oleh seorang informan, tentang hubungan keraton dan Masjid Agung :

'Hubungan keraton tidak lebih hanya sekedar hubungan yang bersifat historis semata, bahwa pendiri Masjid Agung adalah keraton. Di luar itu sudah tidak ada lagi hubungan antara keraton, Masjid Agung bahkan dengan Kauman sekalipun'

Bahkan apa yang peneliti ikuti, pada tanggal 30 Juli 2002 dimana di Masjid Agung menjadi tempat diadakannya Musyawarah Kelurahan Membangun (MUSKELBANG II) yang diselenggarakan oleh Kelurahan Kauman. Mereka membahas berbagai agenda berkaitan dengan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kelurahan Kauman dengan pegalokasian dana dari Pemerintah Kota. Hal ini memberi makna bahwa Masjid Agung yang dulunya menjadi simbol dari otoritas keraton kini telah dielaborasi oleh negara. Masjid Agung juga menjadi tempat diselenggarakannya semua peringatan hari besar umat Islam namun yang menjadi penyelenggaranya adalah Departemen Agama.

Pergeseran ini tidak saja terjadi dalam konteks ruang seperti yang dialami Masjid Agung namun juga terjadi pada banyak tempat yang terdapat di Kauman. Beberapa diantaranya ialah mengenai konsep guna sebuah tempat -yang dulu- secara sengaja dikonstruksi sedemikian rupa dalam bingkai kebudayaan yang dikembangkan oleh keraton. Dahulu nama-nama tempat yang terdapat di Kauman, didasarkan atas nama-nama yang ditempati oleh para *Abdi Dalem Pametakhan*. Jadi, nama *Sememen* berasal dari nama yang diambil dari *Ketib Sememi* atau *Modinan* adalah nama tempat tinggal bagi para *Abdi Dalem Pametakhan* yang bertugas menjadi *Modin* (pengurus jenazah). Dan kebanyakan nama-nama dari para *Abdi Dalem Pematakahhan* itu kini menjadi nama langgar (tempat ibadah yang relatif kecil). Dan nama-nama yang ada juga menunjukkan fungsi yang melekat pada nama tersebut. *Modinan* merupakan nama tempat bagi mereka yang bertugas mengurus jena-

zah, *Sememen* merupakan tempat tinggal para Khotib, *Pengulon* menjadi tempat tinggal bagi mereka yang bertugas menjadi Penghulu pada tiap-tiap acara pernikahan yang diadakan oleh keraton, *Trayeman* dan *Winongan* juga sama seperti *Sememen* yaitu tempat tinggal Khotib *Winong* dan Khotib *Trayem*. Kemudian nama-nama daerah yang terdapat di Kauman seperti *Gajen*, *Babangsan* atau *Blodiran* merupakan nama tempat yang mempunyai peran dalam sistem sosial yang ada. *Gajen* adalah nama tempat bagi para pembuat kue sesajen yang sering diadakan oleh pihak keraton, *Babangsan* adalah tempat para pembuat kuluh, *Sentiran* merupakan tempat tinggal mereka yang bekerja menjadi pengerat benang dan *Blodiran* yang merupakan tempat tinggal mereka yang bekerja dan mempunyai ketrampilan bordir. Nama-nama yang terakhir erat kaitannya dengan perkembangan ketrampilan dan usaha batik di Kauman.

Namun sekarang nama-nama itu hanya tinggal menjadi nama langgar dan tidak lebih dari itu. Pola pembagian daerah selepas otoritas keraton mulai berkurang di Kauman dan digantikan oleh negara dengan perangkatnya seperti Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga hingga Rukun Tetangga. Kini yang ada di Kauman hanyalah pembagian daerah berdasarkan pola pembagian administratif yang dilakukan oleh negara, yaitu 26 Rukun Tetangga dan 6 Rukun Warga. Dan pada saat pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Membangun-pun, kehadiran warga didasarkan atas kategori ini yaitu mereka yang mewakili koordinasi ditingkat Rukun Tetangga yang kemudian dimusyawarahkan kembali di tingkat Rukun Warga yang

mempertemukan antar wakil dari masing-masing Rukun Tetangga yang ada di Kauman sebelum menjadi pembahasan musyawarah di tingkat Kelurahan.

b. **Padatnya Kauman**

Konsekuensi dari perubahan yang dialami Kauman secara luas adalah seperti yang dibahas di atas yaitu terjadi sebuah proses disfungsi tempat dari tujuan awal keberadaan Kauman, Kauman yang ditempatkan dalam kerangka nilai budaya. Perubahan yang dialami oleh Kauman dalam semua segmentasi ruang kehidupan dan ketika negara (sebagai otoritas baru) mengembangkan kawasan sekitar Kauman menjadi sebuah kawasan pusat dan pengembangan kota, baik secara ekonomis, administratif hingga pengembangan wisata yang menggunakan daya tarik keraton, Alun-alun, Masjid Agung hingga pusat perbelanjaan Klewer.

Pengembangan tersebut memberi sebuah perubahan pada lingkungan sekitar Kauman. Maka sekarang kita akan melihat bagaimana Bank Central Asia dengan tegak berdiri di kawasan Kauman kemudian Gladak yang menjadi titik pusat pengembangan tersebut kemudian menarik berbagai aktivitas ekonomi yang lain. Pusat perbelanjaan Matahari ada di sebelah timur Kauman. Pusat administrasi Pemerintah Kota ada di sebelah utara Kauman, kawasan Gladak dan sepanjang Slamet Riyadi kini menjadi pusat perkembangan toko-toko modern, Alun-alun dan keraton kini menjadi aset wisata yang senantiasa padat, sama seperti apa yang dialami oleh Klewer yang kian hari kian memadat, yang juga diikuti oleh perkembangan kawasan disekitarnya.

Semua itu kemudian menarik Kauman dalam sebuah dinamika perubahan baru yaitu perubahan aset-aset ekonomi, yang berarti juga akan membuka lowongan pekerjaan dan sekaligus menjadi magnet bagi sumber daya manusia di luar Kauman bahkan diluar kota Surakarta. Daya tarik kawasan di sekitar Kauman mau tidak mau akhirnya menyeret sumber daya manusia itu untuk bergabung di dalamnya dan Kauman menjadi alternatif yang baik untuk tinggal dengan perhitungan efektivitas waktu dan pengurangan biaya perjalanan.

Maka Kauman kini menjadi tempat yang strategis untuk menjadi tempat tinggal (yang sifatnya sementara) bagi mereka yang datang ke kota Surakarta dan berupaya berpenghasilan di Kauman atau sekitarnya. Dan kondisi itu dalam perkembangannya juga mampu menjadi daya tarik secara ekonomi bagi mereka yang mempunyai rumah di Kauman. Yang terjadi kemudian adalah perubahan secara fisik dan nilai guna ruang dari rumah-rumah di Kauman. Kebanyakan rumah yang dulu ditempati para *Abdi Dalem Pametakhan* karena besarnya jumlah anggota keluarga, berfungsinya salah satu bagian rumah untuk proses belajar mengajar materi keagamaan atau yang kemudian dikembangkan oleh para istri *Abdi Dalem Pametakhan* yaitu untuk tempat pembuatan batik dan penjualan, menghasilkan rumah-rumah yang besar dengan ruang yang banyak. Sekarang sebagian besar ruang-ruang itu kini bernilai ekonomis. Sebagian ada yang menjadi home stay (semacam tempat persinggahan bagi pendatang), losmen, kontrakan (kost-kostan) atau menjadi tempat usaha. Dampak dari situasi yang seperti itu adalah datangnya sum-

ber daya manusia dalam jumlah banyak ke Kauman dengan jaminan tempat tinggal yang murah dan pekerjaan yang mampu menjamin hidup mereka di sekitar Kauman. Seperti yang peneliti alami dilapangan ketika peneliti tinggal di Kauman. Rumah yang peneliti tinggali (di lantai atas yang dijadikan tempat tinggal bagi mereka yang kontrak) terdapat 6 kamar. Kamar satu bersisi satu keluarga dengan satu anak, sang suami bekerja menjadi supir angkot dan istrinya berjualan makanan di sekitar pasar Klewer lalu kamar ke-dua berisisi keluarga tanpa anak dengan suami yang bekerja menjadi tukang becak dan istri bekerja membuatik. Kemudian kamar yang lain diisi oleh pedagang Klewer (berasal dari Pekalongan), penjual (PKL) kaset bajakan hingga stiker (yang rata-rata dari Wonogiri) dan sebagian yang lain menjadi penjahit. Kebanyakan mereka bukan datang dari kota Surakarta namun dari kota-kota sekitarnya, dengan motivasi bekerja dan memilih tempat di Kauman karena lebih menjanjikan pekerjaan dengan alternatif yang lebih banyak. Dan kondisi-kondisi seperti itu, sekarang menjadi gambaran yang dominan di Kauman. Di samping mereka-mereka yang berpenghasilan agak rendah, terpaksa harus tinggal dalam rumah-rumah mereka yang sempit dan semi permanen. Dan dalam satu kasus, peneliti menemukan beberapa orang yang setiap hari harus tidur atau bermalam di langgar, ternyata itu salah satu akibat dari sebuah proses pemadatan yang tidak bisa ditolerir lagi. Ditambah lagi dengan akibat yang lain, yaitu terbatasnya fasilitas sosial yang ada di Kauman sebagai efek dari ketidakseimbangan antara mereka yang datang dengan pe-

ngembangan wilayah yang ada di Kauman. Maka di Kauman akan mudah kita dapatkan kamar mandi umum yang digunakan secara massal, penggunaan fasilitas rumah ibadah untuk kebutuhan sehari-hari seperti kamar mandi dan fasilitas air dan listrik, hingga anak-anak yang selalu bermain di jalan-jalan karena tidak terdapatnya ruang-ruang yang luas untuk sekedar bermain anak-anak. Hal itu menggambarkan, betapa kepadatan di Kauman sampai pada taraf yang membuat ketidaknyamanan bagi penduduknya. Dan realitas itu berjejal seiring dengan pertumbuhan rumah-rumah modern, dengan pola pagar yang tinggi, dengan dominasi keramik dimana-mana dan dengan jumlah lantai melebihi satu (tingkat). Rumah dengan pola bertingkat seperti ini, tentunya menjadi pilihan yang paling baik bagi mereka karena keterbatasan lahan yang ada.

Kini sebagian rumah-rumah tua telah mengalami renovasi sesuai dengan berbagai pola yang ada, bahkan bila perlu yang terjadi kemudian adalah perombakan habis rumah-rumah tua, yang dulu merupakan simbol bagi para pemiliknya untuk diganti dengan rumah-rumah yang berstandart modern dan ekonomis.

## **B. PROSES PERUBAHAN**

Dalam banyak kajian dinyatakan bahwa awal dari proses perubahan adalah proses *diffusi* karena hal ini akan terkait dengan penyebar luasan gagasan, ide-ide dan keyakinan maupun hasil-hasil budaya yang berupa fisik. Disinilah letak perubahan berproses, dimana *diffusi* dimaknai sebagai suatu proses yang menyebarluaskan ciri khas suatu kebudayaan. Entah itu hasil dari suatu perubahan ataupun menjadi awal dari perubahan.

Dan proses penyebar luasan berbagai perubahan itu dipengaruhi oleh banyak hal.

Oleh karenanya kita bisa ambil kesimpulan sederhana bahwa perubahan didalam masyarakat tidak selalu berjalan dengan lancar, oleh karena hambatan-hambatan tertentu. Ataupun kekuatan-kekuatan yang tetap bersumber dari dalam masyarakat. Namun setiap perubahan, juga akan terkait dengan penerimaan masyarakat terhadap ide perubahan itu sendiri. Dimana individu-individu mengalami proses penerimaan yang berupa tahap-tahap tertentu yaitu *penyadaran*, dimana seseorang mengetahui adanya inovasi dan memperoleh beberapa pemahaman tentang bagaimana inovasi itu berfungsi. Lalu, *persuasi* yaitu tahap dimana seseorang berkenan atau tidak dengan inovasi tersebut, yang kemudian diikuti oleh keputusan dari seseorang yang terlibat dalam kegiatan yang membawanya pada pemilihan untuk menerima atau menolak *inovasi* yang ada hingga pada akhirnya individu harus mengkonfirmasi dengan berbagai rasionalisasi keputusannya tersebut. Dan dalam berbagai proses yang ada peneliti ingin mengkonstruksikannya dalam beberapa tahapan proses perubahan tersebut.

### **1. Fase Perubahan Pertama**

Keraton sejak awal kekuasaannya merupakan pusat kebudayaan, yang mengsinergikan semua konsep kebudayaan dalam bingkai kebudayaannya yang khas. Ketika keraton mulai membangun keberadaannya di Sala maka konstruksi kebudayaan yang ingin diwujudkan pun tak lepas dari kepentingannya untuk menegakkan eksistensinya tersebut. Bangunan kebudayaan yang ada kemudian terpusat dari keraton sehingga keberadaan Kauman (dan daerah lain yang ada disekitarnya) juga bagian dari sistem yang terinte-

grasi ini. Keraton menjadi referensi bagi semua elemen dalam masyarakat yang ada pada saat itu. Dimana setiap elemen yang ada merupakan bagian dari sebuah *kosmis* kebudayaan yang terpendar ke dalam setiap ruang yang ada dalam otoritas keraton tersebut.

Keraton menjadi pusat dalam semua kepentingan yang ada dalam masyarakat, seperti sandaran nilai, tata perilaku, pemaknaan akan dimensi religi hingga sandaran ekonomi bagi semua masyarakat yang ada dalam lingkup kekuasaannya tersebut. Kauman yang menjadi bagian dari sistem yang dikembangkan keraton, juga tak lepas dari keterikatan tersebut. Kauman yang terbangun dalam kepentingan keraton akan hadirnya otoritas keagamaan, diberi kompensasi dengan memberi mereka yang tinggal di Kauman kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari. Artinya *Abdi Dalem Pame-takhan* adalah instrumen keraton dalam melaksanakan proses keagamaan sekaligus prosesi politik yang ingin dibangun oleh keraton, maka menjadi tanggung jawab bagi keraton untuk menjamin kemampaan mereka. Konsekuensi dari keterikatan tersebut adalah jaminan bagi keraton kepada abdi dalem tersebut adalah penghambaan dan pelaksanaan semua kepentingan keraton. Situasi ini kemudian mengalami kemapanannya selama beberapa waktu, dengan menguatnya keraton sebagai sumber kekuasaan yang mau tidak mau harus diakui oleh semua elemen masyarakat yang ada –pada waktu itu.

Hingga sampai pada satu waktu dimana kemudian kebutuhan mereka sebagai abdi dalem mengalami perubahan pada aspek-aspek tertentu. Kebutuhan yang meningkat tentunya seiring dengan pertumbuhan masyarakat yang ada, terutama kebutuhan dalam hal-hal yang sifatnya material.

Beberapa perubahan kebutuhan ini didasarkan karena adanya perkembangan perekonomian akibat datangnya kaum kolonial yang kemudian mengembangkan berbagai pola perekonomian (dan menjadi embrio perekonomian modern yaitu perdagangan) dan perkembangan kebudayaan yang dikembangkan oleh para pendatang tersebut.

Maka dengan meningkatnya kebutuhan yang dialami oleh para abdi dalem tersebut tentunya melahirkan berbagai upaya untuk memenuhinya. Dan pada saat itu tidak banyak alternatif yang bisa mereka lakukan karena berbagai hambatan kebudayaan yang tidak memungkinkan mereka melakukan berbagai tindakan kecuali berbagai tindakan tersebut tidak mengeluarkan-nya dari frame kebudayaan bahwa mereka adalah abdi dalem dalam bidang keagamaan.

Kemudian terpilihlah batik sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau sebelumnya mereka mendapatkan pendidikan untuk membuat batik dalam kerangka pembelajaran akan simbol-simbol kebudayaan yang ada dan hanya dimiliki oleh mereka yang menjadi keturunan atau kerabat bangsawan. Maka batik kemudian menjadi alternatif yang mampu memenuhi berbagai tuntutan akan kebutuhan-kebutuhan baru yang mulai terasa mendesak. Artinya ketrampilan batik kemudian menggeser perannya semula dari sekadar bagian dari ketrampilan dalam ruang-ruang kebudayaan menjadi sebuah cara (aktivitas ekonomi) yang menjadikan mereka mapan dengan sendirinya.

Bangunan konstruksi sosial yang ada pada fase ini belum mengalami perubahan yang mendasar. Masyarakat Kauman masih menjadi bagian dari sistem keraton yang terintegrasi (*patron klein*), dimana mereka masih mampu menghidupkan nilai awal bahwa Kauman adalah abdi dalem. Pada

tahapan ini, Kauman masih menjadi masyarakat yang agamis (dengan semua aktivitasnya) dan masih menetapkan keraton dalam bingkai kebudayaannya. Yang berubah hanya terciptanya instrumen baru pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka yang berupa pembuatan batik yang mampu diperjual belikan.

## 2. Fase Perubahan Kedua

Selepas fase yang telah diurai di atas, Kauman kemudian berubah menjadi masyarakat yang mampu menghasilkan produksi batik dalam jumlah yang besar dan yang paling penting adalah penghargaan keraton dalam bentuk pengakomodasiannya terhadap apa-apa yang dilakukan oleh para *Abdi Dalem Pametakhan* tersebut. Maka Kauman kemudian menjadi dinamis perekonomiannya akibat mereka mampu menghasilkan batik sebagai salah satu kebutuhan masyarakat yang mulai meluas tersebut.

Pada saat yang hampir bersamaan, batik kemudian meluas menjadi sebuah alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi yang tidak hanya dimonopoli oleh Kauman. Maka teknologinya kemudian juga mengalami perubahan terkait dengan proses efektivitas proses pembuatannya. Dan ketika teknologi batik dengan tehnik cap ditemukan maka batik kemudian meluas menjadi proses yang tidak terlalu membutuhkan keterampilan membatik, seperti sebelumnya. Masyarakat Kauman pun tidak terlambat untuk mengadopsi pola ini, yang kemudian menjadi tidak lagi sebatas pengisian waktu luang oleh para istri abdi dalem tersebut tapi kemudian benar-benar menjadi sebuah kegiatan yang bersifat mendasar yaitu memenuhi kebutuhan akan materi.

Di samping perkembangan teknologi pembuatan batik yang ada, datangnya modal dari kaum kolonial yang masuk ke Jawa menjadi variabel penting dari semakin ramainya perdagangan batik di Jawa. Maka investasi akan modal serta teknologi menjadi keinginan bagi setiap orang yang memilih pembuatan batik sebagai sebuah bentuk industri dan di Kauman kondisi ini tak terbendung.

Para *Abdi Dalem Pametakhan*, -terutama kaum perempuan- itu kemudian menjadi pelaku dominan dalam perkembangan industri batik di Kauman. Mereka mengembangkan rumah-rumah mereka (yang besar dan dulunya menjadi tempat bagi proses belajar-mengajar) kini menjadi tempat pembuatan batik-batik tersebut. Tak ketinggalan, sebagian ruang yang lain juga menjadi tempat untuk memasarkan hasil industri batik tersebut. Di sinilah kemudian masyarakat Kauman mulai membuka diri bagi mereka yang datang dari luar namun dalam konteksnya sebagai tenaga kerja. Disini pulalah para *Abdi Dalem Pametakhan* mulai membangun kemandirian mereka dalam bidang ekonomi, yang mana mereka mulai meninggalkan apa-apa yang pernah menghubungkan mereka dengan keraton yaitu jaminan kemakmuran dalam bidang ekonomi. Hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan di sekitar Kauman yang kemudian menjadi pusat perdagangan kain dalam jumlah yang terbatas (dan kelak tempat ini, yang bernama pasar *Slompretan* berubah menjadi pasar Klewer) namun karena letaknya dengan Kauman relatif dekat maka tempat ini kemudian berkembang dengan pesat. Dalam kemandirian inilah, kemudian Kauman memulai mengurangi bentuk ketergantungannya kepada keraton. Kecuali untuk hal-hal dalam bidang kebudayaan dan keagamaan Kauman masih

mempunyai keterikatan yang kuat dengan keraton. Kauman masih menjadi pusat keagamaan bagi keraton dalam konstruksi kebudayaannya namun Kauman sudah memulai membangun kemandiriannya dengan keraton, karena mereka kini mulai mampu mengembangkan nilai-nilai ekonomis yang berlaku di masyarakat dan pada tahapan inilah yang mengalami masa-masa yang relatif lama.

### **3. Fase Perubahan Ketiga**

Perubahan dari Kauman kemudian mulai sangat terasa ketika proses yang ada sebelumnya tersekat oleh hadirnya negara. Negara sebagai bentuk dari otoritas modern mulai menguat ketika dinamika masyarakat meningkat seiring dengan tuntutan akan kemerdekaan dan keterlepasan bangsa ini dari kaum kolonial. Perubahan inilah yang pada akhirnya mengakselerasi hubungan keraton dengan Kauman dalam sebuah pola hubungan baru.

Setelah memasuki kemerdekaan keraton mulai memasuki masa-masa yang sulit karena kehadiran negara berarti akan menegaskan bentuk otoritas tradisional yang ada. Dan ternyata negara benar-benar melakukan berbagai bentuk kebijakannya, yang pada akhirnya mengeliminir kekuasaan keraton dalam masyarakat. Negara mulai membentuk semua perangkat kebudayaan modern, yang tentunya juga menghadirkan nilai-nilai modern, dengan berbagai perangkatnya seperti undang-undang yang membangun masyarakat dalam bentuk yang belum pernah ada sebelumnya pada masa-masa kekuasaan tradisional.

Modernisasi sebagai nilai yang hendak dibangun negara kemudian mengkonstruksi masyarakat dalam bingkai kebudayaan baru, yang berarti meninggalkan apa-apa yang

pernah menjadi cita-cita dari kekuasaan tradisional. Dengan pendidikan modern yang ada, semua nilai-nilai tersebut kemudian ditransformasikan dalam setiap ruang-ruang kehidupan semua masyarakat yang ada dalam bingkai kenegaraan yaitu bangsa Indonesia dan Kauman tidak luput dari apa-apa yang dilakukan oleh negara.

Kauman lalu menjadi masyarakat yang mulai menempatkan nilai-nilai tradisi dan keagamaan tidak lagi sebagai sebuah standart. Negara mengubah masyarakat Kauman menjadi masyarakat yang terbuka yang tidak lagi melakukan rekrutmen dengan dasar agama dan membuatnya tidak lagi tertutup, dengan berbagai kebijakan yang terbuka. Kebijakan negara untuk mengembangkan kawasan di sekitar Kauman menjadikan Kauman sebagai sebuah bagian dari dinamika pembangunan kota yang berorientasi pada terbangunnya masyarakat yang modern dan itu berarti harus meninggalkan nilai-nilai tradisional yang telah ada sebelumnya. Aktivitas kebudayaan yang dulu menjadi representasi dari eksistensinya nilai-nilai tradisi kini menjadi sekadar simbolisasi atau bentuk romantisme yang kemudian dikomersilkan. Semua simbol kebudayaan yang ada kini hanya sekadar simbol yang tidak mampu menghadirkan semangatnya, seperti pada saat dulu ketika aktivitas-aktivitas kebudayaan itu dilakukan.

Kauman menjadi masyarakat yang sama dengan masyarakat yang lain, yang harus mencerna dengan paksa semua yang diinginkan oleh negara. Kauman tak beda dengan tempat lain, yang tidak mempunyai karakter yang khas sebab semua karakter awal masyarakat Kauman sebagai tempat tinggal para *Abdi Dalem Pametakhan* tidak lagi tertutup, agamis dan mempunyai status sosial yang tinggi karena nilai gunanya bagi otoritas tradisional.

Berikut ini, peneliti sederhanakan dalam beberapa tabel tentang perubahan yang terjadi di Kauman.

**Tabel 8**  
**Berubahnya Struktur Tafsir Anom**

	<b>Dulu</b>	<b>Sekarang</b>
Pola rekrutmen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan pola kekerabatan, baik dengan ulama di Kauman atau bangsawan keraton.</li><li>- Kepahaman agama.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan kepaahaman agama.</li><li>- Keterlibatan otoritas negara.</li></ul>
Struktur ulama	<ul style="list-style-type: none"><li>- Semua ulama yang ada berasal dari Kauman (<i>Abdi Dalem Pametakhan</i>).</li><li>- Mereka yang akan menjadi ulama adalah yang mendapatkan legalitas secara tradisi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kini, kebanyakan mereka yang ada adalah ulama yang berasal dari luar Kauman (non abdi dalem).</li><li>- Kebanyakan mereka adalah dari Departemen Agama.</li></ul>
Status sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tinggi dengan gaji dan penggunaan hak atas tanah.</li><li>- Penghargaan dari keraton dan masyarakat, juga tinggi.</li><li>- Kerangka nilai yang ada, menjadikan mereka sebagai standart dalam perilaku dan pengetahuan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak ada, kompensasi secara finansial.</li><li>- Status tersebut semata simbol bagi keraton tapi tidak bagi Kauman.</li></ul>

**Tabel 9**  
**Pola Pemenuhan Kebutuhan Hidup Baru**

<i>Dulu</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berlaku gaji bagi mereka yang menjadi <i>Abdi Dalem Pametakhan</i>.</li><li>- Berlaku pula penggunaan hak atas tanah di Kauman, sebagai tempat tinggal.</li><li>- Sebagai konsekuensi-nya maka ketergantungan secara ekonomis masyarakat Kauman dengan keraton tinggi.</li></ul>
<i>Transisi</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masyarakat Kauman mulai mengembangkan batik.</li><li>- Tapi tetap mendapatkan gaji dari keraton.</li><li>- Perkembangan usaha batik tersebut, samapai pada tahap yang sangat maju (industrialisasi).</li><li>- Masyarakat Kauman mulai memasuki kemapanan dan kemandirian secara ekonomi.</li></ul>
<i>Sekarang</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masyarakat Kauman, sudah tidak lagi mendapat gaji dari keraton, karena mandiri.</li><li>- Usaha batik di Kauman mulai surut dan hanya menjadi pilihan bagi sebagian kecil warganya.</li><li>- Jenis usaha yang terdapat di Kauman, semakin kompleks.</li><li>- Pilihan untuk menjadi wiraswasta dan pegawai di instansi pemerintah menjadi pilihan-pilihan utama.</li></ul>

**Tabel 10**  
**Bergesernya Perangkat Nilai dan Tata Nilai**

<i>Dulu</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keraton menjadi sumber tatanan nilai bagi semua masyarakat.</li><li>- Nilai-nilai agama menjadi dan posisi mereka sebagai <i>Abdi Dalem Pametakhan</i>, menjadikan Kauman terasa agamis.</li><li>- Perangkat-perangkat nilai tersebut biasanya berupa aktifitas-aktifitas ritual kebudayaan atau pendidikan non formal oleh para abdi dalem.</li><li>- Pendidikan formal keagamaan diadakan oleh lembaga khusus.</li><li>- Orientasi dan kerangka nilai yang ada dan berkembang, berada dalam bingkai agama-kebudayaan.</li></ul>
<i>Sekarang</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nilai yang ada dan berkembang ada dalam kerangka modernitas.</li><li>- Bentuk-bentuknya tertransformasi dalam semangat ekonomis, rasional, pola-pola pengorganisasian yang teratur hingga keterbukaan semisal dalam rekrutmen.</li><li>- Perangkat-perangkat yang ada adalah konsekuensi ketika negara hadir. Seperti pendidikan modern, pasar hingga lembaga-lembaga perdagangan.</li><li>- Pendidikan formal (yang diselenggarakan oleh negara) menjadi pilihan utama.</li><li>- Pekerjaan dalam bentuk aktifitas modern, juga menjadi pilihan utama.</li><li>- Agama dan tradisi mulai mengalami pergeseran pengakuan dari masyarakat Kauman.</li></ul>

**Tabel 11**  
**Realitas Sosial Baru**

	Dulu	Sekarang
Otoritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keraton sebagai pusat kekuasaan.</li> <li>- Ulama (abdi dalem) adalah otoritas kepemimpinannya.</li> <li>- Nilai-nilai tradisi dan agama menjadi standart.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Negara hadir menggantikan keraton sebagai kekuasaan modern.</li> <li>- Otoritas kepemimpinan bergeser ke perangkat-perangkat negara.</li> <li>- Nilai-nilai baru di legalkan oleh negara dan diorientasikan pada kemajuan (modernisasi).</li> </ul>
Sistem rekrutmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kauman menjadi tempat yang khusus dan khas yaitu tempat tinggal para ulama (<i>Abdi Dalem Pametakhan</i>).</li> <li>- Rekrutmen didasarkan pada pola kekerabatan.</li> <li>- Kepahaman agama juga menjadi standart rekrutmen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan negara yang mengatur kepemilikan tanah di Kauman maka menjadi terbuka dasar kepemilikannya.</li> <li>- Pola rekrutmen menjadi terbuka, artinya tidak ada standart agama dan tradisi.</li> </ul>
Struktur baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Homogen, dalam struktur ekonomi sosial hingga budaya, dimana yang berkembang hanyalah keturunan <i>Abdi Dalem Pametakhan</i> saja.</li> <li>- Dalam perkembangannya menjadi terbuka pada para pendatang (dengan orientasi bekerja pd mereka) atau <i>teteko</i>.</li> <li>- Dari <i>teteko</i> inilah konstruksi Kauman mulai mengalami dinamika.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selepas para <i>teteko</i> mapan dan mengembangkan masyarakat tersendiri Kauman mulai memasuki fase keterbukaan.</li> <li>- Dengan negara sebagai otoritas tertinggi, kini Kauman makin kompleks.</li> <li>- Kompleks dalam jenis pekerjaan masyarakatnya.</li> <li>- Kompleks dalam etnisitasnya.</li> <li>- Kompleks dalam penganut agama yang ada di Kauman.</li> </ul>

**Tabel 12**  
**Fisik Kauman yang Berubah**

Dulu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kauman adalah simbol kebudayaan.</li><li>- Masjid Agung adalah simbol dari kebudayaan yang hadir bersamaan dalam dimensi religi masyarakat Kauman.</li><li>- Rumah-rumah yang ada akan berorientasi pada nilai-nilai tradisi, dengan berbagai item kebudayaan &amp; keagamaan.</li><li>- Setiap ruang di Kauman akan mempunyai makna dan fungsinya masing-masing.</li><li>- Semua elemen dalam ruang di Kauman adalah kesatuan dalam nilai tradisional dan keagamaan.</li></ul>
Sekarang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kauman kini bukan lagi sebagai sebuah simbol tapi sama dengan tempat lain.</li><li>- Masjid Agung kemudian menjadi tempat yang mempunyai nilai jual bagi pariwisata hingga bisa juga tempat untuk transit bagi banyak orang.</li><li>- Bangunan-bangunan yang ada ataupun yang baru, berorientasi pada nilai-nilai ekonomis.</li><li>- Setiap ruang di Kauman kini sama dan sekarang dikelola oleh negara, dengan membaginya dalam administrasi modern.</li><li>- Kauman menjadi padat dan kehilangan kemampuan dalam mencukupi kebutuhan lingkungannya.</li></ul>

## **BAB IV**

### **PENYEBAB PERUBAHAN**

Perubahan sebagai bagian dari kebudayaan yang ada dalam masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Artinya setiap masyarakat akan mengalami proses perubahan namun dalam ruang dan tempat yang berbeda-beda. Dan perbedaan itu sebagai sebuah konsekuensi dari setiap proses yang ada dalam kebudayaan tersebut yang juga berbeda-beda. Di situlah letak penyebab perubahan sebagai variabel yang menentukan karakter perubahan yang ada.

Banyak penjelasan terhadap setiap perubahan yang dialami oleh masyarakat yang berbeda-beda. Akan tercipta berbagai kondisi dalam setiap masyarakat ketika melewati prosesi perubahan tersebut karena adanya berbagai kekuatan yang bersaing dalam masyarakat dan sudah mapan kondisinya. Tetapi yang jelas penyebab dari perubahan yang ada adalah daya gerak dari proses perubahan dalam suatu masyarakat yang datang dari banyak sumber. Entah itu berbagai variabel yang datang dari luar masyarakat atau memang ada kekuatan yang ada dari dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian mendorong proses perubahan tersebut. Dalam hal ini peneliti pada bab ini ingin memberi gambaran tentang penyebab perubahan di Kauman yang peneliti simpulkan dari semua data serta hasil kajian dari teks-teks yang tersedia.

### A. SEMANGAT KAPITALISTIK

Kauman yang menjadi salah satu subsistem dari kebudayaan keraton juga disediakan perangkat pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Jadi masyarakat Kauman sebagai bagian dari salah satu abdi dalem maka keraton pun tak lepas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pola pemenuhan kebutuhan ekonomis masyarakat Kauman (dengan posisinya sebagai *Abdi Dalem Pamethakan*) pada awalnya memang dipenuhi oleh keraton. Dengan sistem gaji yang ada dan sudah berkembang seiring dengan perkembangan berbagai pola ekonomi modern, sebagai akibat dari ekspansi kolonial. Keraton pun tak luput untuk mengadopsi pola tersebut.

Dengan pola pembagian kerja yang menempatkan para suami pada tempat-tempat publik, dalam bentuk mengajar materi agama, menjadi bagian dari struktur kekuasaan tradisional hingga tugas-tugas keagamaan. Pada akhirnya memungkinkan bagi para suami untuk hanya bekerja pada aktivitas tersebut, secara terus menerus. Kondisi pembagian kerja ini, berbeda dengan apa yang dialami oleh kaum wanita yang ditempatkan pada sektor domestik yang memungkinkan mereka untuk mempunyai waktu luang dalam jumlah yang sangat banyak untuk menghasilkan aktivitas produktif. Dan ketrampilan batik yang mereka peroleh lewat media pembelajaran antara sesama kerabat dan awalnya memang berasal dari kerabat kebangsawanan keraton. Dan pada perkembangannya, ketrampilan tersebut secara intensif dikembangkan oleh para kaum perempuan yang menjadi suami para *Abdi Dalem Pametakhan*. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena para bangsawan mempunyai ketrampilan membatik sekedar bagian dari sistem apresiasi mereka terhadap budaya keraton semata tapi tidak dengan para istri *Abdi Dalem Pametakhan*.

Dengan mengembangkan ketrampilan ini, sebagian besar warga Kauman, kemudia mapu mengkomersilan hasil batik tersebut secara bertahap berawal dari transaksi-transaksi kecil ataupun sekedar proses jual beli yang lebih menekankan bentuk hubungan kekerabatan antara mereka yang tinggal di Kauman dengan mereka yang tinggal di luar Kauman. Yang pada akhirnya menuntut adanya peningkatan dalam hal produksi.

Dari adanya tuntutan akan produktivitas inilah kemudian mengawali bangunan kemandirian secara ekonomi sebagian besar warga Kauman, terutama istri dari para *Abdi Dalem Pametakhan*.

Mengenai perkembangan industri batik di Kauman sebenarnya bermula ketika mulai dari ditemukannya perangkat canting sebagai alat untuk membatik. Dan di Surakarta sendiri seni batik dihargai sebagai bagian dari ketrampilan yang mesti dimiliki oleh kaum perempuan terutama mereka yang menjadi keturunan atau kerabat keraton. Prosesi ini sendiri berjalan semakin besar ketika mulai terbentuknya pasar-pasar baru dan adanya inovasi tehnik dalam membatik, lewat proses transformasi industri batik yang berjalan melalui dua tahap :

Tahap *pertama* terjadi sekitar tahun 1850-an, dimana batik mulai diperkenalkan menjadi sebuah perdagangan, terutama dengan batik-batik yang dibuat dengan teknologi batik baru yaitu menggunakan cap dengan garis-garis dari tembaga, yang ditempelkan pada sebuah alas dan diberi pegangan. Dengan teknologi ini batik kemudian menjadi sebuah proses yang tidak begitu rumit (seperti dulu kala) karena hanya membutuhkan sedikit ketrampilan dan tenaga yang terbatas. Pada sekitar tahun 1850-an, para pembuat batik dengan cap ini kemudian semakin banyak jumlahnya, yang kemudian mereka banyak mendirikan tempat usaha tersendiri untuk membuat batik dengan jumlah yang besar dengan tujuan menjualnya ke pasar.

Dan pada saat yang bersamaan sekitar tahun 1850-1860-an, menjadi tahun-tahun mengalirnya modal swasta Belanda ke daerah-daerah jajahan mereka. Perkebunan Belanda yang membawa uang tunai yang siap pakai untuk para petani dalam bentuk upah dan sewa, kemudian menjadi salah satu penyebab dari berkembangnya pasar-pasar di Jawa. Masyarakat pun kemudian mulai memanfaatkan waktu dan penghasilan mereka untuk konsumsi dan dalam hal berpakaian maka batik dengan harga murah menjadi pilihan bagi mereka. Hal tersebut menyebabkan produksi batik terus meningkat dan beberapa pusat produksi batik tersebut adalah Surakarta, yang terletak di Kauman, Keprabon dan Pasar Kliwon. Dengan teknologi yang pada saat itu ada, daerah-daerah tersebut menjadi tempat pemasok terbanyak produksi batik yang beredar di pasar.

Sedangkan untuk tahap berikutnya, yaitu tahap *kedua* yaitu fase yang terjadi pada kisaran tahun 1870-an. Dimana pasar-pasar yang ada semakin berkembang dengan pesat bersamaan dengan semakin meningkatnya penetrasi perkebunan Belanda di daerah pedesaan. Dengan daya dukung seperti kereta api yang menghubungkan pusat administrasi kaum kolonial dengan jajahan-nya tersebut, berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan seperti Semarang, Surabaya, Bandung atau Batavia, dimana sebagian kecilnya terbagi di Surakarta. Kemudian mulai berkembang pula perluasan tempat-tempat pembuatan batik di Surakarta bersamaan dengan perbaikan pada sistem teknologinya. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan kemapanan bagi mereka yang mengembangkan batik sebagai mata pencaharian. Sebab batik yang berkembang di Surakarta kemudian menguasai pasar yang tidak hanya di sekitar kerajaan Kasunanan namun juga meliputi pasar-pasar yang ada di Jawa. Kemapanan ini bertahan dalam kurun waktu yang lama hingga mema-

suki awal akhir abad ke 19-an dan mulai menurun ketika masuk pada awal abad 20-an, oleh sebab pergolakan politik, yang melahirkan gerakan-gerakan perjuangan pembebasan dari kaum kolonial (M. Zaki, >>>>>>).

Semua proses inilah yang, oleh peneliti dilihat sebagai penyebab dari perubahan yang ada di Kauman. Dengan mulainya masyarakat Kauman mengembangkan sektor industri batik ini, perubahan relasi dalam bidang per-ekonomian dengan keraton mulai memasuki bentuk baru. Dimana keraton kemudian tidak lagi menjadi satu-satunya sandaran dari pemenuhan kebutuhan yang mereka miliki. Masyarakat Kauman memasuki dunia kemandiriannya secara penuh ketika semua kebutuhan bahkan pada taraf yang berlebih mereka mampu menghasilkan materi lebih banyak dari apa yang mereka dapatkan dari keraton selama ini.

Semangat untuk menghasilkan materi dan mengakumulasi-kannya (*kapitalistik*) inilah yang membelah hubungan keraton yang selama ini, dengan masyarakat Kauman. Belahan hubungan ini kemudian mengalami masanya yang relatif lama dan beriringan dengan apa terjadi di luar relasi tersebut, yaitu terbangunnya pola perekonomian baru dengan menempatkan sektor perdagangan sebagai garda depan. Sistem perekonomian ini kemudian menggantikan pola-pola lama yang feodalistik dan Kauman lalu terakselerasi dalam gerak universal dari perekonomian baru ini. Dengan-nya nilai-nilai lama tereliminir dalam sebuah semangat kemandirian, yang memangkas nilai-nilai yang dulu pernah mapan dalam kerangka kebudayaan masa lampau.

## **B. HADIRNYA NEGARA**

Negara dalam banyak konsepsi ilmu sosial di katakan sebagai satu bentuk kekuasaan baru, yang hadir setelah masya-

rakat berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Negara kemudian menempatkan diri untuk menggantikan bentuk kekuasaan sebelumnya dengan caranya sendiri. Ketika masyarakat mulai mengajukan tuntutan akan konsepsi kekuasaan yang melibatkan banyak orang, dengan bentuk partisipasi yang luas dan proses penggiliran kekuasaan tersebut berjalan secara teratur maka mekanisme untuk mewujudkannya hadir lewat terbentuknya negara.

Kekuasaan negara kemudian terbangun sebagai sebuah bentuk kekuasaan baru, pada bentuk masyarakat yang baru pula. Negara menjadi bentuk kekuasaan modern yang kemudian meng-universal dan menjadi kesepakatan banyak orang sekaligus memenuhi tuntutan banyak orang dalam masyarakat. Yang mana terbangunnya negara seiring dengan gerakan dinamika masyarakat dan dinamika kebutuhan yang menyertai masyarakat. Artinya negara hadir untuk menggantikan konsep kekuasaan sebelumnya yang telah dianggap tidak mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara luas, beserta kebutuhannya.

Dalam konteks ini, perdebatan dan pergantian bandul kekuasaan berlaku dimanapun termasuk di Surakarta. Kebutuhan akan proses pergantian kekuasaan berjalan dengan sangat dinamis, dimana kebutuhan akan kehadiran kekuasaan modern berjalan dengan mulai melunturnya otoritas tradisional. Atau-pun bisa dibalik asumsinya dengan menegaskan bahwa kekuasaan modern-lah yang bertanggung jawab terhadap runtuhnya pamor kekuasaan tradisional. Dan fakta dari perkembangan kekuasaan yang dialami oleh masyarakat Surakarta, menunjukkan kondisi itu.

Namun perkembangan kekuasaan di Surakarta sendiri - yang menggambarkan pergeseran kekuasaan dari tradisional ke modern- ditinjau dari segi pemerintahannya tidak langsung

terjadi begitu saja. Sebab proses tersebut mengalami transisinya yang terdiri dari 3 periode, yaitu :

**1. Masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.**

Sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada waktu di bawah kekuasaan kolonial Belanda, Surakarta merupakan daerah Swapraja. Daerah Swapraja itu sendiri terbagi atas dua bagian yaitu :

- a. Swapraja Kasunanan
- b. Swapraja Mangkunegaran

Masing-masing daerah tersebut dikepalai oleh seorang raja yang bergelar Paku Buwono dan Mangkunegaran. Dan pada saat penjajahan Belanda, Surakarta secara tidak langsung dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan ikatan-ikatan dalam bentuk perjanjian.

Daerah Surakarta yang beribukota di Surakarta, sekalipun dalam jalannya pemerintahan dilaksanakan oleh Paku Buwono tetapi di Surakarta juga terdapat seorang Gubernur Pemerintahan Hindia Belanda untuk mengawasi dan menguasai kedua otoritas tradisional tersebut. Bahkan dalam hal militerpun, di Gubernuran Surakarta ini terdapat kompi tentara infanteri dan 1 peleton kavaleri KNIL yang mengawasi jalannya pemerintahan Paku Buwono. Sekalipun juga terdapat pasukan legiun dari Mangkunegaran atau pengawal Kasunanan namun mereka tidak lebih hanya sekedar pasukan yang menjadi pengawal keraton saja. Dan fase penguasaan oleh pemerintahan Hindia Belanda ini berakhir setelah Jepang mulai memasuki kota Surakarta dan pasukan Hindia Belanda melarikan diri. Inilah akhir dari kekuasaan Hindia Belanda di kota Surakarta dan Surakarta mulai memasuki masa penjajahan Jepang.

## 2. Masa Penjajahan Jepang

Setelah Jepang mulai memasuki Surakarta, Jepang langsung menyusun pemerintahan baru di kota Surakarta. Pemerintahan sipil yang ada merupakan pemerintahan otonom dengan Chokan Kakka (Gubernur Yo Watanabe). Dan semua perangkat aturan yang telah ada dan berlaku sejauh tidak bertentangan dengan apa-apa yang menjadi keinginan pemerintahan Jepang, tetap berlaku.

Namun pemerintahan Jepang yang pada saat bersamaan harus menghadapi peperangan dengan Sekutu kemudian sangat refresif. Dan kondisi seperti inipun juga terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan Jepang yang ada di nusantara. Mereka menjadi pihak-pihak yang sangat eksploitatif sekaligus menjadi rezim yang tak pernah enggan untuk melakukan kekerasan. Tapi kondisi ini tidak bertahan lama, karena Jepang mengalami krisis di negaranya sendiri akibat kekalahan-kekalahan yang dialaminya ketika melawan Sekutu maka inilah awal dari terbentuknya negara Indonesia.

## 3. Masa Kemerdekaan

Setelah kekalahan telak yang dialami oleh Jepang dan mereka kembali ke negaranya, Indonesia kemudian bergerak untuk memerdekakan diri dengan memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah masa itu kemudian semua daerah yang pernah menjadi jajahan Hindia Belanda dan Jepang kemudian dikendalikan oleh pemerintahan Indonesia, termasuk kota Surakarta. Namun sebagai kekuasaan baru yang hadir selepas kemerdekaan, tentunya tidak bisa mengabaikan otoritas yang sebelumnya sudah ada yaitu otoritas tradisional. Maka proses

pergeseran di antara dua otoritas tersebut tidak terhindarkan. Dan proses dari pergeseran otoritas tersebut dibedakan menjadi :

a. Periode Daerah Istimewa

Periode Daerah Istimewa ini dimulai dari dikeluarkannya Piagam Penetapan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan berakhir sampai terbentuknya atau lahirnya kota Surakarta pada tanggal 16 Juni 1946.

Sebagai konsekuensi dari Piagam Penetapan oleh Presiden Republik Indonesia maka Sri Paduka Paku Buwono XII dan Sri Paduka Mangkunoro XII memerintahkan daerah tersebut dalam sebuah otoritas baru yaitu Swaparaja. Dan kedua pemerintahan Swaparaja tersebut memiliki kekuatan hukum seperti yang tertera dalam UUD 1945 Bab VI pasal 18 tentang Pemerintah Daerah. dengan dasar, adanya rasa kepercayaan, bahwa kedua pemimpin Swaparaja tersebut akan mencurahkan semua pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerahnya yang telah menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dan pada tanggal 1 September 1945, Sri Paduka Paku Buwono XII mengeluarkan amanat yang pokok isinya menyatakan :

- 1) Bahwa kerajaan-kerajaan Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran adalah bagian dari daerah Republik Indonesia.
- 2) Bahwa semua urusan pemerintahan dalam Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran kini ditetapkan dan dipimpin oleh pemerintahan kerajaan Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, dengan mengindahkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

- c. Bahwa hubungan pemerintahan kedua kerajaan dengan negara Republik Indonesia bersifat langsung.

Sekalipun sudah ada pengukuhan dari Presiden RI yang berbentuk Program Penerapan dan kemudian diikuti oleh pernyataan setia dari kedua pimpinan dari kepala Daerah Istimewa tersebut dalam maklumatnya namun kekeruhan yang terjadi akibat krisis kekuasaan ini tak terhindarkan, banyak pihak yang menentang sistem Pemerintahan Daerah seperti itu.

Badan pekerja yang disebut Pemerintah Rakyat di satu pihak dan Daerah Istimewa di pihak lain ternyata tidak menemukan kesepakatan. Dan situasi ini berimbas pada ketidakstabilan situasi sosial politik kota Surakarta pada saat itu. Maka unttuk mengakhiri konflik tersebut Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan peraturan tertanggal 15 Juli 1946 yang isinya menyatakan bahwa kedua Pemerintahan Daerah Istimewa Kasunanan dan Mangkunegaran dinyatakan berakhir.

Sebelum bentuk Pemerintahan Daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan undang-undang maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang sebagai satu Karisidenan, yang dipimpin oleh seorang Walikota. Sehingga pada tanggal 15 Juli 1946 lahirlah daerah Surakarta dengan pemerintahan baru yaitu kota Surakarta.

- b. Periode Kota Surakarta

Periode Pemerintahan Kota Surakarta ini dimulai dari terbentuknya pemerintahan kota Surakarta pada tanggal 16 Juni 1946 dan berakhir sampai dengan ditemukannya undang-undang no. 16 tahun 1947 tentang

pembentukan Haminte Kota Surakarta yang mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 1947.

Sejak tanggal 8 Agustus 1946 di daerah Surakarta, pemerintahan didasarkan pada peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang tahun no. 8 tahun 1946 dengan terbentuknya Badan Perwakilan Rakyat yang meliputi Kabupaten serta Kota Surakarta.

Sekalipun di Kota Surakarta sudah dibentuk DPRD namun hal itu belum berarti bawa kota Surakarta menjadi otonom. Sebab urusan-urusan sosial, kesehatan, perekonomian dan pemerintahan daerah masih diatur oleh pemerintah Karesidenan Surakarta. Dan untuk selanjutnya maka dibentuklah pemerintah daerah yang demokratis dan agar kepentingan kota Surakarta mendapat jaminan dan perhatian sepenuhnya, maka dibentuklah Haminte Kota Surakarta berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1947.

c. Periode Haminte Kota Surakarta.

Kata Hamaninte berasal dari bahasa Belanda '*Stadsgemeente*', dengan '*Stad*' yang berarti sedangkan '*Gemeente*' mengalami penyesuaian pengucapan dengan bahasa orang Indonesia menjadi 'Haminte'. Istilah tersebut kemudian menjadi sebuah pengadopsian menjadi 'Haminte Kota Surakarta'.

Kota yang didasarkan atas undang-undang No. 16 tahun 1947 tentang Peraturan Daerah dan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang itu sendiri pada awalnya dimaksudkan untuk melegalkan Badan Perwakilan Rakyat Kota (Dewan Kota) dan Badan Eksekutif Kota (Dewan Pemerintahan Kota)

yang ada di Surakarta pada waktu itu. Dengan mengingat berbagai hal yang terkait dengan situasi sosial dan politik yang ada maka berbagai hal yang terkait dengan pemerinyahan kota kemudian di berikan kepada Pemerintah Kota untuk menjalankan pemerintahan. Namun dalam prakteknya ternyata tercipta berbagai situasi yang kemudian menjadikan Pemerintah Kota tidak bisa berjalan dengan efektif. Sehingga berbagai perangkat Pemerintahan Kota kemudian dievaluasi dan dihapuskan lalu hanya ditinggalkan satu fungsi yaitu Walikota sebagai Kepala Daerah. Sehubungan dengan situasi tersebut, Ketua Dewan Kota sebagai Badan Legislatif dan Dewan Pemerintahan Kota ada pada satu tangan maka terjadi banyak permasalahan. Oleh karenanya kemudian, sebagai perbaikan maka Pemerintah Pusat kemudian menetapkan undang-undang no. 16 tahun 1947, yang berisi menghapus peran Walikota sebagai Dewan Kota.

d. Periode Kota Besar

Nama kota besar Surakarta sebagai nama baru sebenarnya sudah mulai diperkenalkan seiring dengan pelaksanaan undang-undang no. 20 tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 20 Juli 1948. Akan tetapi karena terjadi pendudukan Belanda di Jawa Tengah (clash II) maka undang-undang tersebut mulai diberlakukan tahun 1950.

Di samping juga terjadi konflik internal bangsa Indonesia yaitu dengan terjadinya pembontakan PKI pada tahun 1948. Masyarakat Indonesia dilanda kecemasan karena aksi bunuh membunuh terjadi dimana-mana

tanpa memperdulikan lagi aparat keamanan. Dan yang terjadi kota Surakarta adalah terbentuknya pemerintahan ilegal yang kemudian disahkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintahan sementara ini diisi oleh para pelajar dan pemuda pada umumnya yang masih setia terhadap pemerintahan Republik Indonesia hasil kemerdekaan 1945. Hampir pada saat yang bersamaan, pemerintahan keraton Surakarta dan Mangkunegaran dengan bantuan dan perlindungan tentara Belanda juga menyusun pemerintahan, akan tetapi dalam prakteknya tidak dapat berjalan secara efektif karena tidak mendapat sambutan dari rakyat.

Pemerintah keraton Kasunanan dan Mangkunegaran ternyata masih ingin menegakkan eksistensi kekuasaan mereka dengan mengambil momentum kedatangan Belanda untuk kemudian melepaskan diri dari negara Indonesia. Namun permasalahan yang terkait dengan penghargaan masyarakat secara luas terhadap kekuasaan tradisional tersebut menjadi faktor utama penolakan tersebut.

e. Periode Kotapraja Surakarta

Akibat dari berbagai situasi yang terjadi di kota Surakarta maka pemerintah pusat kemudian memberlakukan Undang-undang tahun 1957 untuk menjadi sebuah transisi menuju pelaksanaan undang-undang no. 18 tahun 1965 yang mengatur tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang akan diberlakukan pada 1 September 1965.

Perubahan ini kemudian terkait pula dengan berbagai perubahan pada bidang lain seperti bentuk, su-

sunan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah Kotapraja Surakarta, yang didasarkan atas hasil Pemilihan Umum yang membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan. Lalu selepas itu kemudian berlakulah Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 yang kemudian ditambahi dengan undang-undang no. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku sampai perbaikan Pemerintah Daerah lewat undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Drajat Tri Kartono, 1995: 48-58)

Dari situlah kemudian negara kemudian merubah semua bangunan nilai yang ada. Negara menciptakan semua perangkat yang dibutuhkan untuk menggeser otoritas tradisional dalam ruang yang sempit untuk dibatasi hanya menjadi sebuah simbol yang ada dalam bingkai kebudayaan semata dan menghadapkan masyarakat pada satu pilihan otoritas yang legal dan formal yaitu negara.

Negara lalu secara sadar atau tidak, mulai membatasi semua gerak otoritas untuk benar-benar hanya menjadi simbol lewat berbagai kebijakannya. Semua yang dilakukan oleh negara ada dalam kerangka untuk membangun otoritas baru, yang modern. Maka bangunan sistem pendidikan, yang akan membentuk kerangka nilai masyarakat kemudian menjadi media yang efektif untuk melakukan persebaran nilai-nilai yang diinginkan oleh negara. Kebijakan tentang pembangunan kota dengan menempatkan keraton menjadi sebuah aset pariwisata lalu menempatkan keraton dalam lingkup yang sempit dan sekedar menjadi aset bagi negara. Kebijakan untuk mengembangkan kota yang

mempunyai visi maju dan modern kemudian menjadikan Kauman hanya sebatas bagian dari sistem yang hendak dibangun tersebut. Tanah yang ada di Kauman, yang dulunya hanya berhak dimiliki oleh mereka yang menjadi abdi dalem dalam bidang keagamaan (*Abdi Dalem Pametakhan*) kini menjadi hak bagi negara untuk kemudian bisa dimiliki oleh siapa saja. Tanpa harus terkategori dalam standart kepeahaman agama atau kerabat abdi dalem.

Negara berhasil mengubah karakter nilai masyarakat Kauman ke dalam sebuah kerangka nilai baru yang menempatkan ekonomi sebagai sebuah standart. Kini masyarakat Kauman sudah berubah dalam bentuk yang baru dan berbeda dengan keberadaannya pada awal terbentuk. Masyarakat Kauman sekarang menjadi masyarakat yang dinamis dengan, semua anak-anak mencita-citakan untuk menjadi dokter, tentara, guru dan yang lainnya. Tanpa ada satupun yang berkeinginan menjadi *Abdi Dalem Pametakhan*. Kauman kini menjadi masyarakat yang sama dengan masyarakat Surakarta yang lain, yang mempunyai cita-cita sama yaitu masyarakat modern.



## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Keseluruhan penelitian ini dilakukan dalam sebuah kepentingan untuk dapat melihat sejauh mana Kauman (sebagai representasi dari masa lampau yang mewakili kekuasaan, keagamaan hingga kebudayaan) telah mengalami perubahan, bagaimana prosesnya dan apa saja yang menyebabkan perubahan tersebut.

Berdasarkan apa yang peneliti ketahui tentang pergeseran masyarakat Indonesia pada umumnya terjadi pada satu proses yang hampir sama. Kesamaan itu berawal dari pola perkembangan masyarakat di Indonesia yang sebelumnya masuk pada masa-masa kejayaan kerajaan tradisional, sekalipun pada beberapa kasus tetap ada spesifikasi terhadap realitas yang ada namun secara umum logika yang digunakan hampir sama.

Oleh karena itu peneliti ingin menyimpulkan beberapa hal, yang kiranya itu dapat mereduksi berbagai hal yang telah dipaparkan sebelumnya :

#### 1. Kesimpulan Teoritis

‘Pada bentuk kesimpulan ini, peneliti ingin memaparkan kerangka pemikiran peneliti pada awal pembuatan riset ini dilakukan.

Kajian tentang masyarakat dalam dimensi perubahan tentunya tidak bisa lepas dari tempat dan waktu. Dimana tempat dan waktu akan menunjukkan sebuah masyarakat

yang sedang atau akan berubah. Dan dari situlah kemudian kita bisa melihat bagaimana dinamika masyarakat, benar-benar ada. Dengan melakukan komparasi akan kondisi awal dari masyarakat lalu membandingkannya dengan apa yang sekarang ada maka akan kita temukan banyak hal yang menggambarkan pergeseran-pergeseraan yang terdapat dalam masyarakat.

Pada awal penelitian, peneliti merasakan Kauman benar-benar menghadirkan keadaan (kebudayaan) masa lalu yang tentunya akan mempunyai sejarahnya masing-masing. Dalam banyak kajian kemudian diasumsikan oleh peneliti bahwa Kauman adalah masyarakat yang khas, dengan berbagai karakter yang menjadi identitasnya. Dan kini, ketika peneliti melakukan penelitian semua itu telah mengalami perubahan. Perubahan dalam banyak hal, yang kemudian membangun asumsi baru bagi peneliti tentang perubahan itu sendiri. Maka pengkajian terhadap proses perubahan tersebut tentunya menjadi hal yang menarik.

Kemudian dengan landasan pemikiran Weber-ian yang menempatkan pemahaman subyek sebagai sebuah penghadiran data bagi kita, lalu peneliti memulai penelitian ini. Dengan menetapkan subyek sebagai individu yang mampu bertindak dan berbagai tindakan individu tidak lepas dari kerangka nilai yang ada maka pengkajian terhadap eksistensi subyek dengan nilai-nya untuk kemudian dikomparasikan dengan apa-apa yang dulu pernah ada di Kauman (lewat teks). Di sinilah penelitian ini didasarkan.

Di samping juga pengandaian yang musti dilakukan sebelum penelitian ini dilakukan adalah asumsi dasar bahwa individu dan lingkungan akan mengalami dinamikanya masing-masing. Dan dinamika tersebut kemudian dilihat

dari studi perubahan yang biasanya dilakukan dengan pendekatan sosiologis. Dengan mengkaji juga beberapa indikator penting tentang dinamika lingkungan yaitu hadirnya negara sebagai kekuatan yang formal untuk mengganti pola kekuasaan lama yang mulai terkikis oleh gerak negara ataupun dinamika individu yang ada di dalamnya.

Hasil penelitian ini kemudian menjadi bagian baru dari konstruksi teoritik tentang perubahan yang dikemukakan oleh para pemikir developmentalistik. Kondisi ini dimungkinkan oleh perang negara yang mengadopsi kerangka berpikir ini, terutama era kejayaan Orde Baru yang menempatkan modernisasi sebagai patokan untuk melangkah bagi bangsa yang besar ini. Konsekuensi dari itu adalah menempatkan masa lalu sebagai bagian waktu yang harus ditinggalkan (dengan semua karakter kebudayaannya), karena asumsi dari modernisasi adalah rasionalitas dan dinamika teknologi. Artinya, semua yang menjadi ciri dari kejayaan masa-masa kekuatan tradisi masih eksis seperti kekerabatan, agamis hingga patron klein akan berganti dengan individualisme, sekularisme hingga kemandirian dalam semua aspek kehidupan.

Dengan berkembangnya semangat kapitalistik yang kemudian didukung semua perangkatnya oleh negara maka kehadiran modernitas tidak dapat lagi dibendung. Negara menjadi agen utama untuk merubah berbagai tata aturan sosial, dengan kekuatannya untuk memaksa dan pada akhirnya membentuk formasi sosial masyarakat yang baru serta lepas dari masa lalu.

2. Kesimpulan Metodologis.

Untuk kesimpulan metodologi ini, peneliti hanya ingin menyampaikan beberapa point pokok yang didasarkan pengalaman peneliti di lapangan

*Pertama*, kajian tentang perubahan mau tidak mau akan banyak mengangkat interpretasi peneliti terhadap banyak data-data yang dihasilkan lewat observasi. Hal itu terasa wajar karena, tidak mungkin kita mengadirkan data yang sifatnya langsung dari seorang informan untuk menceritakan masa lampau. Dan pada bentuk data seperti inilah, sebenarnya proses terbangunnya nilai dan berbagai konstruksi sosial masyarakat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

*Kedua*, konsekuensi dari pemaksimalan data yang diperoleh dari observasi adalah pemaksimalan dalam kuantitas waktu yang harus dipunyai oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti sendiri memilih Kauman -dengan mengingat konsekuensi tersebut- tetap melakukannya karena masih dalam taraf yang memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan hal tersebut.

*Ketiga*, yaitu masih sama sebagai konsekuensi dari yang pertama berupa problematika ketika hendak melakukan triangulasi kecuali lewat teks-teks yang mengkaji masyarakat tersebut secara khusus, terutama untuk triangulasi sumber.

Dari apa yang peneliti alami tersebut, maka peneliti ingin mengajukan beberapa saran terkait dengan agenda penelitian terkait : tentang pentingnya pengalokasian waktu bagi peneliti untuk bisa menjadi bagian dari obyek penelitian tersebut. Hal itu akan memberikan waktu yang lusa bagi peneliti untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan, yang mungkin bagi obyek tidak dirasakannya.

Di samping juga, kemampuan menempatkan diri pada setiap posisi atau peran yang dibutuhkan oleh seorang peneliti ketika harus berada di lapangan dalam waktu yang lama. Kepekaan peneliti akan terasah dengan sendirinya ketika setiap kali harus dihadapkan pada kecurigaan (yang terus menerus) untuk menemukan sesuatu dibalik aktivitas yang biasa-biasa saja. Dengan semua itu, harapan bagi seorang peneliti bahwa setiap kejadian adalah data, bisa diperoleh dan mampu memberi gambaran yang maksimal bagi peneliti tentang hipotesis yang senantiasa diajukannya.

### 3. Kesimpulan Empiris

Kajian tentang Kauman ini, ternyata telah membawa pada satu kepekaan akan dinamika masyarakat yang memang tidak pernah selesai. Karena hasil penelitian, menggambarkan apa yang telah peneliti hipotesiskan pada awal penelitiannya ini dilakukan yaitu telah terjadi perubahan di Kauman. Tentunya hipotesis tersebut berawal dari observasi awal tentang Kauman.

Hasil kajian empiris ini menunjukkan beberapa perubahan yang dialami oleh Kauman. Sebuah perubahan yang disebabkan oleh adanya semangat kapitalistik dalam masyarakat Kauman dan ditambah lagi dengan datangnya negara yang mengubah banyak hal berkaitan dengan apa-apa yang ada di Kauman. Efek dari dua penyebab perubahan itu meliputi perubahan yang terjadi pada struktur Tafsir Anom dan keturunannya dimana mereka sebagai *Abdi Dalam Pametakan* kini mulai mengalami banyak pergeseran, baik pada rekrutmennya diawal, strukturnya sebagai bagian dari warga yang mempunyai kepeahaman agama hingga status sosial mereka yang mulai menurun.

Di samping itu, temuan tentang berubahnya orientasi ekonomi masyarakat Kauman dari sistem ekonomi yang menjadi bagian dari sistem yang bergantung pada keraton menjadi masyarakat yang mandiri dan dinamis dengan sistem perekonomian baru yaitu berdagang, pada akhirnya juga merubah sistem nilai yang sudah ada sebelumnya. Dengan berubahnya orientasi nilai dari tradisi ke modern dan ekonomis juga merubah konstruksi imajinasi masyarakat Kauman.

Melalui tiga proses yang menyertai perubahan di Kauman, maka pergeseran otoritas dari keraton ke negara telah memberi dampak pada terbukanya masyarakat Kauman. Terbuka dengan pola rekrutmennya hingga terbuka pula sistem stratifikasi yang ada, dari tertutup, agamis dan kekerabatan yang kental (*endogen*) menjadi masyarakat terbuka, ekonomis-modern hingga tidak lagi mengedepankan pola kekerabatan yang sebelumnya telah mengalami kemampuannya. Disamping juga perubahan fisik, yang terjadi ketika banyak terjadi disfungsi ruang di Kauman dari ruang-ruang yang bermakna simbolis menjadi ruang-ruang ekonomis hingga sebagian besar ruang yang terdapat di Kauman yang mulai memadat.

Artinya Kauman, yang dulu mempunyai karakter yang spesifik. Kini telah mengalami perubahan seiring dengan pergeseran waktu yang mengakselerasi semua variabel dalam masyarakat Kauman. Masyarakat Kauman kini bergerak maju dan mulai meninggalkan apa-apa yang pernah menjadi identitasnya sebagai bagian dari otoritas keraton, yang kini mulai memudar dan diganti oleh otoritas modern yaitu negara.

## **B. SARAN**

Relevansi penelitian ini sebenarnya adalah pengevaluasian terhadap apa-apa yang pernah terjadi di sekitar kita. Ketika orang bicara tentang modernitas maka sebenarnya sesuatu yang dinamakan 'modern' itu ada karena ada masa lampau, yang kemudian kita namai dengan 'tradisional'.

Maka ketika kita percaya bahwa, masa sekarang adalah bagian dari perjalanan waktu yang akan berlaku pada masa lalu dan (bagi beberapa pemikir) mereka yakin akan adanya proses pengulangan berbagai kejadian tersebut. Oleh karenanya, semua yang hendak kita bangun tentang masa depan tidak bisa lepas dari apa-apa yang pernah terjadi sebelumnya. Sehingga kajian yang menghadirkan masa lalu sebagai landasan dalam kerangka berpikir penelitian yang akan dilakukan pada kesempatan yang lain, terasa menjadi tuntutan mendesak bagi banyak peneliti.

### **1. Saran Bagi Pemerintah**

Kebijakan atas berbagai agenda pembangunan tentunya tidak bisa lepas dari berbagai peran yang dilakukan oleh pemerintah. Maka setiap agenda pembangunan yang meletakkan masyarakat sebagai subyek yang berperan dalam berbagai dimensi kebudayaan mereka, tidak dapat ditinggalkan begitu saja.

Masyarakat Indonesia -secara umum-, mempunyai latar belakang sosial budaya yang memang telah mengalami kemapanannya selama beratus-ratus tahun. Di dalam struktur masyarakat yang seperti ini, menuntut berbagai pendekatan yang menempatkan mereka dalam sebuah konstruksi pembangunan yang tidak boleh mengabaikan dimensi-dimensi kebudayaan. Karena di sanalah eksistensi dari masa lalu mereka dihargai dan tetap terjaga. Dengan menem-

patkan berbagai kebudayaan yang ada di dalam masyarakat dalam pijakan pembangunan maka masyarakat yang berubah tidak akan mengalami kegagalan dalam arus deras perubahan dan pembangunan yang ada. Pemerintah harus mulai membuka diri terhadap semua masukan tentang karakter dasar masyarakat di Indonesia, yang telah terkonstruksi kebudayaannya, selama ini. Dan ditambah dengan partisipasi semua pihak yang mampu memahami kebudayaan dan dinamika masyarakat kita. Oleh karena itu, sekarang pemerintah harus mulai :

- a. Memperhatikan sumbang para ilmuwan.
- b. Membuka keterlibatan lebih jauh, pihak-pihak lain untuk bersama-sama terlibat dalam agenda pembangunan.
- c. Mengakomodasi semua kepribadian lokal (dalam dimensi kebudayaannya).
- d. Mengembangkan masyarakat atas dasar, basis kebudayaan yang telah ada dalam masyarakat.

## 2. Saran Bagi Masyarakat Kauman

Bahwa setiap masyarakat akan mempunyai berbagai perangkat kebudayaan dan tingkah laku kebudayaannya masing-masing. Dalam posisi, dimana perubahan akan terus terjadi dan tidak dapat dibendung maka bangunan dari identitas tersebut harus tetap mempunyai fungsi di dalamnya, sebab dari nilai gunalah kebudayaan akan dipertahankan dalam masyarakat. Maka, setiap usaha pencarian atas berbagai ruang-ruang kebudayaan agar tetap mengalami relevansinya dalam dinamika masyarakat secara keseluruhan adalah agenda yang tidak terhindarkan. Karena dinamika masyarakat akan menyeret setiap individu yang ada di dalamnya, maka konsep individu yang juga tidak

terabaikan dalam perubahan yang dialami oleh masyarakat tetap diutamakan.

Dinamika dari semua elemen dalam masyarakat sebenarnya juga tergantung terhadap bagaimana masyarakat melihat bagaimana setiap ruang dalam kehidupannya memungkinkan untuk berubah sekaligus memungkinkan untuk dipertahankan. Maka sosialisasi nilai dengan semua perangkat yang ada di dalam masyarakat akan menjadi media yang efektif untuk mencerna semua dinamika yang ada. Apakah dinamika tersebut akan mengarah pada perubahan yang lebih baik, dengan memberi nilai guna yang lebih bagi masyarakat atau kemudian yang terjadi adalah pergeseran dari semua elemen dalam masyarakat yang pada akhirnya menyeret masyarakat ke dalam situasi yang tidak pernah diinginkan sebelumnya. Yaitu khaos, dimana individu mulai kehilangan perannya dalam lingkungan dimana ia berada dan mulai berjarak anatar satu individu dengan individu yang lain oleh sebab ketiadaan nilai yang diinginkan oleh masyarakat untuk hidup bersama-sama.

Terakhir, peneliti menyatakan -dengan segala kerendahan hati- akan banyaknya kekurangan yang peneliti miliki dan hasil penelitian ini juga tidak lepas dari kekurangan tersebut. Oleh-nya, semua ini terbuka untuk dikaji, didiskusikan dan diinterpretasikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antlov, Hans. 2000 : *Kepemimpinan Jawa; Perintah halus, Pemerintah Otoriter*, Yayasan Obor Indonesia.
- Benda, J Hari. 1980 : *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Pustaka Jaya.
- Bodgan, Robert & Taylor, J Steven. 1993 : *Kualitatif, Dasar-dasar Penelitian, Usaha Nasional*.
- Darban, A. Adaby. 2000 : *Sejarah Kauman, Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah Yogyakarta*, Tarawang.
- D. H. Burger, 1960 : *Sejarah Ekonomis Sosiologis Masyarakat Indonesia*, Paramita.
- \_\_\_\_\_, 1983 : *Perubahan-Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*, Bharata Akasara.
- Hauben, J Vincent, 2002 : *Keraton dan Kompeni : Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*, Bentang.
- Herusatoto, Budiono. 2000 : *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, Hanindita.
- Hendropuspito, 1989 : *Sosiologi Sistematis*, Kanisius.
- Hafner, W Robert. 1999 : *Budaya Masyarakat ; Masyarakat dan Moralitas dalam Kapitalisme Asia Baru*, LP3ES.
- Kuntowijoyo, 1998 : *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Mizan.
- Koentjaraningrat, 1991 : *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia.
- Koentjaraningrat & Donald K Emerson, 1982 : *Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat*, Gramedia.

*Memudarnya Kauman*

- Laurer, H Robert. 2001 : *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Rineka Cipta.
- Lerner, Daniel . 1983 : *Memudarnya Masyarakat Tradisional*, UGM Press.
- Mulder, Niels. 1996 : *Pribadi dalam Masyarakat Jawa*, Sinar Harapan.
- Miles, B Matthew & Huberman, A. Michael. 1992 : *Analisis Data Kualitatif*, UI Press.
- M. Rickleff, 1996 : *Sejarah Indonesia Modern*, UGM Press.
- Moleong, Lexy 2001 : *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya.
- Nas, J M Peter. 1986 : *The Indonesian City, Studies in Urban Development and Planning*, Foris Publications
- Ratna, Dwi dkk, 1999 : *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*, Depdiknas.
- Suhartono, 1991 : *Apanege dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, Tiara wacana.
- Sanderson, K Stephen. 2000 : *Makro Sosiologi, Suatu Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Rajawali Pers.
- Supriadi, 2001 : *Kyai dan Priyayi di Masa Transisi*, Pustaka Cakra.
- Soekanto, Soerjono. 1987 : *Pengantar Sosiologi*, Rajawali Pers.
- Soeratman, Darsiti. 2000 : *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*, Yayasan Untuk Indonesia.
- Syani, Abdul. 1995 : *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Pustaka Jaya.
- Susanto, Astrid. 1999 : *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Putra Abadia.
- Singarimbung, Masri & Effendi, Sofian. 1982 : *Metode Penelitian Survei*, LP3ES.
- Sulaiman, Munandar. 1998 : *Dinamika Masyarakat Transisi, Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*, Pustaka Pelajar.

*Ahmad Ramdhon*

- Sauthall, Aidan. 1985 : *Studies in Urban Ethnicity, Life Style and Class*. Institute of Cultural Studies.
- Ritzer, George. 1992 : *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers.
- Laurer, H Robert. 2001 : *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Rineka Cipta. Usaha Nasional.
- Palen, J John. 1987 : *The Urban World*, Mc Graw Hill.
- Taneko, B Soleman. 1990 : *Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Rajawali Pers.
- Woodward, W Mark. 1999 : *Islam Jawa, Kesalehan Normatif dan Kebatanaan*, LP3ES.
- Yunus, S Hadi. 2000 : *Struktur Tata Ruang Kota*. Pustaka Pelajar.

**Non pustaka (buku) :**

- Darlifi, 1999 : *Perkembangan Masyarakat Kauman Kodya Semarang Tahun 1970-1990-an*, Skripsi Sejarah Fakultas Sastra UNDIP.
- Karsono, Danarti. 1996 : *Kajian Tentang Perubahan Bentuk Tata Ruang Lingkungan Permukiman di Kauman Surakarta*, Tesis S-2 UGM.
- Kartono, Drajat Tri. 1995 : *Distribusi Pelayanan Umum di Kota ; Analisis Stratifikasi*, Tesis S-2 UI.
- Indraswati, Rikha. 1992 : *Sikap Hidup Wanita Muslim di Kauman; Tinjauan Antropologi Islam*, Skripsi Sejarah Fakultas Sastra UNS.
- Setyaningsih, Wiwik. 2000 : *Sistem Spasial Rumah di Kauman Surakarta*, Tesis S-2 UGM.
- Zaki, Muhammad. 1999 : *Etos Kerja Wanita Pengusaha Batik di Kauman Surakarta*, Skripsi Sejarah Fakultas Sastra UNS.